



RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMK 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Lhokseumawe



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

KATA PENGANTAR

RPJMK

LHOKSEUMAWE

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan Rahmat-Nya sehingga kami dapat Menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Rancangan Teknokratik RPJMK merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe.

Tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan informasi awal kepala para calon Wali Kota untuk Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang relevan dengan kondisi daerah;
2. Sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas Visi, Misi dan Program Prioritas para Calon Wali Kota yang berbasis data dan informasi yang akurat;
3. Untuk menyiapkan penyusunan rancangan awal dokumen RPJMK Lhokseumawe lebih awal, sehingga menjamin terlaksananya penyusunan RPJMK sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017;

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini masih banyak kekurangan dari segi Bahasa dan menulisan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lhokseumawe, Juli 2024

Tim Penyusun



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

**DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR**

**RPJMK
LHOKSEUMAWE
2025 - 2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.3.1 Amanat RPJMN Tahun 2025-2029	I-4
1.3.2 Amanat RPJM Provinsi Aceh Tahun 2025-2029	I-7
1.3.3 Amanat RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-14
1.5. Sistematika Penyusunan	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Aspek Geografi Daerah	II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.1.4. Kondisi Geologi	II-4
2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi	II-4
2.1.1.1.6. Klimatologi	II-6
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-9
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-21
2.1.1.4. Aspek Demografi	II-23
2.1.1.4.1. Jumlah Penduduk	II-23
2.1.1.4.2. Kepadatan dan persebaran Penduduk	II-24
2.1.1.4.3. Pertumbuhan Penduduk	II-25
2.1.1.4.4. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-27
2.1.1.4.5. Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-28
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-29
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-40
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya	II-54
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-56
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..	II-59
2.1.3.1.1. Pendidikan	II-59

2.1.3.1.2.	Kesehatan	II-66
2.1.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-104
2.1.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-109
2.1.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-121
2.1.3.1.6.	Sosial	II-130
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-135
2.1.3.2.1.	Tenaga Kerja	II-135
2.1.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-138
2.1.3.2.3.	Pangan	II-144
2.1.3.2.4.	Pertanahan	II-146
2.1.3.2.5.	Lingkungan Hidup	II-148
2.1.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-152
2.1.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-157
2.1.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-165
2.1.3.2.9.	Perhubungan	II-167
2.1.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II-175
2.1.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	II-178
2.1.3.2.12.	Penanaman Modal	II-180
2.1.3.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-183
2.1.3.2.14.	Statistik	II-185
2.1.3.2.15.	Persandian	II-186
2.1.3.2.16.	Kebudayaan	II-187
2.1.3.2.17.	Perpustakaan	II-189
2.1.3.2.18.	Kearsipan	II-193
2.1.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-194
2.1.3.3.1.	Pariwisata	II-194
2.1.3.3.2.	Pertanian	II-196
2.1.3.3.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-197
2.1.3.3.4.	Perdagangan	II-199
2.1.3.3.5.	Perindustrian	II-200
2.1.3.3.6.	Kelautan dan Perikanan	II-201
2.1.3.4.	Aspek Penunjang Urusan.....	II-202
2.1.3.4.1.	Perencanaan Pembangunan	II-202
2.1.3.4.2.	Keuangan	II-206
2.1.3.4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-209
2.1.3.4.4.	Penelitian dan Pengembangan	II-214
2.1.3.4.5.	Pengawasan	II-217
2.1.3.4.6.	Sekretariat DPRK	II-219
2.1.3.4.7.	Sekretariat Daerah.....	II-220
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-221

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBK	III-2
3.1.1.1.	Pendapatan Daerah	III-9
3.1.1.2.	Belanja Daerah	III-24
3.1.1.3.	Pembiayaan Daerah	III-32
3.1.2.	Neraca Daerah	III-33
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-40
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-41
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-42
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-43
3.3.1	Proporsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	III-44
3.3.1.1	Pendapatan.....	III-44
3.3.1.2	Belanja	III-46
3.3.1.3	Pembiayaan	III-48
3.3.2.	Proyeksi Kerangka Pendanaan	III-48
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA LHOKSEUMAWE	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.2	Aspek Pelayanan Umum	IV-3
4.1.3	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	IV-7
4.1.4	Layanan Urusan Pilihan	IV-11
4.1.5	Penunjang Urusan.....	IV-12
4.1.6	Kekhususan Aceh	IV-14
4.2.	Isu Strategis	IV-14
4.2.1	Isu Megatren dan Internasional	IV-14
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-15
4.2.3	Isu Strategis Aceh	IV-16
4.2.4	Isu Strategis Kota Lhokseumawe	IV-28
4.2.4.1	Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan	IV-28
4.2.4.2	Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi an Peningkatan Pendapatan Perkapita	IV-29
4.2.4.3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	IV-31

4.2.4.4	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	IV-33
4.2.4.5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal	IV-34
4.2.4.6	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	IV-37
4.2.4.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas	IV-38
BAB V	REKOMENDASI	IV-1
5.1.	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis Tahun 2025-2029.....	V-1
5.1.1	Transformasi Sosial	V-1
5.1.2	Transformasi Ekonomi.....	V-3
5.1.3	Transformasi Tata Kelola	V-7
5.1.4	Transformasi Hukum, Stabilitas dan Implementasi Syariat Islam	V-8
5.1.5	Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	V-10
5.2	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJPK Lhokseumawe (Tahun 2025-2045) Tahapan Pertama Tahun 2025- 2029	V-13
5.2.1	Transformasi Sosial	V-13
5.2.2	Transformasi Ekonomi.....	V-13
5.2.3	Transformasi Tata Kelola	V-14
5.2.4	Mewujudkan Ketertiban Daerah	V-14
5.2.5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.	V-15
5.2.6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	V-15
5.2.7	Kesinambungan Pembangunan	V-16
5.3	Rekomendasi Program dan Kegiatan Prioritas berdasarkan RTRW	V-16
5.3.1	Perwujudan Rencana Struktur Ruang	V-16
5.3.1.1	Sistem Pusat Pelayanan	V-16
5.3.1.2	Sistem Jaringan Transportasi	V-18
5.3.1.3	Sistem Jaringan Energi	V-26
5.3.1.4	Sumber Jaringan Telekomunikasi	V-35
5.3.1.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	V-38
5.3.1.6	Infrastruktur Perkotaan	V-44
5.3.2	Perwujudan Rencana Pola Ruang	V-62
5.3.2.1.	Kawasan Lindung	V-62
5.3.2.2.	Kawasan Budi Daya	V-70
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe	II-2
Tabel	2.2	Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-7
Tabel	2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-8
Tabel	2.4	Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-8
Tabel	2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe	II-9
Tabel	2.6	Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	II-22
Tabel	2.7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-22
Tabel	2.8	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Per Kecamatan Tahun 2019-2023	II-24
Tabel	2.9	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2019-2023	II-25
Tabel	2.10	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-26
Tabel	2.11	Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-27
Tabel	2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-27
Tabel	2.13	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	II-30
Tabel	2.14	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	II-31
Tabel	2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-32
Tabel	2.16	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun Tahun 2019-2023.....	II-34
Tabel	2.17	Inflasi Kota Lhokseumawe Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2023	II-35
Tabel	2.18	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-39
Tabel	2.19	Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-40

Tabel	2.20	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-41
Tabel	2.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-46
Tabel	2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-47
Tabel	2.23	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-49
Tabel	2.24	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-52
Tabel	2.25	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-53
Tabel	2.26	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-53
Tabel	2.27	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-54
Tabel	2.28	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II-55
Tabel	2.29	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-64
Tabel	2.30	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-65
Tabel	2.31	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2019-2023	II-66
Tabel	2.32	Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-67
Tabel	2.33	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-68
Tabel	2.34	Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-69
Tabel	2.35	Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-70
Tabel	2.36	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-70
Tabel	2.37	Rasio Posyandu Per Satuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-71
Tabel	2.38	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023...	II-72
Tabel	2.39	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-73
Tabel	2.40	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-74

Tabel	2.41	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-75
Tabel	2.42	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-76
Tabel	2.43	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-77
Tabel	2.44	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel	2.45	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-79
Tabel	2.46	Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-80
Tabel	2.47	Cakupan Persentase Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-81
Tabel	2.48	Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-82
Tabel	2.49	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-83
Tabel	2.50	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023...	II-84
Tabel	2.51	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-85
Tabel	2.52	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-86
Tabel	2.53	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-87
Tabel	2.54	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-88
Tabel	2.55	Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-89
Tabel	2.56	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-90
Tabel	2.57	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-91
Tabel	2.58	Cakupan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-92
Tabel	2.59	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-92

Tabel	2.60	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-93
Tabel	2.61	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-94
Tabel	2.62	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ..	II-95
Tabel	2.63	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-96
Tabel	2.64	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ...	II-97
Tabel	2.65	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-98
Tabel	2.66	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-99
Tabel	2.67	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-101
Tabel	2.68	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-102
Tabel	2.69	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023	II-103
Tabel	2.70	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-104
Tabel	2.71	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Km)	II-105
Tabel	2.72	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-106
Tabel	2.73	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-107
Tabel	2.74	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-108
Tabel	2.75	Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-109
Tabel	2.76	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-110
Tabel	2.77	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023 ..	II-110
Tabel	2.78	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-111
Tabel	2.79	Areal Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-111
Tabel	2.80	Rasio Tempat pemakaman Umum Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ..	II-113
Tabel	2.81	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-114

Tabel	2.82	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-115
Tabel	2.83	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-116
Tabel	2.84	Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung Yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-118
Tabel	2.85	Capaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	II-118
Tabel	2.86	Luas Permukiman Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-119
Tabel	2.87	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-120
Tabel	2.88	Jumlah Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-120
Tabel	2.89	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	II-121
Tabel	2.90	Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-122
Tabel	2.91	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-123
Tabel	2.92	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-124
Tabel	2.93	Jumlah penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-126
Tabel	2.94	Indeks Resiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-127
Tabel	2.95	Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-128
Tabel	2.96	Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-129
Tabel	2.97	Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	II-130
Tabel	2.98	Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut Kecamatan Tahun 2023	II-131
Tabel	2.99	PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-132
Tabel	2.100	Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-132
Tabel	2.101	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2023	II-134

Tabel	2.102	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-135
Tabel	2.103	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-136
Tabel	2.104	Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-136
Tabel	2.105	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .	II-137
Tabel	2.106	Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-138
Tabel	2.107	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-140
Tabel	2.108	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-141
Tabel	2.109	Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-141
Tabel	2.110	Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-142
Tabel	2.111	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Lhokseumawe 2019-2023	II-143
Tabel	2.112	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-144
Tabel	2.113	Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-145
Tabel	2.114	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-146
Tabel	2.115	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.	II-147
Tabel	2.116	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-147
Tabel	2.117	Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023...	II-148
Tabel	2.118	Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-151
Tabel	2.119	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-151
Tabel	2.120	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-152
Tabel	2.121	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-153
Tabel	2.122	Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-155
Tabel	2.123	Rasio Anak yang memiliki KIA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-156
Tabel	2.124	Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-156
Tabel	2.125	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-158

Tabel	2.126 Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-160
Tabel	2.127 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-161
Tabel	2.128 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-162
Tabel	2.129 Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-163
Tabel	2.130 Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-164
Tabel	2.131 Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-165
Tabel	2.132 Perkembangan Kampung KB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-165
Tabel	2.133 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-168
Tabel	2.134 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-168
Tabel	2.135 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-169
Tabel	2.136 Jumlah Terminal Bus di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-170
Tabel	2.137 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-170
Tabel	2.138 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-171
Tabel	2.139 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-174
Tabel	2.140 Visi Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota Lhokseumawe Tahun 2020	II-175
Tabel	2.141 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-176
Tabel	2.142 Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-176
Tabel	2.143 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-178
Tabel	2.144 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-179
Tabel	2.145 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-180
Tabel	2.146 Nilai Omset UKM yang dibina Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-180
Tabel	2.147 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN Dan PMA diKota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .	II-181

Tabel	2.148	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDM dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-182
Tabel	2.149	Pelayanan Perizinan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-183
Tabel	2.150	Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-184
Tabel	2.151	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-184
Tabel	2.152	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-185
Tabel	2.153	Persentase PD yang telah menggunakan Sandi Dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-187
Tabel	2.154	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-188
Tabel	2.155	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-188
Tabel	2.156	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-190
Tabel	2.157	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-190
Tabel	2.158	Rasio Jumlah Perpustakaan per10.000 Penduduk Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-191
Tabel	2.159	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-192
Tabel	2.160	Jumlah OPD yang mengelola Arsip secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-193
Tabel	2.161	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-194
Tabel	2.162	Objek Wisata Kota Lhokseumawe	II-195
Tabel	2.163	PAD Sektor Pariwisata Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-196
Tabel	2.164	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-197
Tabel	2.165	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-198
Tabel	2.166	Rasio Ketersediaan Daya Saing Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-198
Tabel	2.167	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-199
Tabel	2.168	Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe 2019-2023	II-200
Tabel	2.169	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-201
Tabel	2.170	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-201

Tabel	2.171	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.....	II-202
Tabel	2.172	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	II-203
Tabel	2.173	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	II-204
Tabel	2.174	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Lhokseumawe	II-204
Tabel	2.175	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-205
Tabel	2.176	Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-206
Tabel	2.177	Persentase Silpa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-207
Tabel	2.178	Persentase Belanja Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-207
Tabel	2.179	Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2020	II-208
Tabel	2.180	Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023	II-209
Tabel	2.181	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-210
Tabel	2.182	Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-210
Tabel	2.183	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-211
Tabel	2.184	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-212
Tabel	2.185	Indeks Profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	II-214
Tabel	2.186	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-215
Tabel	2.187	Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-217
Tabel	2.188	Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-218
Tabel	2.189	Capaian Survey Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-219
Tabel	2.190	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-220
Tabel	2.191	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.....	II-221
Tabel	2.192	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan Bank Umum di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (juta)	II-224

Tabel	2.193	Rasio Ketergantungan diKota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-224
Tabel	2.194	Jumlah Tindak Kriminalitas di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-225
Tabel	3.1	Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-4
Tabel	3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2021-2025	III-6
Tabel	3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-10
Tabel	3.4	Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-11
Tabel	3.5	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-12
Tabel	3.6	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-13
Tabel	3.7	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-14
Tabel	3.8	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-15
Tabel	3.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-16
Tabel	3.10	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pusat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-17
Tabel	3.11	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-18
Tabel	3.12	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-19
Tabel	3.13	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-20
Tabel	3.14	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-21
Tabel	3.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-22
Tabel	3.16	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-23
Tabel	3.17	Anggaran dan Realisasi Total Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-25
Tabel	3.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-25
Tabel	3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-26

Tabel	3.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-28
Tabel	3.21	Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Modal Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	III-28
Tabel	3.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-30
Tabel	3.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-31
Tabel	3.24	Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	III-31
Tabel	3.25	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-32
Tabel	3.26	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-33
Tabel	3.27	Neraca Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	III-35
Tabel	3.28	Balance Sheet Ratio Neraca Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-39
Tabel	3.29	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-42
Tabel	3.30	Surplus/Defisit Riil ANggaran dan Penutup Defisit Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	III-43
Tabel	3.31	Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-45
Tabel	3.32	Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-47
Tabel	3.33	Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-48
Tabel	3.34	Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	III-49
Tabel	5.1	Isu Strategis pada Dinas Kesehatan	V-1
Tabel	5.2	Isu Strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	V-2
Tabel	5.3	Isu Strategis pada Bappeda, DPMTSP, Naker dan Dinas Sosial	V-3
Tabel	5.4	Isu Strategis pada Bappeda, Disporapar, Disperindagkop dan UMKM, DPMTSP dan Naker dan Bagian Ekonomi Setdako	V-4
Tabel	5.5	Isu Strategis pada DLH dan Dinas PUPR	V-5
Tabel	5.6	Isu Strategis pada Diskominfo	V-6
Tabel	5.7	Isu Strategis pada Bappeda, Disperindagkop dan UMKM	V-6
Tabel	5.8	Isu Strategis pada Bappeda, Dinas PUPR dan DPMG	V-7

Tabel	5.9	Isu Strategis pada Bag. Hukum, Diskomimfo, Bag. Organisasi dan Inspektorat.....	V-7
Tabel	5.10	Isu Strategis pada Bag. Hukum dan Badan Kesbangpol	V-8
Tabel	5.11	Isu Strategis pada BPKD, Bag. Ekonomi dan Bappeda	V-9
Tabel	5.12	Isu Strategis pada Dinas Syariat Islam dan Dayah .	V-9
Tabel	5.13	Isu Strategis pada Dinas PK dan Badan Kesbangpol	V-10
Tabel	5.14	Isu Strategis pada DP3AP2KB.....	V-10
Tabel	5.15	Isu Strategis pada DLH dan Dinas PUPR	V-11
Tabel	5.16	Isu Strategis pada Dinas PUPR dan DKPPP	V-12
Tabel	5.17	Isu Strategis pada BPBD dan DLH.....	V-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe	II-2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II-4
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-6
Gambar 2.5	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-23
Gambar 2.6	Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2023	II-25
Gambar 2.7	Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023	II-28
Gambar 2.8	Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023	II-36
Gambar 2.9	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2.10	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, aceh dan Nasional Tahun 2019- 2023	II-38
Gambar 2.11	Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.12	Perbandingan Angka Melek Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023	II-42
Gambar 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-43
Gambar 2.14	Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-44
Gambar 2.15	Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-45
Gambar 2.16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019- 2023	II-46
Gambar 2.17	Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019- 2023	II-48
Gambar 2.18	Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Lhokseumawe Tahun 2019- 2023	II-49
Gambar 2.19	Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.20	Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023	II-51
Gambar 2.21	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-56

Gambar 2.22	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-57
Gambar 2.23	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-58
Gambar 2.24	Angka Partisipasi Pasar Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-59
Gambar 2.25	Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-61
Gambar 2.26	Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2.27	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.28	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe, Tahun 2019-2023	II-101
Gambar 2.29	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-127
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-138
Gambar 2.31	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.....	II-139
Gambar 2.32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2023	II-150
Gambar 2.33	Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-157
Gambar 2.34	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-159
Gambar 2.35	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe	II-216
Gambar 2.36	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Menurut Makanan dan Non Makanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023	II-222
Gambar 2.37	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (juta rupiah) Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe.....	II-223



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - I PENDAHULUAN

**RPJMK
LHOKSEUMAWE
2025 - 2029**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 27 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada semester pertama tahun 2024 dengan harapan dapat diselesaikan sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah agar menjadi rujukan bagi para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menyusun visi, misi dan program prioritasnya. Pada sisi lain, Rancangan Teknokratik RPJMK ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menilai kesesuaian visi, misi dan program prioritas para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan kondisi obyektif Kota Lhokseumawe.

Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Rancangan teknokratik tersebut akan diintegrasikan dengan visi dan misi Wali Kota Lhokseumawe yang terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini merupakan penyelarasan tahap pertama dari RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.1 Amanat RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJPN 2025-2045 dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan,

tahapan pertama RPJMN 2025-2029 Penguatan Fondasi Transformasi dengan arah kebijakan yaitu:

1. Transformasi Sosial,

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;

2. Transformasi Ekonomi,

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi *carbon credit* secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.

3. Transformasi Tata Kelola,

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia,

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas,

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*smart grid*). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan

pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone logistic* domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok.

6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam Masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan, penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

7. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

8. Kestinambungan Pembangunan,

Pembiayaan pembangunan melalui reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah. Dioptimalkan fiskal, serta pembiayaan

1.3.2 Amanat RPJM Provinsi Aceh Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJPA 2025-2045 dengan Visi Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan, tahapan pertama RPJMA 2025-2029 dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi sosial,

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi,

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Aceh, pembangunan perkotaan dan pusatt-pusat pertumbuhan utamanya di Basajan, Barsela, DTGA, Tatimlaga, Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storage System(ESS); pengembangan PLTA. PLTB,), implementasi carbon credit; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan energi terbarukan;

3. Transformasi Tata Kelola,

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam,

Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan

Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.

5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas,

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan jalan provinsi dalam keadaan mantap terutama di Singkil-Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat-Aceh Besar, pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi seperti KEK Arun, BPKS, pembangunan infrastruktur Aceh mengarah kepada pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas kepulauan sebagai *backbone* logistik bagi daerah kepulauan yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota dan daerah yang sudah berkarakteristik kota, serta melanjutkan peningkatan ekonomi Aceh yaitu Banda Aceh, Langsa, Subulussalam, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok. pusat-pusat penumbuhan utamanya di Dataran Tinggi Gayo dan Alas, Banda Aceh Sabang dan Jantho, Kawasan Barat-Selatan Aceh, Kawasan Tamiang-Aceh Timur-Gayo, memperkuat pembangunan di kepulauan Aceh, terutama Simeulue, Pulau Banyak, Sabang, Pulo Aceh, dan kemaritiman, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak,

sanitasi dan air minum dan penyediaan infrastruktur SDA, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas pertanian dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir

6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Ketahanan ekologi difokuskan pada peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan, penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); implementasi *carbon credit*, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, tetap mempertahankan moratorium hutan, dan perkuatan kelestarian hutan, serta penyelesaian konflik satwa.

7. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

8. Kestinambungan Pembangunan.

Kestinambungan pembiayaan pembangunan, melalui keberlanjutan dana otsus, reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah seperti keterlibatan perusahaan dengan CSRnya, LSM funding, dioptimalkan fiskal terutama Pendapatan Asli Aceh, serta pembiayaan.

1.3.3 Amanat RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045

Sesuai dengan rancangan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dengan Visi “Kota Lhokseumawe Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”, tahapan pertama RPJPK Lhokseumawe yaitu Penguatan Modal Dasar dan merupakan tahapan pertama RPJMK

Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial,

Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar, peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan, peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat, peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan numerasi bagi seluruh peserta didik dan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi,

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan, optimalisasi kemudahan investasi, peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif, mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja, meningkatkan daya tarik dan promosi wisata, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi PAD dan retribusi daerah.

3. Mewujudkan transformasi tata Kelola,

Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegras dan berjangka panjang, penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN, peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah, pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang

berhubungan dengan SPIP, pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan, pengembangan budaya politik pada penanaman nilai-nilai demokratis dan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum.

4. Mewujudkan Ketertiban Daerah, Penegakan Hukum, Stabilitas dan Implementasi Syariat Islam

Pengembangan budaya hukum, penegakan hukum yang adil, ketertiban masyarakat, stabilitas ekonomi yang ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Pemantapan pelaksanaan nilai Syariat Islam dengan memantapkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada masyarakat dan pendidikan keagamaan secara optimal.

5. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas,

Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur *drainase* kota, Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah, penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman.

6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Penguatan Kelembagaan kesetaraan *gender*, Penguatan kelembagaan kepengurusan anak, pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius dan melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan lokal, peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional, perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan diversifikasi tanam.

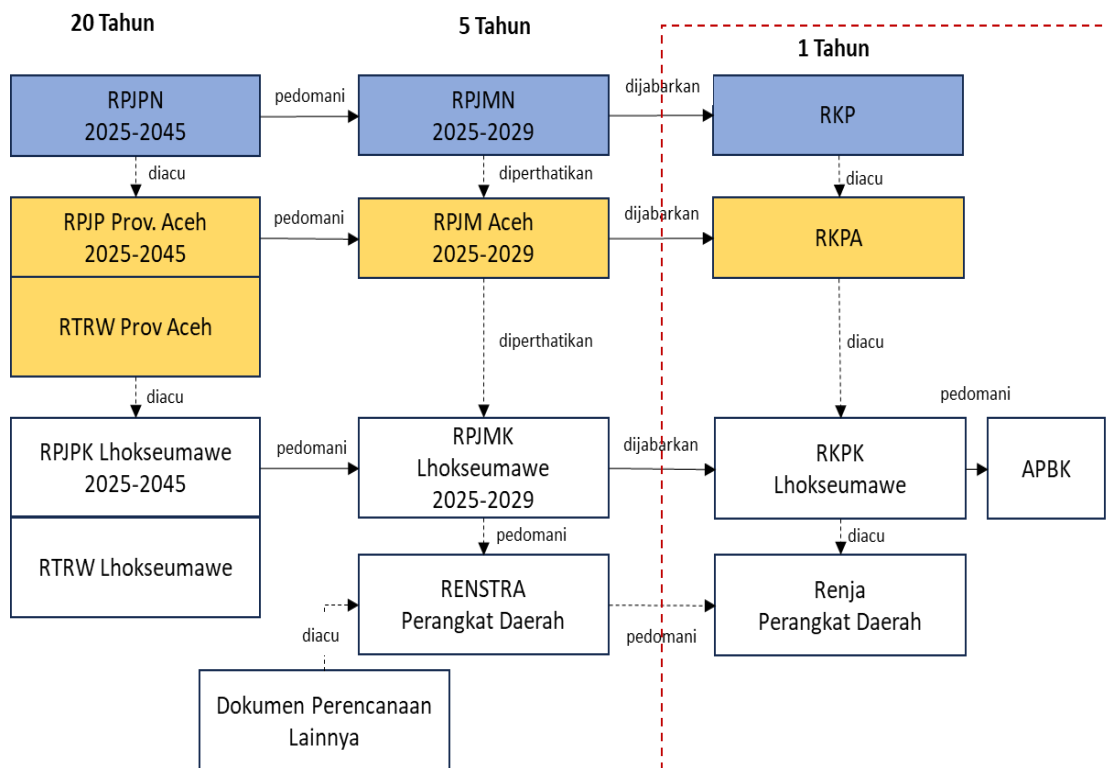
7. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

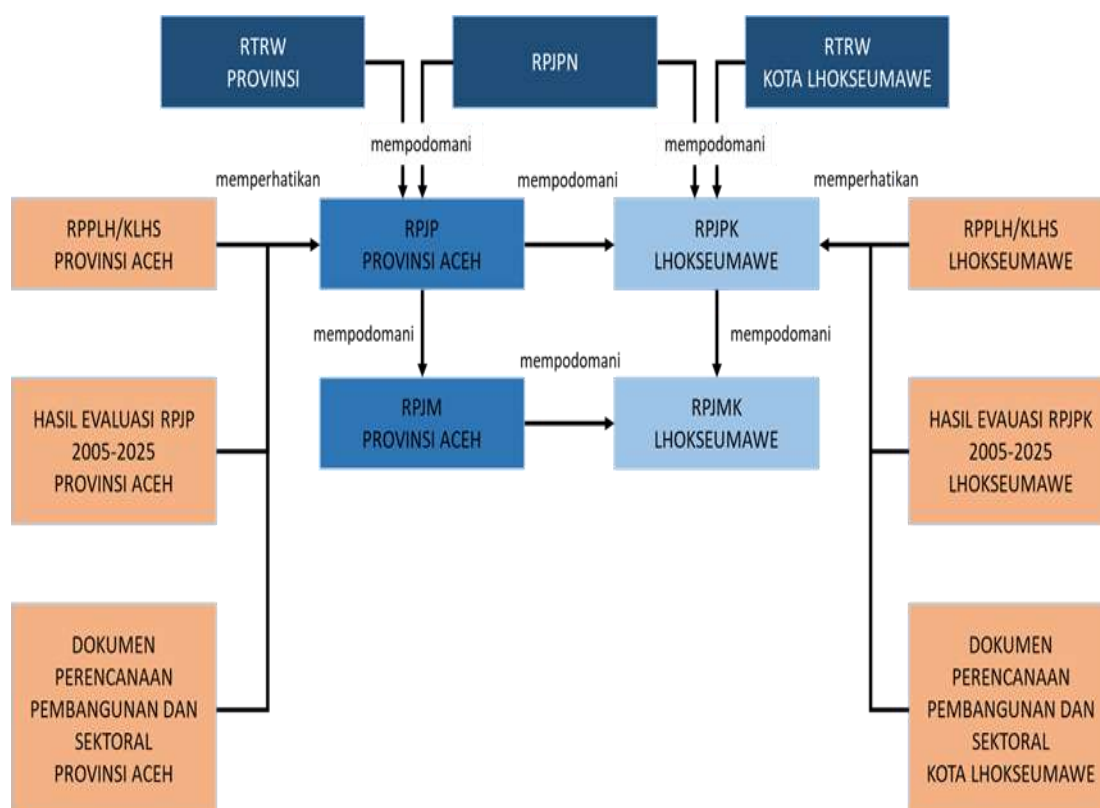
8. Kestinambungan Pembangunan.

Memastikan perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan kestinambungan pembangunan dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Disusunnya Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Lhokseumawe sesuai dengan rancangan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045. Tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025- 2029 adalah:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan;

- 2) Sebagai rancangan awal penyusunan Rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- 3) Memberikan masukan kepada Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dalam menyusun Visi dan Misi, sehingga tetap terjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Nasional;
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Pusat; dan
- 5) Memberikan informasi berkaitan dengan isu strategis bagi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe dalam menyusun Visi dan Misi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

1.5 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai dokumen pendahuluan Rancangan Teknokratik RPJMK disusun berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Lhokseumawe

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : Gambaran Keuangan Kota Lhokseumawe

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBK dan

neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan RPJPK Tahap I dan analisis lingkungan strategis.
- BAB V : Rekomendasi
Rekomendasi Kebijakan
- BAB VI : Penutup



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

RPJMK

**LHOKSEUMAWE
2025 - 2029**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di Aceh yang terletak persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga Kota Lhokseumawe merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe tidak bersinggungan langsung dengan Ibu Kota Propinsi yaitu Kota Banda Aceh dan harus menempuh jarak kurang lebih 207 km untuk mencapainya. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Aspek Geografi Daerah

Aspek geografi ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha. Kota Lhokseumawe berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Kecamatan, 9 kemukiman dan 68 Gampong. Secara rinci Kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

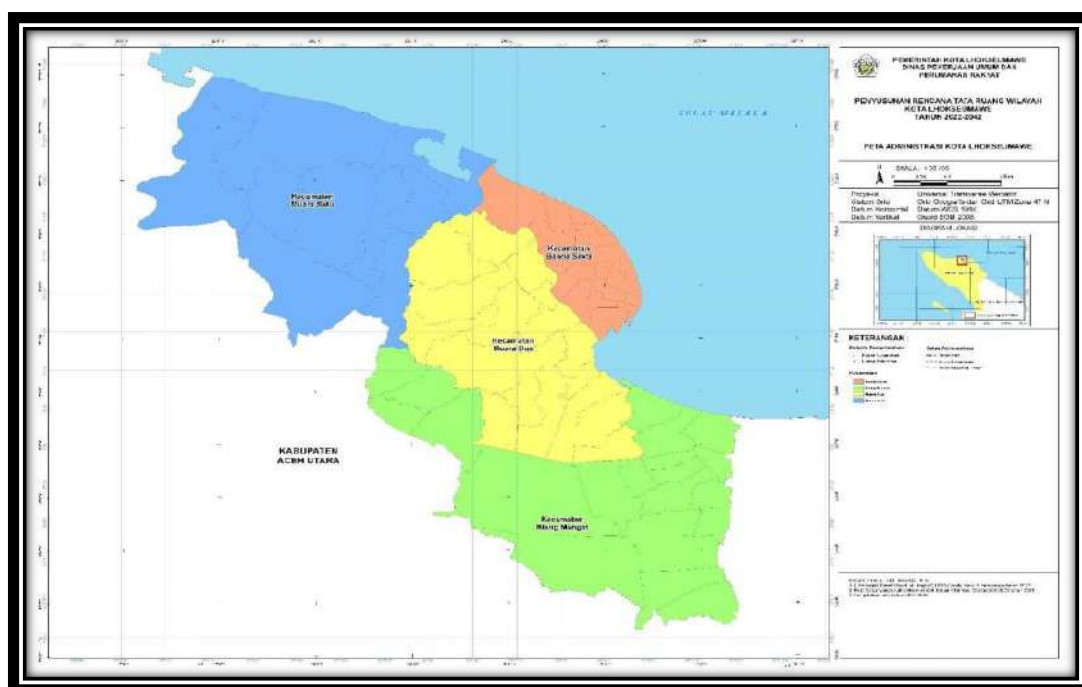
Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Banda Sakti	11.24	6.21
2	Muara Dua	57.80	31.92
3	Blang Mangat	56.12	31.00
4	Muara Satu	55.90	30.87
Kota Lhokseumawe		181.06	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2023

Kecamatan Muara Dua merupakan Kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah sebesar 57.80 km² atau 31.92% dari luasan Kota Lhokseumawe dan Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Banda Sakti yaitu seluas 11.24 km² atau sebesar 6.21% dari luasan Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Lhokseumawe terletak diantara 04°54' Lintang Utara 05°18' Lintang Selatan serta 96°20'–97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit

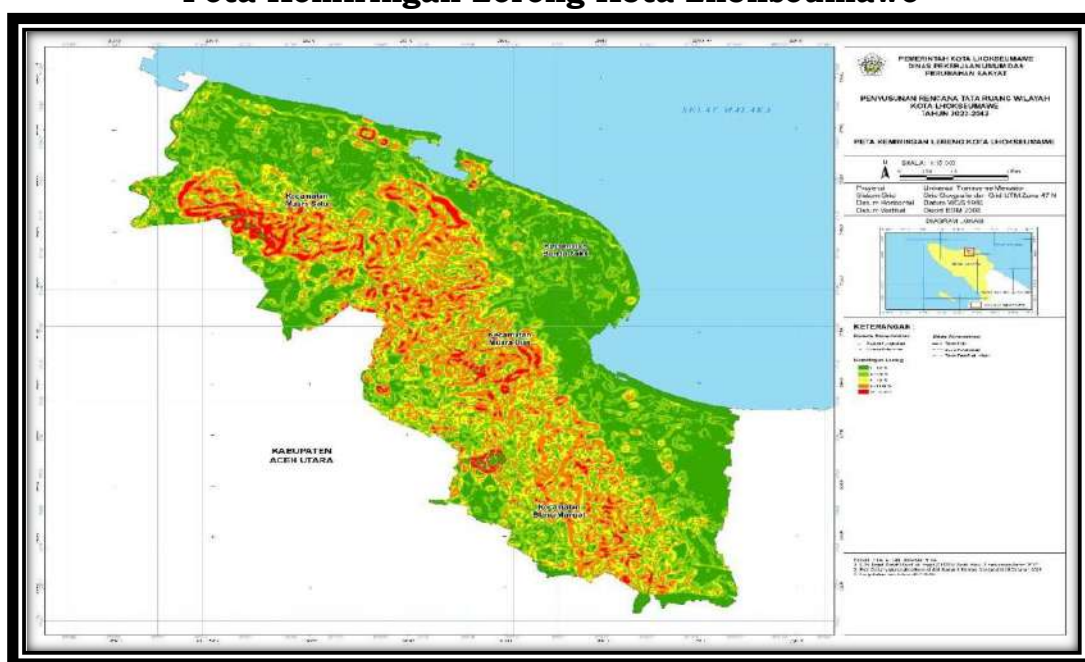
dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe

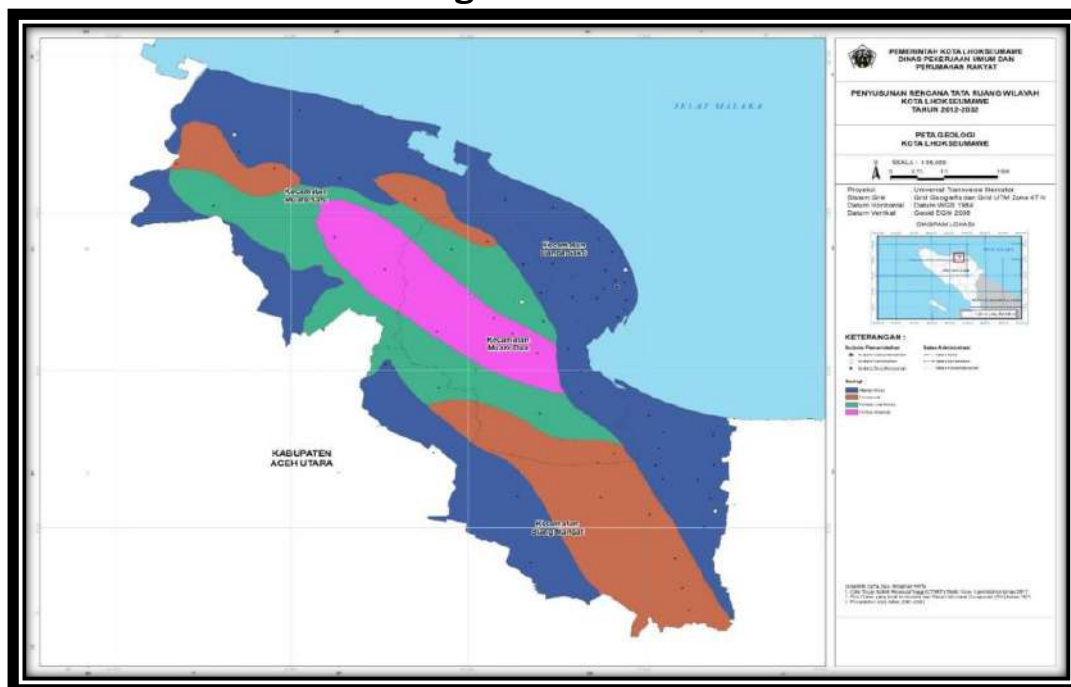


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan

Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

A. Air Tanah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara

B. Sungai

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

C. Waduk

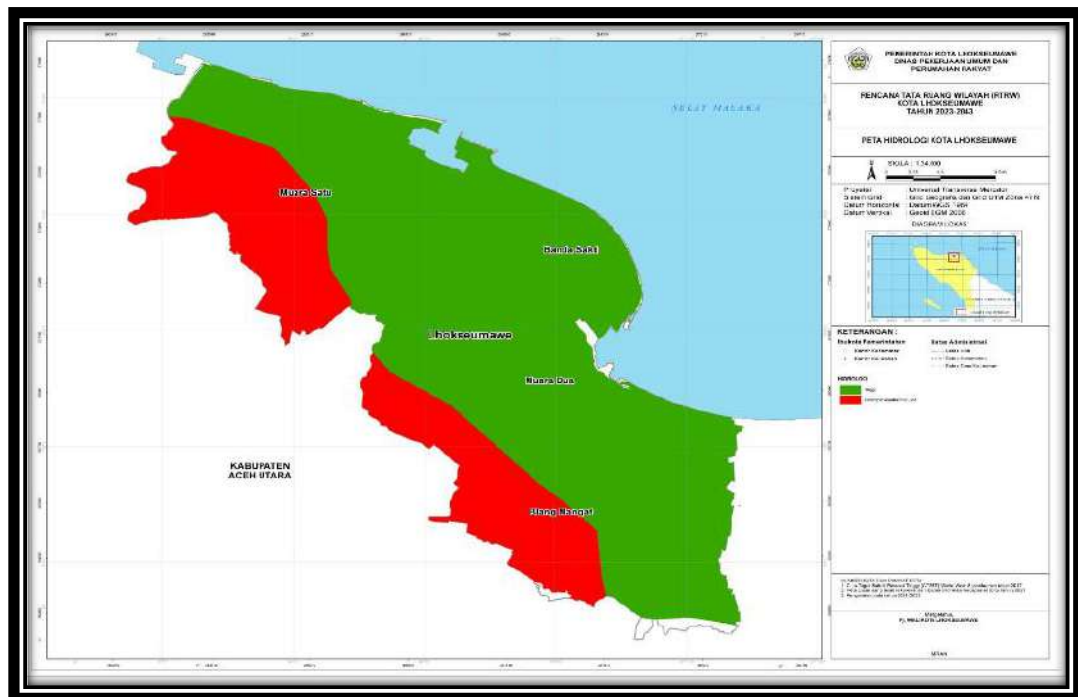
Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

D. Cekungan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air

tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireun seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.6 Klimatologi

Iklm di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu dan angin atau penguapan. Kota Lhokseumawe memiliki iklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang jelas, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kota Lhokseumawe ini cenderung konstan antara 21°–34°C dengan rata-rata suhu udara antara 25°-27°.

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Bulan	Suhu Udara (°C)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Min- Maks	Min- Maks	Rata- rata	Min- Maks	Rata- rata	Min- Maks	Rata- rata	Min- Maks	Rata- rata	
1	Januari	21.0- 32.8	21.2- 32.4	26.5	21.2- 32.4	26.5	22.8- 30.8	26.2	19.70- 32.40	26.30	
2	Februari	22.6- 31.6	21.0- 32.5	26.5	21.0- 32.5	26.5	22.8- 30.4	25.9	20.80- 31.80	26.50	
3	Maret	23.1- 32.4	21.0- 33.8	27.4	21.0- 33.8	27.4	23.2- 31.0	25.9	20.00- 33.20	27.10	
4	April	20.0- 34.2	22.5- 33.6	27.3	22.5- 33.6	27.3	23.3- 31.3	26.6	21.20- 33.80	27.90	
5	Mei	23.0- 33.4	23.2- 33.1	27.2	23.2- 33.1	27.2	23.7- 32.1	27.1	22.40- 34.20	28.20	
6	Juni	21.3- 33.5	23.1- 32.9	27.1	23.1- 32.9	27.1	23.2- 31.4	26.5	22.60- 33.80	27.90	
7	Juli	21.8- 34.3	21.4- 32.8	26.7	21.4- 32.8	26.7	23.8- 32.0	27.2	22.80- 33.60	28.00	
8	Agustus	22.0- 34.4	23.2- 33.5	27.4	23.2- 33.5	27.4	23.2- 31.9	26.8	22.60- 34.40	27.70	
9	September	22.4- 33.4	23.0- 34.6	26.8	23.0- 34.6	26.8	23.1- 31.5	26.7	22.60- 34.40	27.30	
10	Oktober	21.6- 31.8	22.6- 33.7	27.0	22.6- 33.7	27.0	23.3- 30.4	26.1	22.60- 32.50	26.80	
11	November	21.0- 32.3	22.9- 32.0	26.2	22.9- 32.0	26.2	23.2- 29.7	25.8	22.60- 33.00	26.50	
12	Desember	21.5- 33.4	21.9- 31.7	25.7	21.9- 31.7	25.7	22.6- 29.2	25.3	23.40- 32.40	26.70	

Sumber : BPS Lhokseumawe 2024

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi. Tingkat hujan yang diukur dalam satuan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. Pada tahun 2019 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan Desember dengan hari hujan terbanyak 128 hari dan pada tahun 2023 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan Oktober dengan hari hujan terbanyak mencapai 24 hari pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	26	12	20.5	3	20.5	3	129	9	171.40	16
2	Februari	42	9	48.5	3	48.5	3	296	14	52.90	11
3	Maret	41	9	34.5	3	34.5	3	61	11	35.00	9
4	April	47	9	44.5	6	44.5	6	112	9	26.60	4
5	Mei	119	18	287.5	17	287.5	17	62	7	165.70	13
6	Juni	80	13	150.5	9	150.5	9	182	11	161.90	15
7	Juli	62	11	160	7	160	7	31	4	41.90	9
8	Agustus	88	14	6.5	2	6.5	2	132	12	131.60	9
9	September	108	13	83.5	5	83.5	5	56	10	135.40	16
10	Oktober	120	23	41.5	6	41.5	6	359	17	173.30	24
11	November	109	24	151	11	150.5	11	271	15	241.70	23
12	Desember	128	18	455	17	455	17	379	22	342.70	22

Sumber : BPS Lhokseumawe 2024

Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Kandungan air pada suatu wilayah bisa memengaruhi kelembaban di udara. Semakin tinggi ketersediaan air di suatu tempat semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut. kelembaban udara Lhokseumawe minimum pada tahun 2023 berkisar 44% sampai dengan 62%. Dan kelembaban udara maksimum berkisar sampai dengan 100% dengan tekanan udara berkisar 1009 sampai 1012.

Tabel 2.4
Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
1	Januari	70-93	1010.9	73.3-86.8	1010.7	73.3-86.8	1010.7	61-98	1007.3	54-100	1011.40
2	Februari	69-93	1011.8	74.5-93.8	1011.5	74.5-93.8	1011.5	60-100	1005.9	58-100	1012.20
3	Maret	68-92	1010.8	76.0-87.3	1009.9	76.0-87.3	1009.9	65-99	1005.5	53-100	1013.90
4	April	68-91	1009.4	81.0-89.0	1010.0	81.0-89.0	1010.0	64-98	1005.8	44-100	1011.60
5	Mei	68-94	1009.8	78.8-95.0	1008.9	78.8-95.0	1008.9	50-98	1004.8	47-100	1011.90
6	Juni	67-94	1008.9	80.3-91.0	1008.9	80.3-91.0	1008.9	51-98	1005.5	52-100	1009.50
7	Juli	63-93	1009.7	70.8-90.8	1008.5	70.8-90.8	1008.5	51-98	1004.3	53-100	1009.90
8	Agustus	61-94	1009.4	77.5-90.3	1008.5	77.5-90.3	1008.5	50-99	1005.2	57-100	1011.40

No	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
9	September	73-95	1010.8	76.3-92.8	1009.2	76.3-92.8	1009.2	53-100	1005.3	53-100	1010.70
10	Oktober	77-96	1010.3	69.5-89.5	1008.6	69.5-89.5	1008.6	65-100	1006.7	61-100	1011.90
11	November	76-96	1010.2	81.3-95.8	1009.6	81.3-95.8	1009.6	67-100	1006.7	62-100	1011.00
12	Desember	74-95	1010.9	82.5-97.5	1010.0	82.5-97.5	1010.0	64-100	1006.4	56-100	1012.00

Sumber : BPS Lhokseumawe 2024

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² atau 18106 Ha dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	2861,79	15,81
2.	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3.	Industri Besar	923,76	5,1
4.	Sawah	987,13	5,45
5.	Tambak	1595,3	8,81
6.	PPI	2,77	0,02
7.	Mangrove	12,86	0,07
8.	Sungai	80,48	0,44
9.	Pendidikan	0,6	0,003
10.	Perkantoran	14,35	0,08
11.	Kebun	11452,1	63,25
12.	Waduk	57,75	0,32
13.	Danau	16,6	0,09
14.	Lapangan Golf	51,14	0,28
	Total	18106	100

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe 2024

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 meliputi :

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
 - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan;

- b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
 - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Buket Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);

- 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;
 - 11) Jl. Cut Meutia;
 - 12) Jl. Diponegoro;
 - 13) Jl. Goa Jepang;

- 14) Jl. Gudang;
- 15) Jl. Gudang Baru;
- 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
- 17) Jl. Haji Tana;
- 18) Jl. Imam;
- 19) Jl. Iskandar Muda;
- 20) Jl. Jamaika Timur;
- 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
- 22) Jl. Kenari;
- 23) Jl. Keuchik Daud;
- 24) Jl. Koperasi;
- 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
- 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
- 27) Jl. Lr. Hasan;
- 28) Jl. Lr. Kenanga;
- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglatch;
- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;

- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;
- 61) Jl. PWI I;
- 62) Jl. Rahmat;
- 63) Jl. Rumah Alue;
- 64) Jl. Samudera;
- 65) Jl. Samudera Baru;
- 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
- 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
- 68) Jl. Stasiun;
- 69) Jl. Suka Ramai;
- 70) Jl. T. Chik di Tiro;
- 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
- 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
- 73) Jl. T.U. Agam;
- 74) Jl. Teratai Putih;
- 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
- 76) Jl. Teuku Syarief;
- 77) Jl. Teuku Umar;

- 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
- 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
- 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
- 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
- 82) Jl. Ujong Pacu
- i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - j) Rencana umum (masterplan) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
 - o) Pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe -Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
 - u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
 - v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;

- w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan terminal khusus Migas V di Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe;
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.

- b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
 - 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
- c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
- d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 - 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
 - 3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;
 - c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe;

- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
 - 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
 - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;

- e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
 - f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
- a) Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
 - c) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - d) Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;
 - e) Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;
 - f) Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - g) Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - h) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
 - i) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;

- b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;

- 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
- c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
- 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
- d) Perwujudan Jaringan Drainase, meliputi:
- 1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase Tersier di Kota Lhokseumawe.
7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 di jelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya

di Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Jenis Bencana	Bahaya	
	Total Luas	Kelas
Banjir	6,784.38	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,914.45	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	136.44	Tinggi
Gempa Bumi	13,937.04	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	855.18	Tinggi
Kekeringan	13,937.04	Rendah
Longsor	231.84	Sedang
Tsunami	208.80	Sedang

Sumber : KRB Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat bahaya tinggi, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah kekeringan, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah gempa bumi, longsor, dan tsunami. Sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah 128.61 (sedang). Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

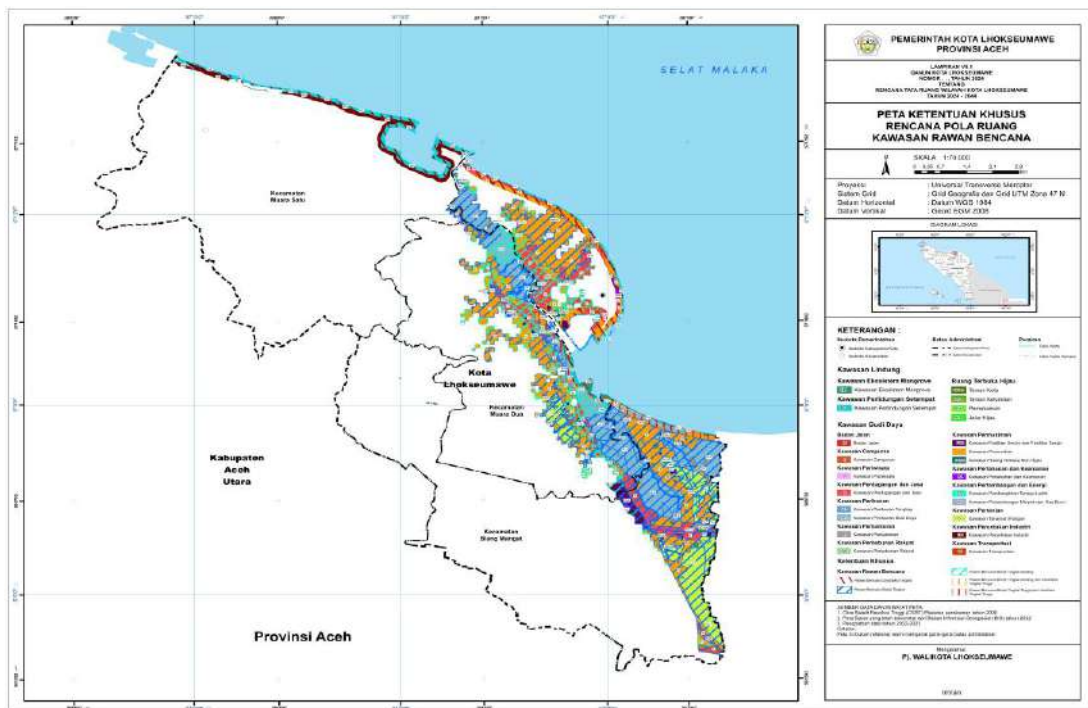
Tabel 2.7
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lhokseumawe	143.20	143.20	138.73	130.44	124.22	Sedang

Sumber : <https://inarisk.bnnpb.go.id/irbi>

Potensi bencana di Kota Lhokseumawe teridentifikasi pada 4 Kecamatan, baik bencana banjir, gelombang ekstrim dan Abrasi, serta tsunami. Sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu serta tanah longsor teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.4 Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

2.1.1.4.1 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi,

sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banda Sakti	84.705	77.802	77.985	78.256	79.850
2	Muara Dua	58.839	50.929	51.472	52.079	53.068
3	Blang Mangat	29.674	26.162	26.559	26.992	28.146
4	Muara Satu	33.984	33.820	33.925	34.069	35.003
		207.202	188.713	189.941	191.396	196.067

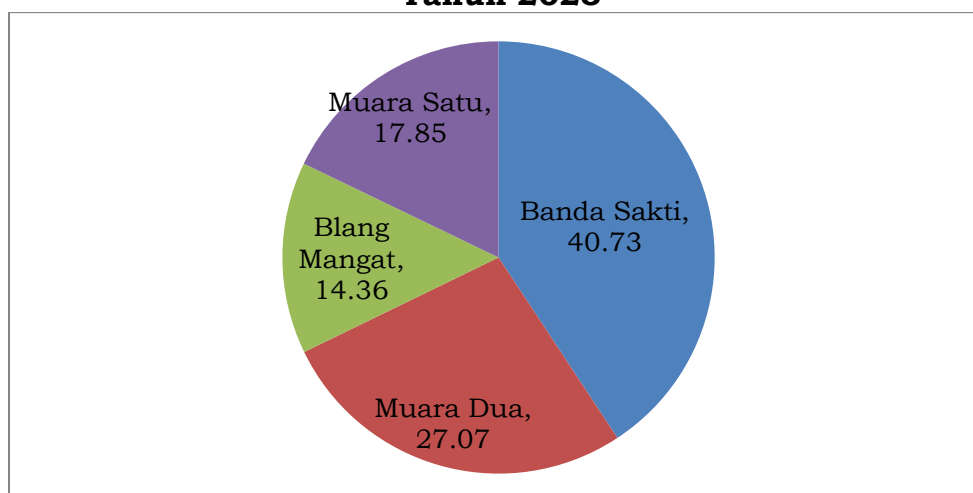
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2020 memilik kecenderungan menurun tetapi pada tahun 2021-2023 jumlah penduduk mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebanyak 191.396 jiwa menjadi 196.067 jiwa di tahun 2023. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2023 disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah dating penduduk.

2.1.1.4.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti dari tahun ke tahun merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 79.850 Jiwa pada tahun 2023. Kebalikan dengan Kecamatan Blang Mangat selain menjadi wilayah terbesar ke dua di Kota Lhokseumawe juga merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 28.146 jiwa pada tahun 2023.

Gambar 2.6
Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2023, Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 7.104 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terlenggang adalah Kecamatan Blang Mangat dengan angka kepadatan sebesar 502 Jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe di Tahun 2023 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 1.083 jiwa/km², hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk.

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banda Sakti	7.536	6.922	6.938	6.962	7.104
2	Muara Dua	1.018	881	891	901	918
3	Blang Mangat	529	406	473	481	502
4	Muara Satu	608	605	607	609	626
Lhokseumawe		1.144	1.042	1.161	1.057	1.083

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

2.1.1.4.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk

memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.93	1.45	1.42	0.77	1.66

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2019-2023 menunjukkan angka dengan kecenderungan menurun. Pada 2019 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 1.93% kemudian terus menurun hingga tahun 2023 dengan laju pertumbuhan menjadi 1.66%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun karena pada tahun tersebut dilaksanakan sensus penduduk oleh BPS Kota Lhokseumawe, selain itu adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Lhokseumawe karena kematian penduduk akibat covid-19. Kemudian, pada tahun 2022 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,77%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2022. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori $r > 0$ menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel 2.11
Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelahiran	jiwa	5.352	2.982	4321	4.083	3.533
2	Kematian	jiwa	650*	994*	979*	867**	1.154*
3	Kedatangan	jiwa	4.162	4.148	4.518	3.552	5.563
4	Perpindahan	jiwa	5.930	6.717	7.857	4.525	6.395

Sumber : BPS dan Disducapil Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 jumlah kelahiran sebanyak 3.533 jiwa. Selanjutnya jumlah kematian sebanyak 1.154 jiwa. Kemudian jumlah pendatang sebanyak 5.563 Jiwa serta jumlah yang pindah sebanyak 6.395 Jiwa.

2.1.1.4.4 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2019	103.333	103.869	207.202	99
2	2020	93.676	95.037	188.713	99
3	2021	94.303	95.638	189.941	99
4	2022	95.042	96.354	191.396	99
5	2023	97.339	98.728	196.067	98.59

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2024

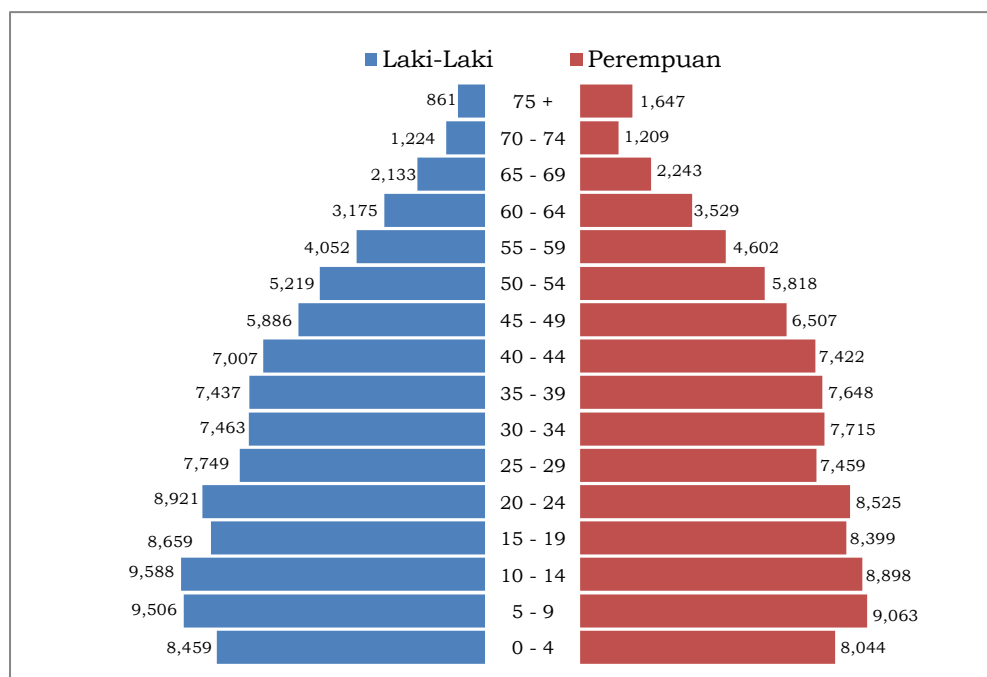
Secara umum dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, besaran nilai sex ratio di Kota Lhokseumawe menunjukkan angka tetap 99. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang kenaikannya, sehingga mempengaruhi sex rasionya. Pada tahun 2023, angka sex ratio menunjukkan angka 98.59, artinya setiap 100 penduduk perempuan

terdapat 98 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

2.1.1.4.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Lhokseumawe memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah total sebesar 18.569 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 5-9 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 9.506 jiwa dan perempuan sebanyak 9.063 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 2.433 jiwa.

Gambar 2.7
Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Kota Lhokseumawe 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting

untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, nilai PDRB yang terbesar 2.561.300 juta rupiah atau sebesar 22.93% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 2.024.000 juta rupiah atau 18.12% di tahun 2023. Selanjutnya, pada posisi ketiga adalah sektor konstruksi

menghasilkan PDRB sebesar 13.31% atau 1.487.200 juta rupiah dari total PDRB. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.13
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020r	2021*	2022**	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	833,994.5	895,154.5	922,451.3	965,874.2	1,025,598.0
B	Pertambangan dan Penggalian	32,948.8	34,647.6	36,957.5	40,065.6	41,754.4
C	Industri Pengolahan	1,671,237.2	1,672,124.6	1,793,400.5	2,002,471.4	2,023,961.6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,313.4	15,557.6	15,753.9	16,169.9	17,544.0
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,386.4	1,438.3	1,481.4	1,627.8	1,745.5
F	Konstruksi	1,306,489.8	1,375,488.6	1,364,872.5	1,454,765.8	1,487,217.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,949,923.8	1,889,921.5	2,013,276.4	2,184,656.3	2,561,330.4
H	Transportasi dan Pergudangan	926,852.3	726,190.8	902,547.1	1,022,517.0	1,267,330.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,376.1	167,578.1	168,466.8	225,635.0	256,396.8
J	Informasi dan Komunikasi	279,509.3	313,008.4	333,007.8	366,897.7	402,754.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	265,463.1	269,367.5	272,137.9	280,387.5	254,387.7
L	Real Estat	416,927.6	431,928.7	452,445.2	475,763.5	508,542.1
M,N	Jasa Perusahaan	89,591.5	90,592.4	94,894.3	112,782.7	116,063.5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	387,562.5	404,463.6	441,252.7	434,765.4	476,478.0
P	Jasa Pendidikan	135,477.1	147,476.1	148,982.3	154,734.5	164,979.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	291,551.9	309,552.8	338,571.7	389,765.8	400,412.4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	117,774.3	122,775.4	127,786.6	144,745.3	163,135.1
PDRB MIGAS		8,898,379.6	8,867,266.5	9,431,385.9	10,277,625.4	11,169,632.1
PDRB NON MIGAS		7,417,143.2	7,386,928.9	7,890,150.1	8,567,858.1	9,457,579.4

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2023. Pada Tahun 2019 mencapai 7,112,684.8 juta rupiah dan pada Tahun 2023 mencapai sebesar 7,861.800 juta rupiah. Nilai PDRB 2023 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 749.115,20 juta rupiah atau sebesar 10.53% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020r	2021*	2022**	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	599,904.7	622,995.8	612,746.7	602,948.8	608,700
B	Pertambangan dan Penggalian	27,489.5	28,186.2	30,187.3	30,287.3	31.400
C	Industri Pengolahan	1,315,377.0	1,330,546.4	1,331,428.6	1,368,986.0	1.387.500
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,156.5	14,559.0	14,515.0	14,836.1	15,800
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah dan daur ulang	867.6	894.5	915.2	1,002.2	1.100
F	Konstruksi	1,005,316.5	1,046,313.7	1,027,310.5	1,034,763.4	1.034.400
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,584,878.4	1,523,878.7	1,587,445.5	1,681,277.9	1.840.000
H	Transportasi dan Pergudangan	882,442.3	685,600.3	847,757.7	888,178.7	951.100
I	Penyediaan Makan Minum	114,294.1	106,394.1	105,493.3	136,910.3	150.400
J	Informasi dan Komunikasi	267,300.0	300,298.9	321,273.7	353,546.4	381.600
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,770.9	177,058.9	170,306.0	163,188.5	145.882.8
L	Real Estate	330,544.10	342,345.30	355,052.50	372,743.50	355,052.5
M,N	Jasa Perusahaan	72,127.60	72,728.70	80,328.50	80,134.50	80,328.5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	292,517.30	307,619.20	306,976.70	320,743.50	306,976.7
P	Jasa Pendidikan	99,767.60	101,178.70	104,154.50	109,056.60	104,154.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256,503.60	280,925.50	310,034.70	310,956.30	310,034.7
R,S,T U	Jasa lainnya	96,526.70	98,727.80	111,265.50	119,524.40	111,265.5
PDRB MIGAS		6,984,713.30	7,252,904.80	7,543,739.10	7,861,007.80	7,543,739.1
PDRB NON MIGAS		5,794,141.20	6,069,121.60	6,330,756.60	6,635,158.40	6,330,756.6

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2023, nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor adalah yang terbesar dibandingkan dengan

sektor lainnya, yaitu mencapai 1.840.000 juta rupiah atau sebesar 23.40% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 17.65% atau 1.387.500 juta rupiah di tahun 2023. Selanjutnya, sektor konstruksi menghasilkan PDRB sebesar 1.034.400 juta rupiah atau 13.16% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) kontribusi Kota Lhokseumawe terhadap PDRB ADHK Propinsi Aceh mencapai pada angka 5.35%.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2019-2023), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 diperlihatkan oleh gambar berikut:

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.66	3.85	-1.65	-1.60	0.96
B	Pertambangan dan Penggalian	3.37	2.53	7.1	0.33	3.79
C	Industri Pengolahan	2.05	1.15	0.07	2.82	1.35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.31	2.84	-0.30	2.21	6.45
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18.25	3.1	2.32	9.51	6.33
F	Konstruksi	5.94	4.08	-1.82	0.73	-0.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.51	-3.85	4.17	5.91	9.44

No	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	1.88	-22.31	23.65	4.77	7.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	10.61	-6.91	-0.85	29.78	9.82
J	Informasi dan Komunikasi	3.30	12.35	6.98	10.05	7.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.34	0.73	-3.81	-4.18	-10.60
L	Real Estat	6.43	2.80	3.57	3.71	4.98
M,N	Jasa Perusahaan	5.01	0.28	0.83	10.45	-0.24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.18	-0.17	5.16	-0.21	4.48
P	Jasa Pendidikan	7.55	3.53	1.41	2.94	4.71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	7.17	3.63	9.52	10.36	0.30
R,S,T, ,U	Jasa Lainnya	8.88	2.12	2.28	12.70	7.42
PDRB Migas		3.98	-1.80	3.84	4.01	4.21
PDRB Tanpa Migas		4.38	-2.40	4.75	4.31	4.81

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Pada tahun 2019 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 18.25% sedangkan paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar 1.88%. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan yaitu sebesar 29.78% sedangkan yang paling kecil adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar -4.18%.

Kemudian pada tahun 2023 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan sebesar 9.82%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan -10.60%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2023 hampir semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Distribusi Persentase PDRB

Pada kurun waktu 2019-2023, dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB tetap pada urutan pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor. Pada posisi kedua penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe adalah Industri pengolahan dan disusul oleh sektor konstruksi di posisi ketiga.

Dilihat dari PDRB ADHB, terjadi kecenderungan penurunan di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor walaupun berada pada urutan pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2019 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.91% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 21.28%. Namun untuk sektor Industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 18.78% dan mengalami kenaikan menjadi 19,45 pada tahun 2022. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha / Industry	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,	9.37	10.10	9.80	9.40	9.18
B	Pertambangan dan Penggalan	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37
C	Industri Pengolahan	18.78	18.86	19.02	19.48	18.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	14.68	15.51	14.47	14.15	13.31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.91	21.31	21.35	21.26	22.93
H	Transportasi dan Pergudangan	10.42	8.19	9.57	9.95	11.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.98	1.89	1.79	2.20	2.30
J	Informasi dan Komunikasi	3.14	3.53	3.53	3.57	3.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	3.04	2.89	2.73	2.28
L	Real Estat	4.69	4.87	4.80	4.63	4.55
M,N	Jasa Perusahaan	1.01	1.02	1.01	1.10	1.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.36	4.56	4.69	4.27	4.27
P	Jasa Pendidikan	1.52	1.66	1.58	1.51	1.48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.28	3.49	3.59	3.79	3.58
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1.32	1.38	1.36	1.41	1.46
PDRB Migas		100	100	100	100	100
PDRB tanpa Migas		83.35	83.31	83.64	83.34	84.67

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

4. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju Inflasi Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Secara umum inflasi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 fluktuatif. Inflasi tertinggi Kota Lhokseumawe adalah tahun 2022 yaitu sebesar 5.37% dan inflasi pada tahun 2019 adalah terendah yaitu sebesar 1.20%. Mulai Tahun 2020, perhitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Lhokseumawe menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut.

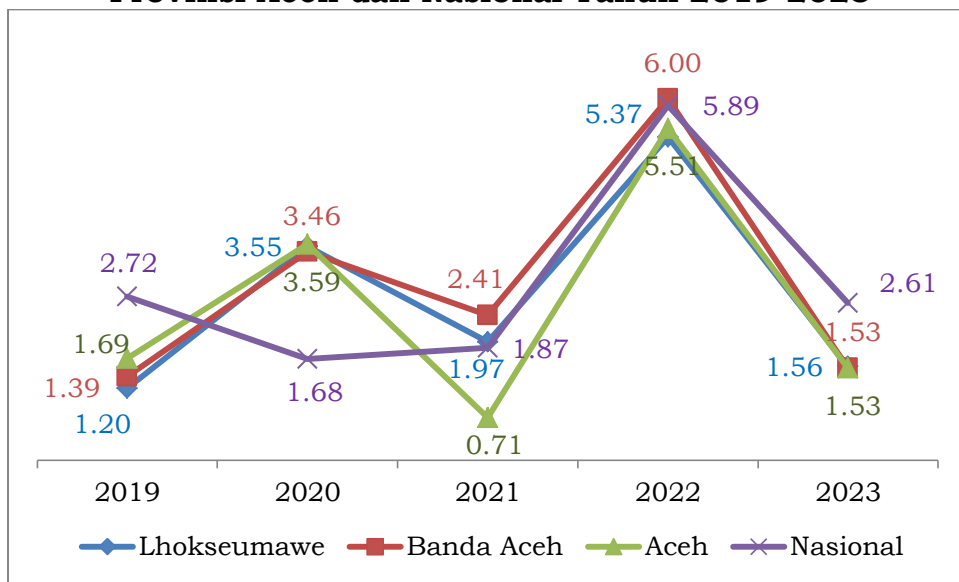
Tabel 2.17
Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2020-2023

No	Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	8.01	3.36	5.13	1.34
2	Pakaian Dan Alas Kaki	2.72	2.94	5.12	4.20
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	0.73	1.48	2.84	0.47
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.24	1.35	5.52	-0.71
5	Kesehatan	0.66	1.22	0.33	1.81
6	Transportasi	0.05	0.38	20.65	1.86
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-1.21	0.25	-0.59	0.28
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	2.02	0.25	7.49	8.93
9	Pendidikan	5.82	1.44	1.13	0.52
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	-0.04	0.05	3.76	1.59
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	4.67	1.63	3.47	2.45
	Inflasi Kota Lhokseumawe	3.55	1.97	5.37	1.56

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebesar 1.20% lebih rendah dibandingkan inflasi Aceh yaitu sebesar 1.69% dan inflasi nasional sebesar 2.72%. Kemudian pada tahun 2020 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 3.55% lebih rendah dibandingkan inflasi Aceh yaitu 3.59% namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yaitu sebesar 1.68%. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 8.01% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan yaitu sebesar -1.21%.

Gambar 2.8
Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

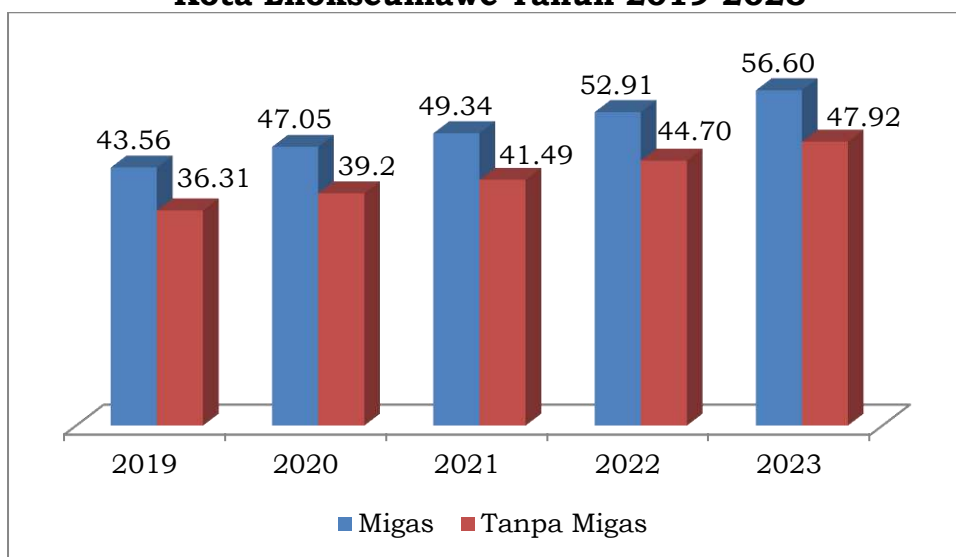
Selanjutnya pada tahun 2023 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 1.56% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 1.53% namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yaitu sebesar 2.61%. Penyumbang inflasi terbesar adalah Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya yaitu sebesar 8.93% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yaitu sebesar -0.71%.

5. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 2.9
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

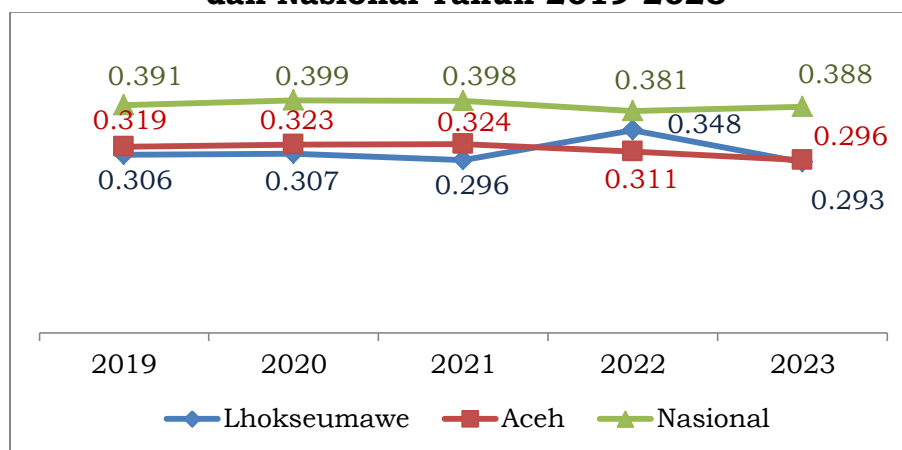
PDRB per kapita Kota Lhokseumawe kurun waktu 2019-2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita sebesar 43.56 juta rupiah dan pada tahun 2022 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 53.63 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Lhokseumawe tahun 2022 meningkat sebesar 4.02 juta rupiah dari tahun 2021.

6. Indeks Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya

semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Gambar 2.10
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Rasio Gini Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat termasuk dalam kondisi ketimpangan sedang/moderat (koefisien gini berkisar antara 0.31-0.40). Besaran Rasio Gini Kota Lhokseumawe lebih rendah dari rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di Kota Lhokseumawe yang lebih merata dibandingkan Aceh dan Nasional. Gini Rasio Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebesar 0.306 turun menjadi 0.296 pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0.348 dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0.296.

7. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sebagai berikut.

Tabel 2.18
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Lhokseumawe						
Garis Kemiskinan	Rupiah	376.832	401.158	427.045	460.583	498.431
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	23,05	22,69	23,38	23,03	23,10
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	11,18	10,80	11,16	10,84	10,73
Aceh						
Garis Kemiskinan	Rupiah	486.935	522.126	541.109	579.227	627.534
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	819,44	814,91	834,24	806,62	806,75
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	15.32	14.99	15.33	14.64	14.45

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 23,05 ribu jiwa dan menurun di tahun 2020 menjadi 22,69 ribu jiwa atau setara 10.80% dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 23.38 ribu jiwa di tahun 2021. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dan adanya pandemic Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 23,10 ribu jiwa atau setara 10.73%.

Dibandingkan dengan Aceh, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe relatif lebih kecil. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Aceh 15.32% kemudian turun menjadi 14.99% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali meningkat

menjadi 15.33% sebagai dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 14.45%.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks kedalaman kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami peningkatan cukup drastik pada tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019-2023 fluktuatif namun pada tahun 2021 dan 2023 mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

Tabel 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	1.51	0.30
2020	1.56	0.29
2021	1.87	0.54
2022	1.33	0.26
2023	2.23	0.70

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan

yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

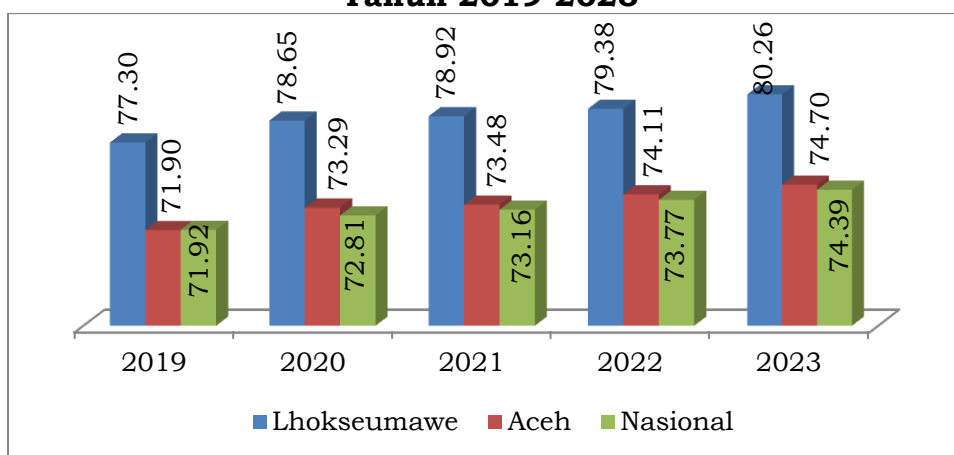
Tabel 2.20
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Metode Baru)	Tahun	71,27	74,34	74,38	74,59	74,76
Harapan Sekolah Lama	Tahun	15,19	15,20	15,21	15,27	15,54
Rata-rata Sekolah Lama	Tahun	10,90	10,91	11,11	11,12	11,27
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp.	11.421	11.367	11.390	11.701	12.125
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)		77,30	78,65	78,92	79,38	80,26

Sumber : BPS, 2024

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe sebesar 77.30, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 80,26 pada tahun 2023. Perbandingan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional dapat di lihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.11
Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

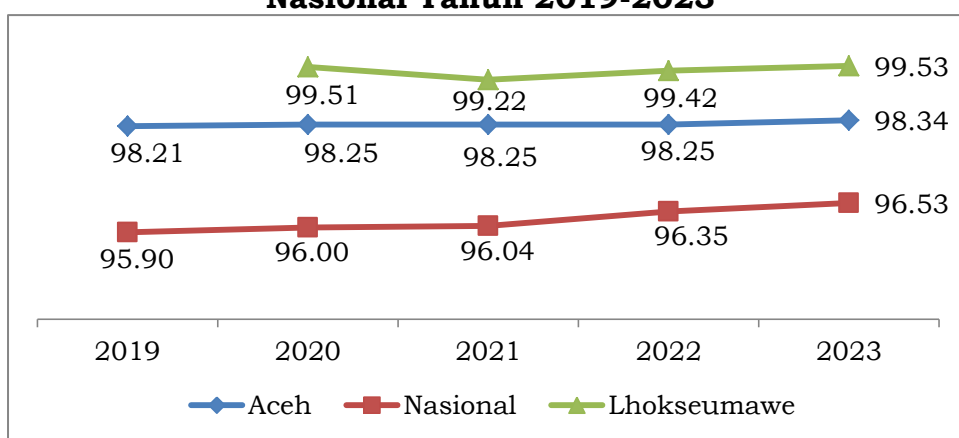
Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, nilai IPM Kota Lhokseumawe jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Aceh dan nilai IPM Nasional. IPM Kota Lhokseumawe menduduki

peringkat ke tiga di Aceh. Nilai IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 80,26. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Lhokseumawe ini termasuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

b. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah grafik angka melek huruf di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Gambar 2.12
Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

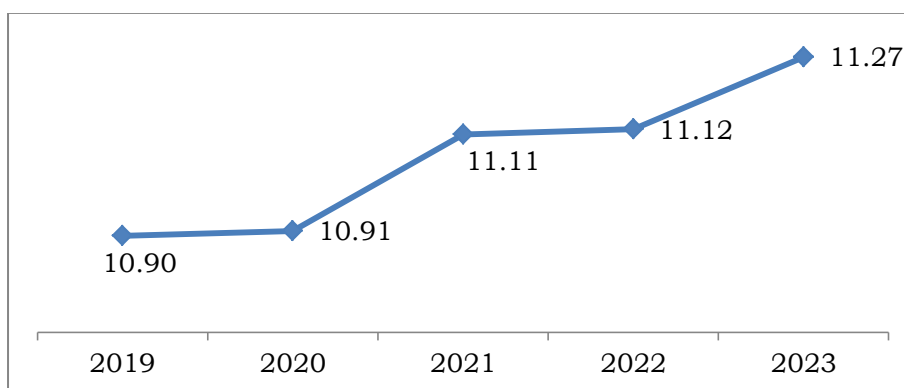
Secara umum persentase angka melek huruf di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka melek huruf di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 99.51% kemudian angka tersebut meningkat menjadi sebesar 99.53% pada tahun 2023. Pada

tahun 2021 angka melek huruf sempat menurun menjadi sebesar 99.22%. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar sebagian kecil penduduk Kota Lhokseumawe (0,47%) yang masih belum melek huruf. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kota Lhokseumawe semakin meningkat. Dan angka melek huruf Kota Lhokseumawe lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angka melek huruf Aceh dan nasional.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.

Gambar 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

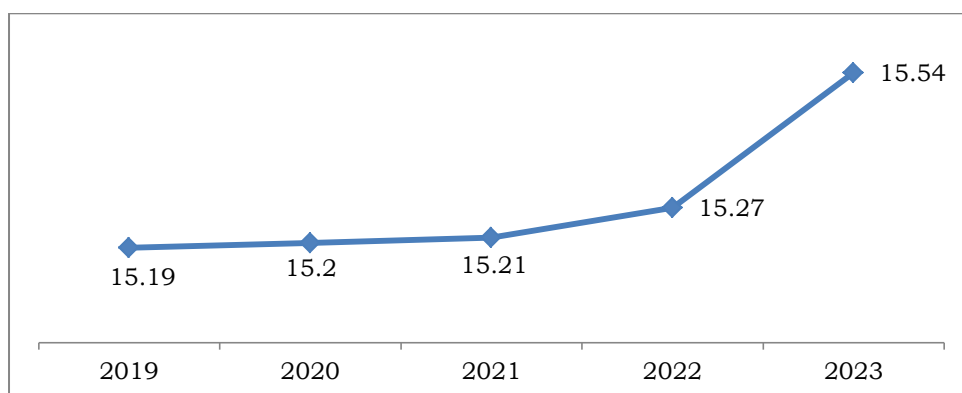
Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah sebesar 10.90 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,27 tahun pada tahun 2023. Angka

tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Lhokseumawe semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.14
Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



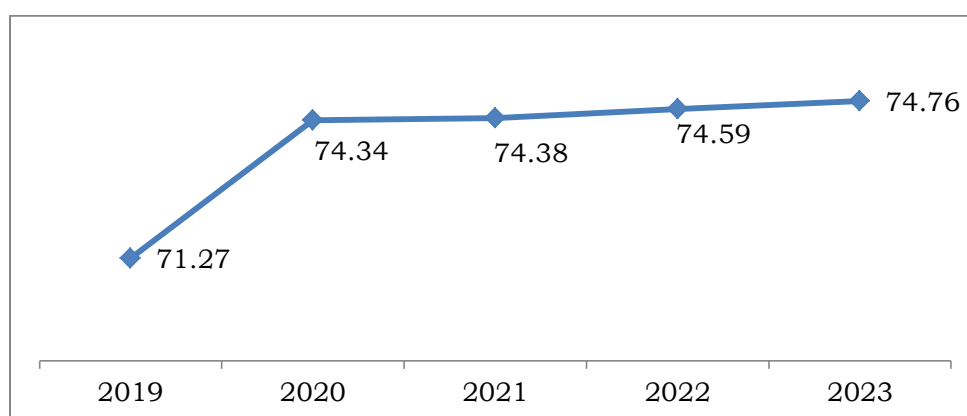
Sumber : BPS, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 angka Harapan Lama Sekolah sebesar 15.19 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 15.54 tahun.

e. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.15
Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2019 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 71.27 tahun dan terus meningkat menjadi 74,76 tahun pada 2023. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Lhokseumawe cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin

dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2019–2023 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

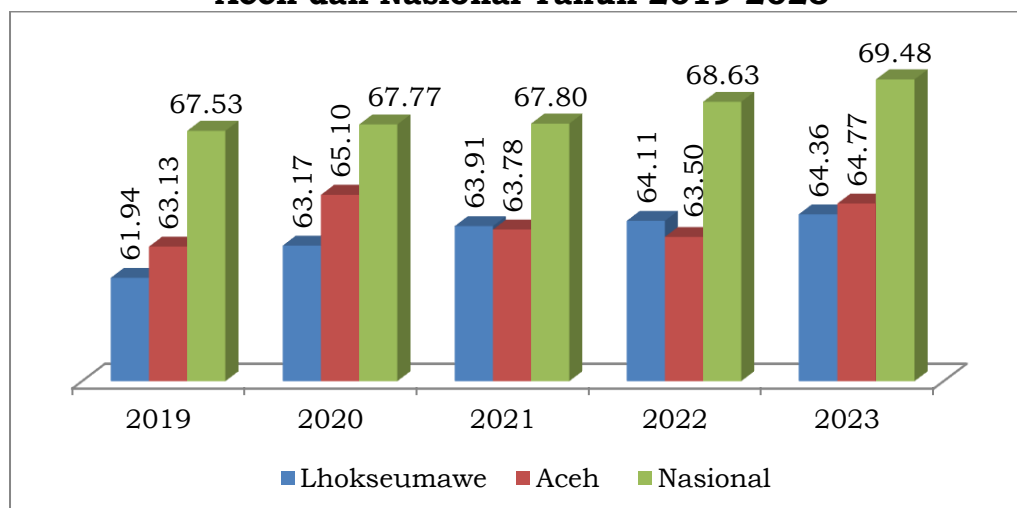
Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2019	78.06	46.18	61.94
2020	79.61	47.10	63.17
2021	80.02	48.15	63.91
2022	80.26	48.33	64.11
2023	77.64	51.50	64.36

Sumber : BPS, 2024

Selama periode Agustus 2019-2023 menurut BPS Kota Lhokseumawe, TPAK mengalami peningkatan. Pada Agustus 2019 TPAK Kota Lhokseumawe sebesar 61.94%. Tahun 2023 TPAK mengalami kenaikan sebesar 2.42 poin menjadi 64.36%. Nilai TPAK sebesar 64.36% mengandung arti ada sekitar 64 penduduk kategori angkatan kerja diantara 100 penduduk usia kerja. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini bisa dijelaskan karena pada umumnya laki-laki sebagai penanggung nafkah utama yang aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa.

Gambar 2.16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan data di atas menurut BPS Kota Lhokseumawe pada periode 2019-2020 bila dicermati TPAK Kota Lhokseumawe lebih rendah dibandingkan TPAK Aceh dan nasional. Pada tahun 2021-2022 TPAK Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh namun, tetap lebih rendah dari nasional. Namun pada tahun 2023 TPAK Lhokseumawe kembali lebih rendah dari Aceh dan Nasional. Rendahnya TPAK Kota Lhokseumawe disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

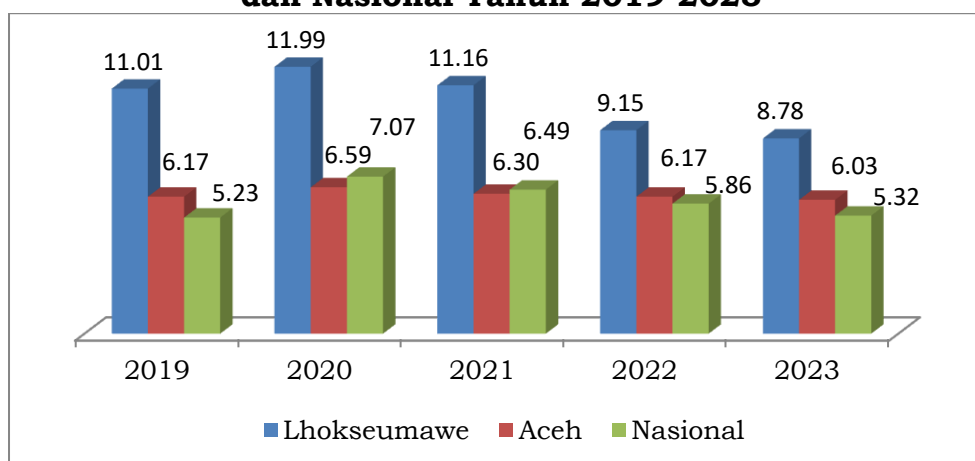
No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	9,881	11,262	10,804	9,059	8.221
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	89,311	93,958	96,835	98,953	93.594
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.01	11.99	11.16	9.15	8.78

Sumber : BPS, 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.01%

kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.78% pada tahun 2023. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Gambar 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Pada periode Tahun 2019-2023, TPT Kota Lhokseumawe selalu di atas rata-rata TPT Aceh dan TPT nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kota Lhokseumawe jauh diatas TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional. Pada tahun 2019 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 11.01 mengalami kenaikan, menjadi 11.99 persen di tahun 2020. Kenaikan TPT ini juga terjadi baik pada tingkat Aceh maupun tingkat Nasional sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Namun demikian pada Tahun 2023, TPT Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 8.78 persen, penurunan TPT ini tetapi masih menempatkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Aceh.

h. Rasio Penduduk yang Berkerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	79.430	82.696	86.030	89.894	85.373
2	Angkatan Kerja	Jiwa	89,311	93,958	96,835	98,953	93.594
3	Rasio penduduk yang Bekerja		0.89	0.88	0.89	0.91	0.91

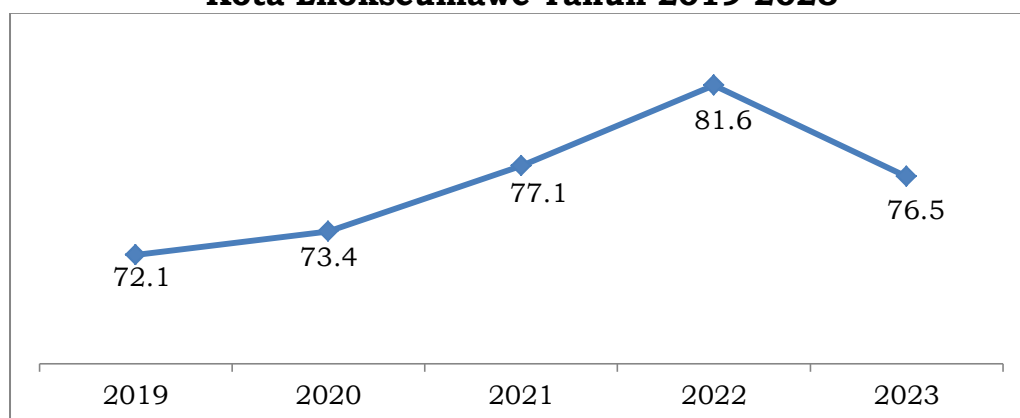
Sumber : BPS, 2024

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 mencapai angka 0.89 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0.91 pada tahun 2023. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Lhokseumawe tergolong baik.

i. Pola Pangan Harapan

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

Gambar 2.18
Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



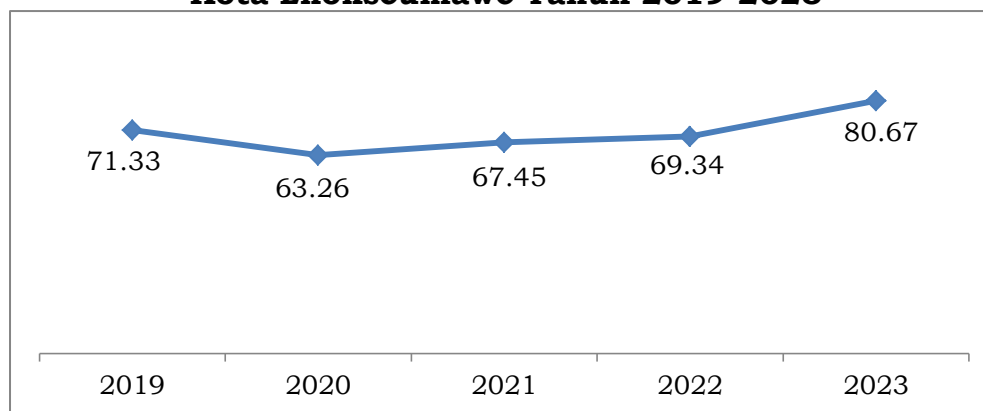
Sumber : DKP3 Lhokseumawe, 2024

Pada kurun tahun 2019-2023, skor pola pangan harapan Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan. Skor pola pangan harapan pada tahun 2019 sebesar 72.1 kemudian meningkat menjadi 81.6 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 Skor pola pangan harapan konsumsi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 76.5.

j. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar 2.19
Indeks Ketahanan Pangan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



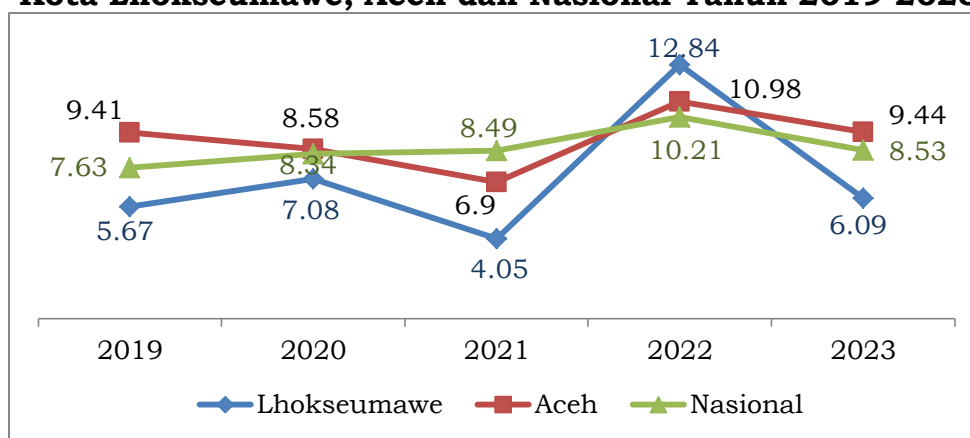
Sumber : DKPPP Lhokseumawe, 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 80.67, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019-2022, dan menjadi Indeks Ketahanan Pangan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Meningkatnya Angka Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe dikarenakan aspek ketersediaan yaitu meningkatnya produksi komoditas khususnya padi.

k. Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada gambar berikut dapat dilihat prevelinsi ketidacukupan konsumsi pangan kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional tahun 2019-2023

Gambar 2.20
Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Nasional, 2024

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebesar 5.67 persen berada dibawah Aceh sebesar 9.41 dan Nasional sebesar 7.63 dan pada tahun 2023 Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 6.09 persen dan masih di bawah Aceh yang sebesar 9.44 persen dan Nasional sebesar 9.44 persen.

l. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu 2019-2023, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019,

kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9.37% per tahun dan meningkat hingga 10.10% pada tahun 2020. Kemudian angka tersebut terus menurun hingga 9.18% pada tahun 2023. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Lhokseumawe kepada sektor-sektor tersier.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	833.994.5	895.154.5	922.451.3	965.874.2	1.025.598.0
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.898.379,7	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.417.143,2	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		9.37	10.10	9.80	9.40	9.18
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		11.24	12.12	11.70	11.27	10.84

Sumber: PDRB 2018-2022, Lhokseumawe Dalam Angka, 2024

m. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian. Pada kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2019 sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 21.91%, lalu menurun menjadi 21.31% di tahun 2020. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan meningkat kembali menjadi 22.93% di tahun 2023. Sektor perdagangan berada pada posisi pertama dalam penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.25
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sektor Perdagangan	1.949.923,8	1.889.921,5	2.013.276,4	2.184.656,3	2.561.330,4
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.898.379,7	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.417.143,2	7.386.928,9	7.890.150,1	8.567.858,1	9.457.579,4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		21.91	21.31	21.35	21.26	22.93
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		26.29	25.58	25.52	25.49	27.08

Sumber: PDRB 2018-2022, Lhokseumawe Dalam Angka, 2024

n. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Pada kurun waktu 2019-2023 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 18.78%, lalu meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 19.48% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 18.12%.

Tabel 2.26
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sektor Industri	1,671,237.2	1,672,124.6	1.793.400.5	2.002.471.4	2.023.961.6
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.898.379,7	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.417.143,2	7.386.928,9	7.890.150,1	8.567.858,1	9.457.579,4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		18.78	18.86	19.02	19.48	18.12
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		22.53	22.64	22.73	23.37	21.40

Sumber : PDRB Lhokseumawe 2018-2022, LDA 2024

o. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB

Pada kurun waktu 2019-2023 Kontribusi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perkonomian Kota

Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan negatif, Pada tahun 2019 kontribusi sektor akomodasi penyediaan makan dan minum terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 1.98%, lalu menurun di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 2.30% di tahun 2023

Tabel 2.27
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sektor Industri	176.376,10	167.578,10	168.466,80	225.635,00	256.396,8
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.898.379,7	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.417.143,2	7.386.928,9	7.890.150,1	8.567.858,1	9.457.579,4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		1.98	1.89	1.79	2.20	2.30
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		2.38	2.27	2.14	2.63	2.71

Sumber : PDRB Lhokseumawe 2018-2022, LDA 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

Warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Warisan budaya benda seperti situs Kurok-kurok, Gua Jepang, makam kuno, naskah/benda kuno dan cagar budaya lainnya yang seluruhnya berjumlah 22 cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Kota Lhokseumawe telah memiliki

warisan budaya tak benda yaitu Canang Ceurekeh serta kesenian tradisional khas Lhokseumawe yaitu Rapai Uroh Duek. Selain itu kesenian Aceh seperti rapai, seurene kale, seudati, saman, ranup lampuan, syair, dalil khairat menjadi kekayaan budaya tak benda yang terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian.

Peninggalan budaya dapat dibuktikan dengan ditemukannya cagar budaya di Kota Lhokseumawe. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruék Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa situs atau cagar budaya Kota Lhokseumawe terbanyak berada di kecamatan Banda Sakti yaitu 9 situs terdiri dari 6 makam, 1 Tugu, dan 1 kurok-

kurok (benteng), Sedangkan situs atau cagar budaya paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Dua yaitu 1 Tugu dan 1 Rumah Adat Ulee Balang. Dari 22 situs atau cagar budaya di Kota Lhokseumawe, belum ada satupun yang terlegalisasi.

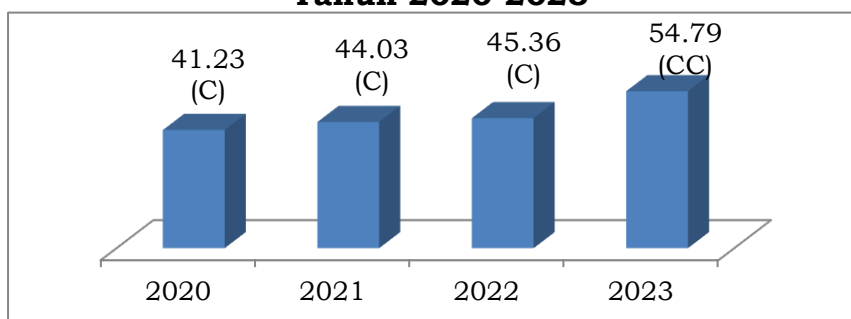
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, telah melaksanakan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi yang telah diterbitkan belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi dengan poin 54.79.

Gambar 2.21
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2023

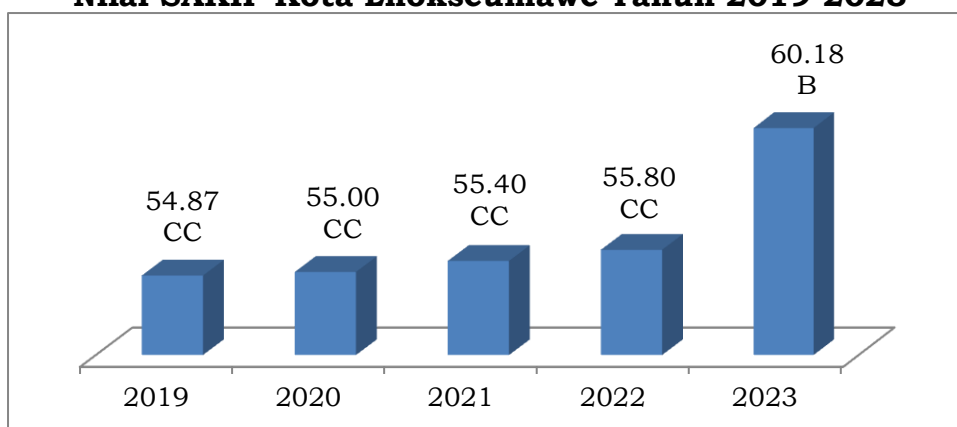


Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 nilai SAKIP Kota Lhokseumawe sebesar 54.87 (kategori CC) sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 60.18 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe periode 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22
Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2024

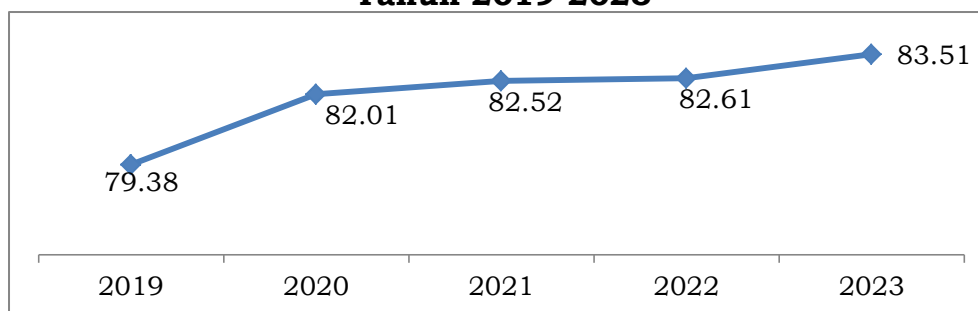
b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia

berdasarkan 6 (enam) Aspek Kebijakan Pelayanan yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebesar 3.33 dengan kategori (B-) dengan Lokus penilaian pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2023 Nilai IPP Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 1.87 dengan kategori (D) dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial dan Kecamatan Blang Mangat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Penilaian didapatkan melalui survei yang dilakukan pada 34 Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.23
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2024

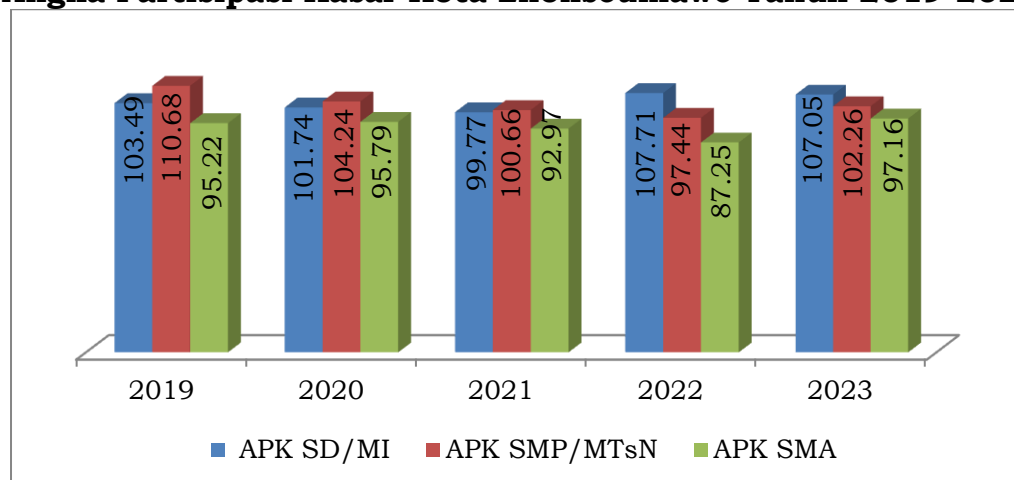
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Gambar 2.24
Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

Apabila melihat gambar di atas, nilai perentase APK dari jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTsN memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Lhokseumawe yang bersekolah di Kota Lhokseumawe. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan dan tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota

Lhokseumawe dan mutu sekolah yang baik di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi pilihan masyarakat dari daerah lain.

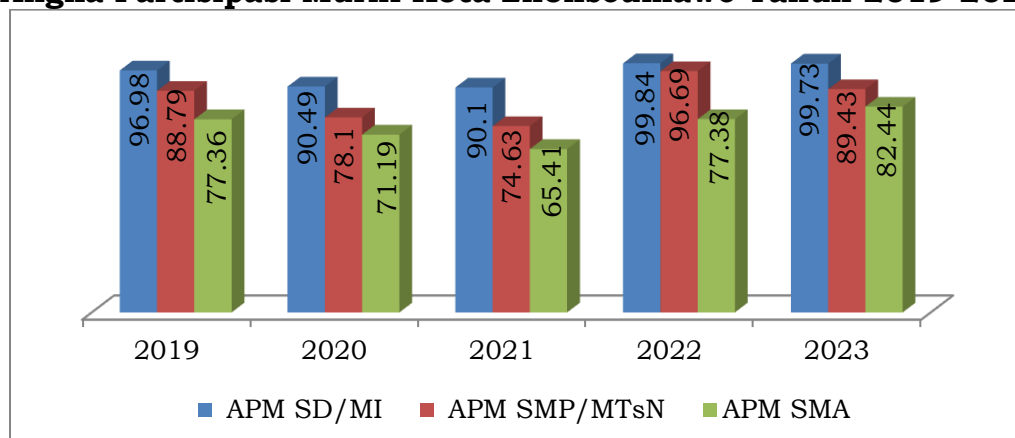
Pada kurun waktu 2019-2022 angka APK pada jenjang SMP/MTsN cenderung menurun. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar system zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA pada kurun waktu 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 95.79 persen di tahun 2020 menjadi 87.25 persen di tahun 2022. Selanjutnya di Tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan menjadi 97.16 persen. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA di Kota Lhokseumawe.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Gambar 2.25
Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

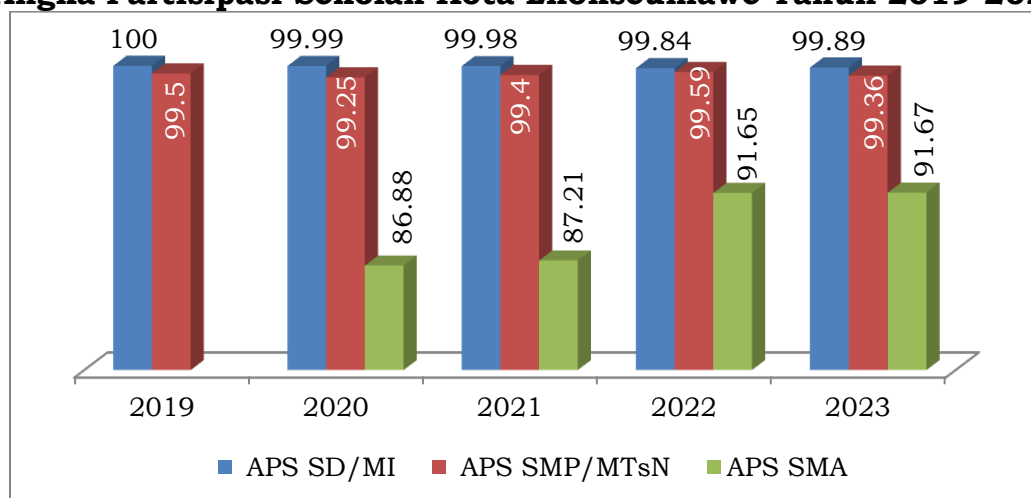
Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 APM SD/MI sebesar 96.98 persen dan tahun 2021 menjadi sebesar 90.1 persen. Angka tersebut berfluktuasi menjadi 99.73 persen tahun 2022. Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTsN dalam kurun waktu 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 APM SMP/MTsN sebesar 96.98 persen menurun hingga 90.10 pada tahun 2021. Namun tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 99.84 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 99.73 persen.

Pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2019-2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022-2023 terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan sekolah di Lhokseumawe menjadi rujukan masyarakat.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.26
Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan gambar diatas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2019 APS SD/MI sebesar 100% kemudian pada tahun 2020-2022 terjadi penurunan APS menjadi 99.84% di tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 99.89% di tahun 2023. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 APS SMP/MTS 99.5% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 99.25% tahun 2020, pada tahun 2021-2022 sedikit meningkat sehingga menjadi 99.59% kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 99.36%.

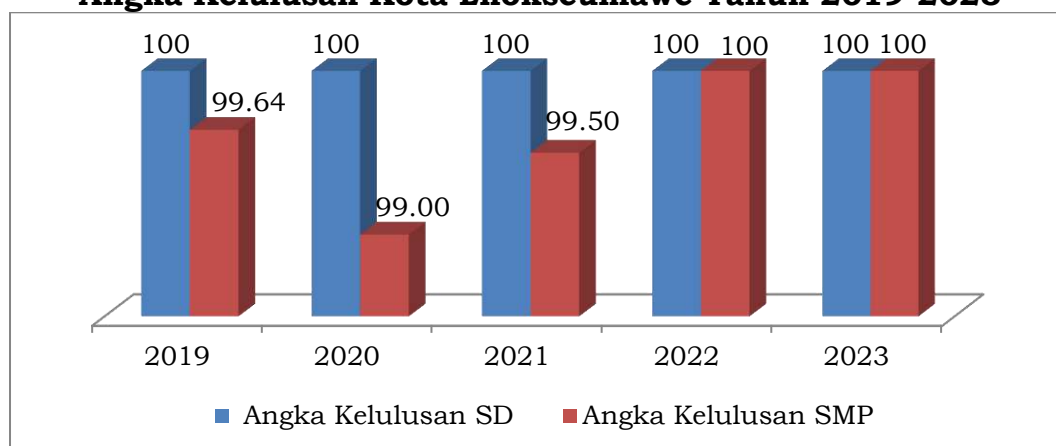
Adapun APS pada jenjang SMA dalm kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APS SMA sebesar 86.88% dan menjadi 91.67% pada tahun 2023. APS SMA mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 tahun jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah.

D. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut

merupakan data angka kelulusan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Gambar 2.27
Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan jenjang SD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMP tahun 2019-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 Angka kelulusan SMP sebesar 99.64% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 99.00% pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 99.50% di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022-203 angka kelulusan jenjang SMP mencapai 100%.

E. Fasilitas Pendidikan

Pelaksanaan Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.29
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total		
2019	SD	100	443	108	26	0	677	14.77
	SMP	3	12	4	0	0	19	15.79
2020	SD	468	327	0	0	0	795	58.87
	SMP	11	8	0	0	0	19	57.89
2021	SD	406	415	0	0	0	821	49.45
	SMP	11	13	0	0	0	24	45.83
2022	SD	405	148	123	40	0	716	56.56
	SMP	20	5	6	0	0	31	64.52
2023	SD	405	150	148	42	0	745	54.36
	SMP	23	6	3	1	0	33	69.70

Sumber : Statistik Data Pendidikan (kemdikbud.go.id), 2024

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 sebesar 14.77% mengalami peningkatan pada tahun 2023 persentase ruang kelas dalam kondisi baik menjadi sebesar 54.36%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan rehabilitasi ruang kelas.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SMP cenderung mengalami peningkatan dari 15.79% pada tahun 2019 terus meningkat menjadi 69.70% pada tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya penambahan atau pembangunan gedung baru di beberapa sekolah SMP sehingga jumlah ruang kelas berkondisi baik menjadi bertambah.

F. Angka Kompetensi Minimum

Angka Kompetensi Minimum (AKM) adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Perkembangan kompetensi literasi dan numerasi pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023

AKM	Lhokseumawe		Nasional
	2022	2023	2022
Rerata Kompetensi literasi SD berdasarkan AN	63.32	64.84	61.53
Rerata Kompetensi Numerasi SD berdasarkan AN	39.51	55.43	46.67
Rerata Kompetensi literasi SMP berdasarkan AN	51.85	58.36	59.00
Rerata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan AN	35.36	39.5	40.63
Iklim Keamanan Sekolah SD	69.87	72.14	68.18
Iklim kebinekaan SD	60.31	67.98	67.64
Iklim Inklusivitas SD	53.62	56.24	55.39
Iklim Keamanan Sekolah SMP	66.66	66.58	65.29
Iklim kebinekaan SMP	58.85	64.61	64.33
Iklim Inklusivitas SMP	51.36	53.57	54.84

Sumber : Rapor Pendidikan, 2024

Kompetensi Literasi SD Kota Lhokseumawe sebesar 63.32 pada tahun 2022 berada di atas Kompetensi Literasi SD Nasional. Untuk Kompetensi Numerasi SD Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebesar 39.51 berada di bawah kompetensi numerasi SD nasional yaitu 46.67. Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional.

G. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	25.559	25.533	100	100
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	531	531	100	100
Pendidikan Kesetaraan;	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	159	159	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.1.3.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran

hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	16	18	16	23	54
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4215	4340	4069	3853	3533
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)			4.74	4.15	3.93	5.97	15.28

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 4.74 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat kembali menjadi 4.15 di tahun 2020. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2021, jumlah kematian bayi mencapai angka 16 kasus dari 4069 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 15.28. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental.

Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian

bayi di Kota Lhokseumawe yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginetal.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.33
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi AKB)	3.80	4.15	3.69	4.93	15.28
Angka kelangsungan hidup bayi(AKHB) → (1000 AKB)		996.2	995.85	996.31	995.07	984.72

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 996.2 kemudian menurun menjadi 995.85 di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi meningkat menjadi 996.31, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 996 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2022 dan 2023, angka kelangsungan bayi menurun menjadi 995.07 dan 984.72. Penurunan ini selaras dengan meningkatnya angka kematian bayi pada tahun tersebut.

C. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.34
Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	21	4	2	2	2
2	Jumlah kelahiran Hidup	balita	4215	4340	4069	3853	3533
Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)			4.98	0.92	0.49	0.51	0.56

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan. Angka kematian balita pada tahun 2019 sebesar 4,98 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya tahun 2020-2023, angka kematian balita mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,92 per 1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 0,56 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023.

Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung lebih baik. Namun masih terdapatnya kematian balita perlu dijadikan kewaspadaan dini karena artinya prevelensi anemia ibu hamil masih tinggi, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asurapan mikronutrien pada ibu hamil dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Lhokseumawe adalah dengan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu dan berkualitas, peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

D. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2019 angka kematian neotanus sebesar 2,84 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 10,47 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.35
Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	bayi	12	17	16	20	37
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4215	4340	4069	3853	3533
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)			2.84	3.92	3.93	5.19	10.47

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

E. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.36
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	orang	6	7	14	3	8
2	Jumlah kelahiran Hidup	orang	4215	4340	4069	3853	3533
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			142.35	161.29	344.06	77.86	226.44

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Lhokseumawe dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 344.06. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 77.86 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang

cukup tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 226.44 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- a. kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- b. masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (Antenatal Care).

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Lhokseumawe dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.37
Rasio Posyandu Per Satuan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	unit	101	101	101	101	100
2	Jumlah Balita	Anak	15.126	21.626	20.231	19.948	15.677
Rasio posyandu per satuan balita			6.67	4.67	4.99	5.06	6.38

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 bersifat fluktuatif

dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, rasio posyandu per satuan balita sebesar 6.67, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 6 posyandu. Angka tersebut menurun menjadi 4.67 pada tahun 2020 karena jumlah balita bertambah 6.500 anak. Pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 4.99. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 5.06 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu pada tahun 2022. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang mengalami penurunan dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 6.38 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu menurun, dan jumlah balita juga mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.38
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Puskesmas	6	7	7	7	7
	Poliklinik	10	10	10	10	10
	Puskesmas Pembantu	22	23	23	22	22
	Jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu	38	40	40	39	39
2	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	18.34	21.19	21.06	20.37	19.89

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu

2019-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meingkat. Pada tahun 2019, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 18.34, artinya terdapat 18 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus meningkat hingga menjadi 21.19 puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya jumlah puskesmas dan pustu. Namun tahun 2021 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 21.06 atau 21 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk namun jumlah puskesmas/klinik/pustu tetap. Pada tahun 2022 angka rasio ini kembali menurun menjadi 20.37, artinya terdapat 20 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Terdapat penurunan jumlah pustu dan kenaikan jumlah penduduk. Begitu pula di tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio puskesmas, klinik, dan pustu mengalami penurunan menjadi 19.89.

H. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023

Tabel 2.39
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	9	9	9	9
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	10	10	10	10
7	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Rasio	0.043	0.053	0.053	0.052	0.051

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 terdapat satu rumah sakit swasta yang bertambah. Kemudian sampai dengan tahun 2023, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebesar 0.043 kemudian tahun 2020 sebesar 0.053 serta tahun 2023 sebesar 0,051 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

I. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Lhokseumawe. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.40
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	54	58	67	32	46
2	Dokter Spesialis	0	0	0	0	4
3	Dokter Gigi	11	14	16	16	23
	Jumlah Dokter	65	72	83	48	73
2	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Rasio dokter per satuan penduduk	0.31	0.38	0.35	0.43	0.37

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio dokter sebesar 0.31 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian meningkat menjadi 0.38 di tahun 2020 dan terus menurun menjadi 0.35 di tahun 2021. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 0.37. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.37 dokter tidak sampai 1 orang dokter.

J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Tabel 2.41
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perawat	499	510	212	212	289
2	Perawat Gigi	0	0	0	12	20
3	Bidan	431	456	248	248	302
Jumlah Total		930	966	460	478	611
Jumlah Penduduk		207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Rasio Perawat		2.4	2.7	1.12	1.11	1.47
Rasio Perawat Gigi		0	0	0	0.06	0.10
Rasio Bidan		2.08	2.41	1.31	1.29	1.54
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk		4.48	5.12	2.42	2.49	3.12

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2019-2023 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun menurun di tahun 2021, dan rasio meningkat kembali sampai dengan 3.12 di tahun 2023. Rasio perawat juga memiliki kecenderungan meningkat. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2019 sebesar 0 menjadi 0.10 di tahun 2023. Sedangkan rasio bidan fluktuatif, karena terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 1.31 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2023 menjadi 0,54 per satuan penduduk.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tabel 2.42
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	549	649	499	481	563
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	989	964	833	879	879
Persentase		55.5	67.3	59.9	54.7	64.05

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Lhokseumawe mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 55.5% menjadi 64.05%. Cakupan tertinggi

terjadi pada tahun 2020. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 59.9% dan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 54.7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus komplikasi kebidanan belum semua dapat tertangani.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.43
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4209	4340	3687	3841	3543
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	4709	4599	3798	4198	4198
Persentase		89.38	94.37	97.08	91.50	84.40

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Pada tahun 2019,

angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 89.38% dan tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 84.40%, penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang tertinggi adalah pada tahun 2020, menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

M. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.44
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	5	13	11	9	15
2	Jumlah Desa, Kelurahan	68	68	68	68	68
Cakupan Desa UCI		7.3	19.11	16.20	13.24	22.06

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 7.3%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.11% dan tahun 2021-2022 mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 22.06%

N. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-*

kwasiorkor). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.45
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	4	7	8	33	61
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	4	7	8	33	61
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Jumlah balita gizi buruk dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022-2023, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 balita gizi buruk sebanyak 4 anak dan menjadi 33 anak di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 61 anak di tahun 2023. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 seluruhnya telah mendapatkan perawatan.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.46
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi
Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	2574	2627	2406	2413	2214
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	11540	11695	4299	4237	3874
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak		22.31	22.46	55.97	56.95	57.15

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 57.15% dan terendah adalah tahun 2019 dengan angka sebesar 22.31%. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak baru mencapai 57.15% hal ini disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio* AFP rate ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.47
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	2	1	4	0	4
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	59.014	64.756	44.294	58.338	53.558
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		3.39	1.54	9.03	0	7.47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 terdapat 2 orang penderita. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 1 orang penderita dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus menjadi 4 orang. Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2019-2022, *rate*-nya berada pada rentang 0–9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non Polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga *rate* non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan

imonologi). Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.48
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	73	1	22	16	24
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	886	2222	902	2223	950
Cakupan Penemuan Pneumonia		8.23	0.04	2.43	0.72	2.53

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Pada kurun waktu 2019-2023, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami penurunan dari angka 8.23% di tahun 2019 hingga 0.047% di tahun 2020. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 22 anak dari 1 anak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2023 kembali terjadi peningkatan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 24 anak. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA

(+) di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	136	128	569	833	1087
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	238	216	1115	1003	1071
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		57,1	59,2	51.03	83.05	101.49

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 59.2% dari tahun 2019 sebesar 57.1%, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 51.03%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2023 meningkat menjadi 83.05% dan 101.49%. Peningkatan angka cakupan karena skrining TB sudah dilakukan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri sehingga penemuan kasus TB dapat ditemukan sedini mungkin.

S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

Tabel 2.50
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	230	297	569	833	1131
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Tingkat Tuberkulosis Prevalensi		111	157.4	299.6	435.2	576.8

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 230 kasus di tahun 2019 dan kasus tertinggi sebanyak 1131 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2019 tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 111,0. Selanjutnya tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi 157.4 per 100.000 penduduk di tahun 2020. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan menjadi 299,6 per 100.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 833 penderita dengan tingkat prevalensi 435,2. Dan pada tahun 2023 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1131 penderita sehingga tingkat prevalensi menjadi 576,8.

T. Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	1	1	6	2	2
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Tingkat Kematian Tuberkulosis	0,48	0.52	3.15	1.04	1.02

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019-2020 tingkat kematian karena tuberkulosis sebesar 0.48 dan 0.52 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 1 orang. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi tahun 2021 sebesar 3.15 artinya terdapat 3 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid, atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemic Covid-19 yang dapat memperburuk kondisi sehingga tingkat kematian penderita TB menjadi 3.15 per 100.000 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 tingkat kematian karena tuberkulosis sebesar 1.04 dan 1.02 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian penanganan yang tepat.

U. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.52
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam
Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	136	216	277	344	1087
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	136	216	312	344	1028
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS		100	100	88,78	100	105.7

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 105,7%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 88,78%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2019 dan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Kasus penemuan tuberculosis meningkat ini karena adanya kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 105.7%.

V. Proporsi Kasus Tuberculosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberculosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.53
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh
Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	94	79	243	870	655
2	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	128	128	686	883	1076
Proporsi Kasus Tuberculosis Yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS		73.43	61.72	35.42	98.52	60.87

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 73.43% dan menurun menjadi 61.72% di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, proporsi TB yang diobati dan sembuh menurun drastis menjadi 35.42%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2020, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 71,13%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 98.52%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2022. Namun Tahun 2023 proporsi TB yang diobati menurun meenjadi 60.87%. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

W. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan

diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.54
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	84	79	58	47	86
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	84	79	58	47	86
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2023. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2019-2022 terus menurun dari 84 penderita menjadi 47 penderita di tahun 2022. Tahun 2023 jumlah penderita DBD meningkat menjadi 86 penderita, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), belum maksimalnya pemeriksaan jentik berkala, masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan masih adanya saluran air yang tidak lancar sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

X. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah

semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pusku, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

Tabel 2.55
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	2555	1885	3071	2568	5014
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	5516	5700	5555	9014	16108
	Persentase	46.32	33.07	55.28	28.49	31.13

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Penderita diare yang ditangani di tahun 2019 sebesar 46.32% dan di tahun 2023 menurun menjadi 31.13%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2021 angka penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan menjadi 55.28%. Namun tahun 2022 jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader menurun menjadi 28.49% dan di tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 31.13%.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	7	3	8	4	25
2	Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Prevalensi HIV/AIDS		0,003	0,001	0.004	0.002	0.013

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.001%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 0,003% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 8 orang. Namun jika dilihat dari jumlah pasien HIV AIDS tertinggi adalah di tahun 2023 yaitu 25 orang, prevelensi HIV/AIDS tahun 2020 tertinggi dipengaruhi oleh jumlah penduduk di tahun 2021 lebih sedikit dari pada jumlah penduduk tahun 2023.

Z. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.57
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2441	2494	2268	2196	2338
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	4215	4340	4069	3853	3533
Cakupan kunjungan Bayi		57.91	57.46	55.74	56.99	66.17

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2019 sebesar 57.91%, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 55.74%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 angka cakupan meningkat menjadi 66.17% di tahun 2023.

AA. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.58
Cakupan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas	6	7	7	7	7
2	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas		150	175	175	175	175

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebanyak 6 puskesmas dan tahun tahun 2020-2023 menjadi sebanyak 7 unit puskesmas. Jumlah Kecamatan di Kota Lhokseumawe berjumlah 7 Kecamatan, sehingga cakupan puskesmas adalah 175%%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu Kecamatan terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki 2 puskesmas.

BB. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

Tabel 2.59
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pustu	22	23	23	22	22
2	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
Cakupan Puskesmas		32.35	33.82	33.82	32.35	32.35

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebesar 32.82% dan tahun 2020-2021 adanya penambahan 1

unit puskesmas pembantu sehingga cakupan puskesmas pembantu menjadi 33.82%, namun tahun 2022-2023, cakupan puskesmas pembantu kembali menjadi 32.35 karena jumlah puskesmas pembantu tersedia 22 puskesmas pembantu.

CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.60
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4472	4597	4191	4069	3643
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4944	4818	4366	4397	4396
	Persentase	90,4	95,4	96	92.5	82.87

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 95.4% dan terendah pada tahun 2023 yaitu 82.87%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan menurunnya jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 92.5% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 82.87%.

DD. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Tabel 2.61
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3910	4146	4064	3736	3458
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4709	4599	4167	4198	4198
Cakupan Pelayanan Nifas		83,03	90,1	97.5	89.0	82.37

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2019-2023 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu dari 83.03% menjadi 97.5%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahun 2022-2023 cakupan pelayanan nifas mengalami penurunan menjadi 82.37 di tahun 2023. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia*, *ikterus*, *hipotermia*, *tetanus neonatorum*, *infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.62
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	258	381	314	285	274
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	632	651	648	639	274
Persentase		40.8	58.5	48.6	44.6	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 40.8%. Selanjutnya pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami kenaikan menjadi 58.5%. Pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani kembali menurun menjadi 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data

diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani.

FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12–59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

Tabel 2.63
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15487	15200	13600	12698	13194
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	15863	17425	15933	15677	15677
Cakupan Pelayanan Anak Balita		97.63	87.23	85.3	81.0	84.16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2019-2023 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 97.63%.

Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2022 yaitu 81.0%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%.

GG. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah murid SD yang diperiksa adalah murid SD kelas 1. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

Tabel 2.64
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	15487	15200	13600	12698	13194
2	Jumlah murid SD dan setingkat	15863	17425	15933	15677	15677
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat		97.63	87.23	85.3	81.0	84.16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 cakupannya sebesar 97,63%. Selanjutnya cakupan terus menurun hingga menjadi 81.0% hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat sedikit meningkat menjadi 84.16%. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat belum mencapai 100%, artinya belum semua murid SD dan setingkat diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih.

HH. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1. Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.65
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan Pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	297.507	197.068	198.986	108.274	218.629
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	23.050	22.690	23.380	23.030	86.427
Cakupan pelayanan		1290.7	868.5	851.1	470.14	252.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sebesar 1290.7% kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 868.5%, dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 851.1% serta tahun 2022 menjadi 470% dan tahun 2023 menurun menjadi 33.93%. Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan melebihi 100% dikarenakan kunjungan yang berulang-ulang.

II. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan

kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.66
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	9	9	9	10	10
2	Jumlah Rumah Sakit	10	10	10	10	10
Persentase		90	90	90	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2021 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2022 dan 2023 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%. Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Lhokseumawe merupakan Rumah Sakit Swasta karena Kota Lhokseumawe belum memiliki Rumah Sakit Umum Pemerintah.

JJ. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

Tabel 2.67
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu	0	0	4	2	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	0	4	2	4
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	0	0	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

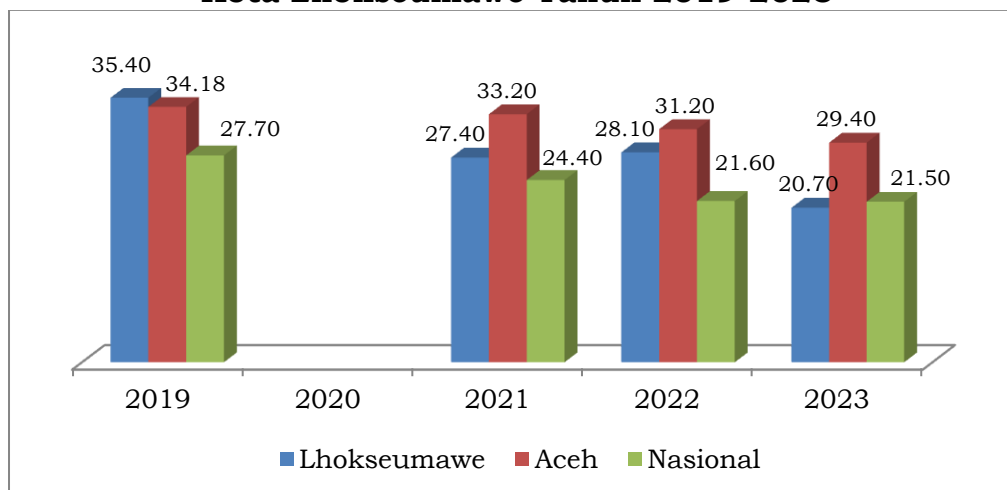
Berdasarkan data tabel di atas, selama periode tahun 2019-2023 terdapat sejumlah KLB di Kota Lhokseumawe. Tahun 2019-2020 tidak ada KLB yang terjadi di Kota Lhokseumawe, sedangkan tahun 2021 jumlah kejadian KLB sebanyak 4 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2022 turun menjadi 2 kasus dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4 kasus. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi <24 jam dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans desa yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

KK. Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang

optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.28
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2023

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 35,40% persen, sedangkan Aceh sebesar 34.18 lebih tinggi diatas Nasional sebesar 27.70%. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27.40% dan menurun 0.7 persen pada tahun 2023 menjadi 20.70 % dan Aceh mengalami penurunan menjadi 29.40% yang lebih tinggi dari nasional sebesar 21.5%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan angka prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe dengan peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan dan dengan melakukan inovasi yang diluncurkan BKKBN salah satunya program Bapak asuh anak stunting yang melibatkan seluruh masyarakat, Forkopinda, institusi, perusahaan dan stakeholder dalam memberikan bantuan untuk penanganan stunting.

LL. Pelayanan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari

sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Program JKN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Program JKN memastikan semua masyarakat Kota Lhokseumawe memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan promosi kesehatan.

Tabel 2.68
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta JKN	%
1	2019	207,202	195,577	94.39
2	2020	188,713	193,011	102.28
3	2021	189,941	195,922	103.15
4	2022	191,396	192,306	100.48
5	2023	196,067	187,441	95.60

Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe, 2024

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sebesar 94.39% atau 195.577 peserta dari jumlah penduduk 207.202 jiwa. Dan pada tahun 2023 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat menjadi 95.60% atau 187.441 peserta dari 196.067 jiwa penduduk. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Lhokseumawe tahun 2022 melebihi 100% dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 95.60% karena adanya adanya peserta JKN non aktif dan kelahiran bayi yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

MM. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	4396	3643	100	82.87
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	4198	3543	100	84.40
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3997	3351	100	83.84
Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19948	15532	100	77.86
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51512	34695	100	67.35
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	144144	144021	100	99.91
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	16747	16244	100	97.00
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41837	35189	100	84.11
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4566	3959	100	86.71
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	448	431	100	96.2
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	5205	4746	100	91.18
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	8805	4244	100	48.20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2023 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2023 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe, maka terdapat ketidaksesuaian panjang jalan, peningkatan status jalan dan pembukaan jalan baru sehingga Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe perlu dicabut dan diganti Keputusan Walikota Nomor 206 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.70
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		1,991	2,186	2,171	2,155	2,104

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah

setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang fluktuatif. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

B. Pesentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Tabel 2.71
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Km)

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Baik	171,297	171,297	171,297	279,983	258,494
2	Panjang Jalan Sedang	106,994	106,994	106,994	37,493	28,254
3	Panjang Jalan Mantap	278,291	278,291	278,291	317,476	286,748
4	Panjang seluruh jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
Persentase jalan dalam kondisi mantap		67.47	67.47	67.47	76,97	69,52

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Dari tahun 2019 stagnan sampai dengan tahun 2021 tetap 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan

menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52%.

C. Cakupan Layanan Sanitasi

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Data hasil cakupan layanan sanitasi yang dilakukan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.72
Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Sistem Layanan	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	%	66.77	66.52	62.77	64.90	66.40
	KK	27.773	28.823	32.530	34.928	36.959
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	%	5.60	6.53	6.42	6.18	5.98
	KK	2.328	2.828	3.328	3.328	3.328
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	%	27.64	26.96	30.81	28.92	27.62
	KK	11.497	11.680	15.969	15.565	15.374
Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi	%	100	100	100	100	100
	KK	41.598	43.331	51.827	53.821	55.661

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Secara umum, jumlah cakupan layanan sanitasi berdasarkan sistem layanan di Kota Lhokseumawe sebagian besar masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat atau rumah tangga dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sistem pengelolaan air limbah domestic setempat (SPALD-S) sebanyak 27.773 KK atau 66.77% dan pada tahun 2023 menjadi 36.959 KK atau 66,40% penurunan persentase dikarenakan penambahan jumlah KK.

Cakupan layanan sanitasi ini juga terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan

air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.

Tabel 2.73
Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Akses Aman	%	4.26	5.25	6.26	7.98	9.42
	KK	1.773	2.273	3.243	4.293	5.243
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	54.98	55.34	47.01	47.46	46.07
	KK	22.870	23.980	24.265	25.546	25.642
Akses Belum Layak	%	13.12	12.46	15.92	15.64	16.89
	KK	5.458	5.398	8.250	8.417	9.402
Tidak Ada Akses	%	27.64	26.96	30.81	28.92	27.62
	KK	11.497	11.680	15.969	15.565	15.374
Jumlah Cakupan Layanan	%	100	100	100	100	100
Sanitasi	KK	41.598	43.331	51.827	53.821	55.661

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2019, namun terlihat meningkat sampai dengan tahun 2023. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolah tinja (IPLT).

D. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.74
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km)	62,072	74,856	79,829	96,000	97.856
2	Panjang seluruh drainase (km)	116,408	116,408	116,408	116,408	117.408
Persentase		53,32	64,30	68,57	82,49	83.34

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Tren panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yakni sebesar 116,408 km pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 117.408 km pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Lhokseumawe sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Lhokseumawe terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

E. Daerah Dengan Potensi Genangan Tinggi

Indikator selanjutnya ialah daerah dengan potensi genangan tinggi. Daerah dengan potensi genangan ini apabila tidak ditangani akan menimbulkan permasalahan genangan yang mengganggu kegiatan masyarakat. Potensi genangan ini seringkali disebabkan oleh sedimentasi, banyaknya sampah di saluran drainase dan pada saat terjadi curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.75
Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Luasan Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi (Ha)	8,00	8,00	7,00	4,90	7

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di tahun 2019 sebesar 8,00 Ha dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7.00 Ha. Luas potensi genangan terus menurun hingga 4.90 Ha seiring dengan upaya pemeliharaan seperti pelumpuran berkala untuk menghilangkan sedimentasi, pembersihan sampah, penambahan SPAH (saluran pembuangan air hujan), rehabilitasi saluran dengan penambahan volume dan kapasitas saluran drainase serta penanganan titik-titik genangan. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7 Ha.

F. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Lhokseumawe. Air Minum berkualitas (layak) di Kota Lhokseumawe bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan PDAM.

Tabel 2.76
Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Akses Perpipaan	%	14.77	14.68	25.43	19.75	20.59
	KK	6,146	6,362	13,179	10,629	11,461
Akses Non Perpipaan	%	85.23	85.32	74.57	80	79
	KK	35,452	36,969	38,648	43,192	44,200
Jumlah Akses Layak	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	KK	41,598	43,331	51,827	53,821	55,661

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 20.59%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku.

Tabel 2.77
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang
Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.861	1.896	1.954	2.419	2.350
2	Jumlah Rumah Tangga	44.165	47.620	47.726	55.661	57.755
	Persentase	4.21	3.98	4,09	4.34	4.07

Sumber : PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2024

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 2.350 rumah tangga atau sebesar 4,0.7%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu.

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2019 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan.

Tabel 2.78
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk berakses air minum	35.452	36.969	38.648	43.192	44.200
2	Jumlah penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Persentase	17,11	19,59	20,35	22,57	22,54

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum telah didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK, DOKA dan DAK. Program yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

G. Areal Kawasan Kumuh

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series yaitu dari tahun 2019-2023. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan data yang cukup fluktuatif.

Tabel 2.79
Areal Kawasan Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	29,59	78,46	78,46	78,46	42,67

Sumber : 1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019

2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 48.87 Ha, dan pada tahun 2021-2022 tidak berubah tetap sebesar

78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBK, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Penanganan kumuh dilakukan intervensi sesuai dengan indikasi kegiatan yang ada dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) yang telah disusun oleh gampong didanai oleh APBN dari pinjaman Luar Negeri melalui Islamic developman Bank (IDB). Secara garis besar kegiatan NSUP-KOTAKU di Kota Lhokseumawe pada tahun intervensi 2019-2021 meliputi

a. kegiatan skala lingkungan meliputi

1. infrastruktur lingkungan yaitu kegiatan bantuan Pemerintah untuk masyarakat (BPM) tahun 2019-2020, infrastruktur livelihood tahun 2021, Kegiatan bantuan masa pandemic covid dengan cash for work (CFW) dan kegiatan skala kota tahun 2020-2021
2. peningkatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang sudah punya usaha rumahan dan akan memulai usaha di program kotakku pendampingan dilakukan simpan pinjam kelompok usaha yang difasilitasi oleh unit pengelolaan keuangan (UPK)
3. Kelembagaan dan kolaborasi, setiap gampong diharuskan membentuk suatu badan yang dinamai dengan LKM/BKM

b. Kegiatan Skala Kawasan

Kegiatan penentasan kumuh skala kawasan di Kota Lhokseumawe diusulkan dari tahun 2017 hasil memorandum program terdapat 4 kawasan prioritas yaitu:

1. Kawasan Mongeudong
2. Kawasan Bathupat
3. Kawasan Jagu
4. Kawasan Pusong

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe.

H. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.80
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	URAIAN	2023		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	74	62.520	24.000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	205	10.320	2.040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2.500	1.000
4	Lain-Lain	-	-	-
5	Jumlah Tempat Pemakaman	281	75.340	27.040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			196.067
Rasio TPU Per Satuan Penduduk (6/5)				275.82

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2023 jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 281 tempat dengan luas sebesar 75,340 ha dengan rincian 74 tempat pemakaman umum dengan luas lahan 62.520 ha, sementara tempat pemakaman bukan umum sejumlah 205 dengan luas lahan 10.320 ha, dan jumlah tempat pemakaman khusus sebanyak 2 dengan rasio TPU per satuan penduduk sebesar 275.82.

I. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tempat Ibadah					
	a. Mesjid	51	51	52	52	52
	b. Mushalla	93	93	93	93	93
	c. Meunasah	68	68	68	68	68
	d. Gereja	3	3	3	3	3
	e. Vihara	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Ibadah	216	216	217	217	217
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
3	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk					
	a. Mesjid	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26
	b. Mushalla	0.45	0.49	0.48	0.48	0.47
	c. Meunasah	0.33	0.36	0.35	0.35	0.34
	d. Gereja	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	e. Vihara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah Mushalla. Keberadaan masjid di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebanyak 51 unit, kemudian meningkat hingga menjadi 52 unit pada tahun 2021. Terdapat penambahan 1 masjid di tahun 2021 yaitu di daerah Blang Panyang yaitu Mesjid Teuku Muda Blang Panyang. Mushalla di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 berjumlah 93 unit. Meunasah pada tahun 2019-2023 berjumlah 68 unit sesuai jumlah Gampong di Kota Lhokseumawe.

Gereja dan Vihara di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 berjumlah tetap masing-masing 3 unit gereja dan 1 unit vihara. Secara umum kurun waktu 2019-2023 rasio jumlah tempat ibadah per 1000 penduduk di Kota Lhokseumawe memiliki rasio tetap, Penurunan dan peningkatannya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

J. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

Tabel 2.82
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24.36	24.36	24.36	24.36	24.36
2	Luas wilayah ber HPL (Ha)	101	101	101	101	101
3	Luas wilayah ber HGB (Ha)	81,976	63,387	20,399	73,624	162,439
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU		0.29	0.38	1.19	0.33	0.15

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe dan Badan Pertanahan Tahun 2024

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2019-2023 tetap. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya luas RTH dan tetapnya luas wilayah yang bertatus HPL, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL tetap dari 2019-2023. rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HGB meningkat dari tahun 2019-2021, namun tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

K. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan memiliki IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.83
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	180	183	140	78	104
2	Jumlah bangunan	-	-	-	-	-
	Persentase	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : DPMTSP dan Naker Tahun 2024

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terus menurun, yakni sebanyak 180 unit pada tahun 2019 hingga menjadi 104 unit di tahun 2023, Tren rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2019-2023 pun mengalami penurunan. Di tahun 2020 terdapat penambahan jumlah bangunan yang ber-IMB sebesar 3 unit. Terjadi penambahan jumlah bangunan ber-IMB namun kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan masih kurang. Hal ini karena masih ada masyarakat yang masih kurang paham dengan alur pengajuan izin. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Untuk jumlah bangunan belum terdat di DPMTSP kota Lhokseumawe.

L. Kesesuaian Pemnfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara Satu.

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

M. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disyaratkan adanya rekomendasi teknis dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTP dan Naker (Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota Lhokseumawe yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna.

Tabel 2.84
Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	91	133	224	234	280

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

N. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2023

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.85
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pemenuhan kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	55.661	7.691	100	18,5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	55.661	38.132	100	68,51

Sumber : Laporan SPM Tahun 2023, Dinas PUPR Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2023 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Luas Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.86
Luas Permukiman Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	4713,41	4664,54	4664,54	4622,13	4700,33

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024, Hasil Olahan 2024

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Lhokseumawe dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 fluktuatif. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan updating data rumah layak huni Kemudian pada tahun 2020 jumlah penanganan yang dilakukan dari Dinas PUPR sangat sedikit, hal ini terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2023 yang juga mengalami peningkatan luas permukiman layak huni menjadi 4700,33 Ha.

B. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan

dikalikan dengan 100. Indikator ini hampir sama dengan indikator rasio rumah layak huni, akan tetapi pembagiannya yang berbeda. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.87
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	35.618	35.678	35.858	38.962	40.116
2	Jumlah seluruh rumah layak huni	51.992	52.069	52.527	53.821	55.661
Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni		68.51	68.52	68.26	72.39	72.07

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat, kemudian sedikit menurun tahun 2021 menjadi 68.26% Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Lhokseumawe. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Dari halaman resmi Kementerian PUPR, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Tabel 2.88
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tidak layak huni	16.374	16.391	16.669	14.859	15.545

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH telah efektif dilaksanakan

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah yang aan ditangani pada tahun n	-	-	-	-
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah Tanggapenerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	300	-		0%

Sumber : Laporan SPM Tahun 2023, Dinas PUPR Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2023 seluruhnya sebesar 0%. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Daerah dan Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak tersedia.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa

Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu Gampong. Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat atau Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berikut adalah rasio polisi pamong praja dan petugas linmas di Kota Lhokseumawe per 10.000 penduduk.

Tabel 2.90
Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja	213	233	243	250	278
2	Jumlah Linmas	1040	1040	1040	1040	1173
3	Jumlah penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Rasio Polisi Pamong Praja		10.27	12.34	12.79	13.06	14.17
Rasio Linmas		50.19	55.11	54.75	54.33	59.82

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari tabel rasio satuan polisi pamong praja dan petugas Linmas di atas, dapat dilihat rasio satuan polisi pamong praja dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 rasio satuan polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 10,27 dan pada tahun 2023 menjadi 14,17. Sedangkan jumlah petugas Linmas Kota Lhokseumawe tahun 2019-2022 tetap sebanyak 1040 orang dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1173 orang hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Lhokseumawe saat pemilu. Sedangkan rasio petugas

linmas tahun 2019 sebesar 50,19 dan menjadi 59,82. Rasio petugas linmas tetap tapi rasionya mengalami kenaikan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

B. Persentase Penegakan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.91
Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penegakan Perda/Qanun	15	12	12	11	11
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun	862	2129	4584	759	121
	Persentase	1.74	0.56	0.26	1.45	9.09

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024

Dari tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2019-2023 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang terjadi di Kota Lhokseumawe masih sangat kecil dan dapat dikatakan predikat yang buruk. Pada tahun 2019 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun sebesar 1,74% dan terus mengalami penurunan menjadi 0,25% di tahun 2021 selanjutnya mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,45 % di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 9,09% di tahun 2023. Peningkatan persentase penegakan perda/qanun merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi.

C. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasal 15 tentang Khamar	-	13	-	-	1
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	-	-	2	-	1
3.	Pasal 18 tentang Maisir	-	22	-	-	-
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	9	1	4	7	-
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	3	-	-	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	47	49	31	124	60
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	48	90	45	-	2
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	-	-	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	3	1	10	8	-
10.	Pasal 46 tentang Pelecehan Seksual	-	2	-	2	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap	-	-	-	-	-

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	anak					
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemeriksaan terhadap Anak	-	1	-	-	-
13.	Pasal 64 tentang Musahabah	4	-	-	-	-
Jumlah Kasus		114	179	92	141	64

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak tahun 2019-2023 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 114 kasus dan menjadi 92 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021 sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 90 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022. Pada tahun 2023 kasus pelanggaran syariat islam mengalami penurunan menjadi 64 kasus.

D. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

Tabel 2.93
Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penertiban Pasar	9	249	249	250	5
2.	Penertiban IMB dan HO	1	2	-	-	10
3.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	93	249	249	250	6
4.	Penertiban Spanduk	8	5	-	2	-
5.	Penertiban Pelajar Bolos Sekolah	4	5	1	5	-
6.	Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam	-	-	-	-	-
7.	Penertiban Keramaian Umum	7	1	-	-	-
8.	Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	-	1	-	-	-
9.	Pengamanan Demo	-	-	-	-	3
10.	Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya	-	-	-	2	-
11.	Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah	-	-	-	-	-
12.	Penertiban Penindakan PNS	1	-	-	-	-
13.	Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis	2	40	2	250	-
14.	Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll)	-	3	-	-	-
Jumlah Kasus		125	555	501	759	25

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024.

Penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2019 pada penertiban pasar sebanyak 9 penertiban dan tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban. Dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5 penertiban. Pada Tahun 2019 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 93 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban, dan tahun 2023 menurun menjadi 6 penertiban Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2019 sebanyak 2 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban dan tahun 2023 tidak ada dilakukan penertiban.

E. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana disusun berdasarkan gabungan dari indeks-indeks pengkajian yang mempengaruhi kajian risiko bencana. Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan tersendiri. Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas menjadi dasar dalam

memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas Indeks tersebut menentukan kelas masing-masing komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana. Indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu rendah (<36), sedang (36-144), dan tinggi (>144). Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

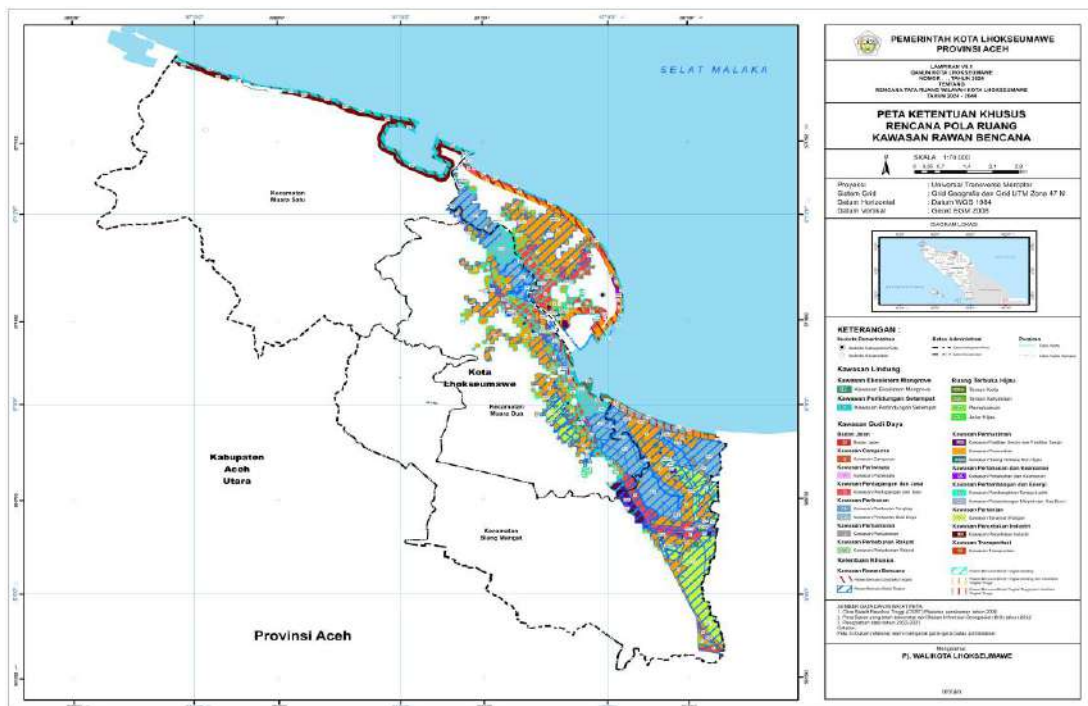
Tabel 2.94
Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Resiko 2023
1.	Lhokseumawe	143.20	143.20	138.73	130.44	124.22	Sedang

Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019-2023 berada pada kelas risiko sedang, Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe walau tetap dalam kelas resiko sedang namun terus menurun dari 143.20 pada tahun 2019 menjadi 124.22 pada tahun 2023. Untuk melihat peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.29
Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar kecamatan di Kota Lhokseumawe terkategori memiliki risiko bahaya sedang (peta

bergaris hijau muda) Kecamatan Banda Sakti yang tergolong berisiko bahaya tinggi (peta bergaris merah). Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan resilience yang massif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Kota Lhokseumawe diturunkan menjadi kategori rendah.

F. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun 2019 hingga 2023. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Jenis Bencanas	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	1	6	5	3	8
Puting Beliung	5	5	1	6	2
Tanah Longsor	2	3	1	3	1
Gempa Bumi	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim/Abrasi	-	1	2	-	-
Jumlah	8	15	9	12	11

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024.

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 kejadian bencana banjir meningkat menjadi 8 kali, bencana puting beliung sebanyak 2 kali, bencana tanah longsor 1 kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi juga tidak terjadi serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

G. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Lhokseumawe sangat diperlukan. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas. Persentase cakupan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.96
Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	51	41	32	38	103
2	Jumlah kejadian bencana non kebakaran yg ditanggulangi	9	15	9	12	23
3	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditanggulangi	60	56	41	50	126
4	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terjadi	60	56	41	50	126
Persentase Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

H. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	140	140	100	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5000	5000	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	30	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400	400	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	110	110	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2023

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2023 SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.3.1.6 Sosial

A. Persebaran Jenis PPKS

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan sosial yang belum memadai, SDM yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha

dalam pelayanan sosial. Di sisi lain permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana membutuhkan penanganan secara serius. Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Data PPKS menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
menurut Kecamatan Tahun 2023

Jenis PPKS	Banda Sakti	Muara Dua	Blang Mangat	Muara Satu
Anak Balita Terlantar	0	1	0	2
Anak dengan Kedisabilitas	10	22	10	18
Anak Jalanan	16	4	9	14
Anak Terlantar	52	38	33	27
Anak yang berhadapan dengan hukum	20	9	4	11
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	9	3	2	6
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	5	3	1	3
Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	25	3	1	1
Gelandangan	0	0	0	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	11	16	7	12
Korban Penyalahgunaan NAPZA	13	0	0	1
Korban Tindak Kekerasan	4	7	1	2
Lanjut Usia Terlantar	23	20	16	16
Penyandang Disabilitas	29	20	20	19
Pemulung	0	0	0	0
Pengemis	0	0	0	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	229	198	183	142
Tuna Susila	32	31	19	24
Jumlah	478	375	306	298

Sumber : Dinas Sosial, 2024

B. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial). Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.99
PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	163	158	157	160	178
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	205	216	185	197	207
Persentase		79.51	73.15	84.86	81.22	85.99

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 berada pada angka 79.51%, tetapi mengalami penurunan menjadi 73.15% di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 84.86%, tahun 2022 mengalami penurunan dan 2023 meningkat kembali menjadi 85.99%.

C. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

Tabel 2.100
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	55	65	60	4515	14053
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	55	65	60	4515	14053
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2019-2023 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-

19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

D. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah Pekerja Sosial profesional dan atau TKSK dan atau relawan sosial yang tersedia dan aktif dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang

masalah kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

E. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	144	144	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	79	79	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terkantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	177	177	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara tuna sosial khususnya gendangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	34	34	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	14053	14053	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2023

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2023 SPM bidang sosial yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

A. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Tabel 2.102
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	26	50	54	29	43
2.	Jumlah perusahaan	157	34	52	164	93
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		165.6	1470.5	1038.5	176.8	462.4

Sumber : DPMTSP dan Naker, 2024

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2019-2023, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 26 sengketa, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 50 sengketa, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 54 sengketa. Dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29 sengketa dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 43 sengketa. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Lhokseumawe kurang kondusif mengingat tingkat kasus sengketa meningkat, tetapi jumlah perusahaan juga menurun.

B. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun tersebut. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebesar 100%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 94% dan tahun 2021 semua kasus terselesaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 58.62%, dari 29 kasus terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya tahun 2023 tingkat penyelesaian kasus sebesar 90.47%.

Tabel 2.103
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Pejanjian Bersama (PB)	25	47	46	17	38
2.	Jumlah kasus yang tercatat	25	50	46	29	42
Tingkat Penyelesaian Kasus		100	94.00	100	58.62	90.47

Sumber : DPMTSP dan Naker, 2024

C. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Tabel 2.104
Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	93	331	189	44	30
2.	Pencari kerja yang mendaftar	189	695	482	549	402
Pencari Kerja yang ditempatkan		49.20	47.62	39.21	8.01	7.46

Sumber : DPMTSP dan Naker, 2024

Dari tahun 2019, jumlah pencari kerja sebanyak 189 orang, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang

mendaftar mengalami peningkatan menjadi 695 orang, hal ini dikarenakan ada banyaknya peserta CPNS Kota Lhokseumawe yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunya jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

D. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

Tabel 2.105
Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK	N/A	N/A	23.627	32.321	24.047
2.	Jumlah seluruh pekerja	N/A	N/A	58.203	58.203	66.558
	Persentase	N/A	N/A	40.59	55.38	36.13

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2021, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah 40.59%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 55.38%, tetapi di tahun 2023 menurun hingga sebesar 36.13%.

E. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, persentase tenaga kerja terbina kompetensi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pencari kerja yang terdaftar semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2021-2023 persentase tenaga kerja terbina kompetensi menunjukkan peningkatan. Pelatihan Tenaga Kerja yang

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beragam menurut bakat dan minat tenaga kerja yang diarahkan untuk lebih menguasai bidangnya seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan tata rias dan pelatihan lainnya.

Tabel 2.106
Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	94	40	95	144	106
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar	189	695	482	549	402
	Persentase	49.74	5.75	19.71	26.22	26.37

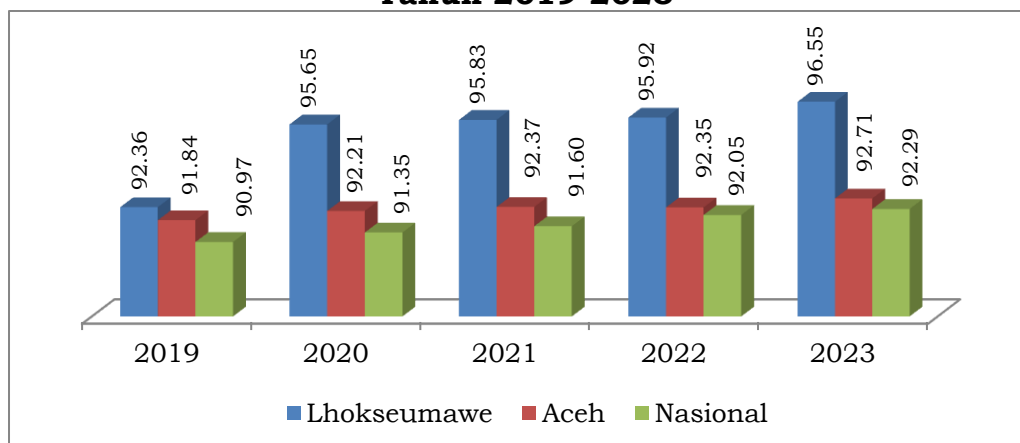
Sumber : DPMTSP dan Naker, 2024

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



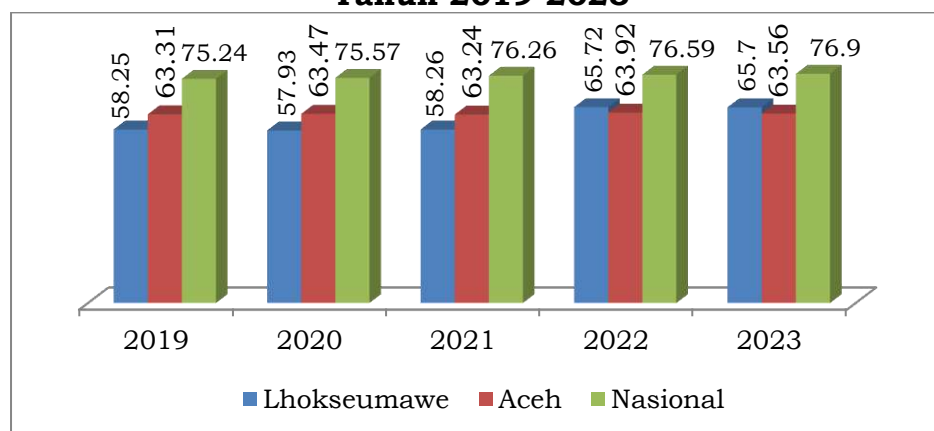
Sumber : BPS, 2024

IPG Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.31
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kota Lhokseumawe yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2019-2023 memperlihatkan perkembangan yang positif. Apabila dilihat dari data pilah gender di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023, terdapat 7 orang perempuan atau 28 persen yang menjadi anggota DPRK.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.107
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.400	3.421	3.475	2.210	2.036
2.	Jumlah pekerja perempuan	72.891	73.412	72.345	34.739	34.992
Persentase		4.66	4.66	4.80	6.36	5.82

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 4.66% hingga pada tahun 2023 turun menjadi 5.82%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, dan mutasi kerja di setiap tahunnya.

D. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRK. Jumlah kursi di keanggotaan DPRK Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 memiliki jumlah tetap, yakni 25 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, terdapat 4 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRK dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK sebesar 16%. Selanjutnya tetap hingga tahun 2023 di mana jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan meningkat menjadi 6 orang yang terdiri dari Partai Aceh 1 orang,

Partai Gerindra 1 orang, Partai Demokrat 1 orang, PKB 1 orang, PKS 2 orang dan Partai Golkar 1 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 28% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2019-2023, besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRK Lhokseumawe belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

Tabel 2.108
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK
Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	4	4	4	4	6
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRK	25	25	25	25	25
	Persentase	16	16	16	16	24

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2024

E. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Lhokseumawe. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.109
Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KDRT	37	49	18	29	24
2.	Jumlah rumah tangga	53.535	54.735	55.154	56.280	43.747
	Rasio KDRT	0.069	0.089	0.032	0.051	0.055

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah KDRT adalah sebesar 37 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,069% dan mengalami kenaikan di tahun 2020, kemudian menurun di tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 29 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,051%. Kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2020 terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Kemudian, di tahun 2023, jumlah KDRT sedikit menurun daripada tahun 2022 menjadi sebanyak 24 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,055%. Meningkatnya jumlah KDRT tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi.

F. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.110
Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KDRT	37	49	18	29	24
2.	Jumlah rumah tangga	53.535	54.735	55.154	56.280	43.747
Rasio KDRT		0.069	0.089	0.032	0.051	0.055

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2019, jumlah KDRT adalah sebesar 37 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,069% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 49 kasus. Pada tahun 2021 jumlah kasus KDRT mengalami penurunan menjadi 18 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,032%. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 29 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0.051%, kenaikan jumlah kasus KDRT terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik, meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi.. Kemudian tahun 2023, jumlah KDRT menurun daripada tahun 2022 menjadi sebanyak 24 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,055%.

G. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.111
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	46.18	47.10	48.15	48.33	51.50

Sumber : BPS, 2024

Pada tahun 2019-2023, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 46.18% hingga mencapai 51.50% pada tahun 2023. Peningkatan angka

partisipasi angkatan kerja perempuan menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Lhokseumawe yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

H. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

Tabel 2.112
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindak lanjuti oleh UPT	22	86	56	75	68
2.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang masuk ke UPT	22	86	56	75	68
Rasio KDRT		100	100	100	100	100

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2019 sebanyak 22 laporan menjadi 86 laporan di tahun 2020, menurun pada tahun 2021 menjadi 56 laporan meningkat kembali tahun 2022 menjadi 75 laporan dan menurun kembali menjadi 68 laporan pada tahun 2023. Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan.

2.1.3.2.3 Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.113
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	23.180.220	20.808.800	23.610.220	24.981.840	26.689.340
2.	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Ketersediaan Pangan		111,87	110,26	124,30	130,52	136,12

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2024

Ketersediaan pangan di Kota Lhokseumawe berasal dari daerah lain di sekitar Kota Lhokseumawe dan juga hasil produksi di wilayah Kota Lhokseumawe. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Lhokseumawe ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik. Penurunan ketersediaan pangan utama di tahun 2020 disebabkan terjadinya penurunan produksi gabah/beras dalam kota dikarenakan pandemi covid-19.

B. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

Tabel 2.114
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
1.	Energi (Kkal)	NA	NA	1961	2355	2483
2.	Protein (Gram)	NA	NA	66.53	98.11	88.00
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
3	Energi (Kkal)	1849.7	1870	1943.3	2046.7	1711.5
4	Protein (Gram)	54.93	58.7	60.0	62.6	54.1
Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Perkapita Perhari						
5	Energi (%)	86.0	87.0	90.4	97.5	81.5
6	Protein (%)	96.37	103.0	105.3	109.8	94.5

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2024

Ketersediaan energi dan protein di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2023, tersedia energy sebesar 2783 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 88.00 gram per kapita per hari. Peningkatan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

2.1.3.2.4 Pertanian

A. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 181.060.000 m², Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 4.958.100 m² sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 6.292.930 m², kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.115
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m2)	1.083.630	682.430	1.433.330	3.550.630	4.958.100
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	Persentase	0,60	0,38	0,79	1,96	2,74

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2019 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 1.083.630 m2 atau 0.60% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2023 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 4.958.100 m2 yaitu sebesar 2.74% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.116
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m2)	5.459,640	1.713,953	2.932,830	1.964.782	6.292.930
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	Persentase	3,01	0,95	1,62	1,08	3,5

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe, tahun 2019 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 5.459.640 m² atau 3.01% dan tahun 2023 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 6.292.930 m² yaitu sebesar 3.5% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

B. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang,

sampai dengan tahun 2023 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 1.624.390 m².

Tabel 2.117
Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Hak Guna bangunan (m2)	819.760	633.870	203.990	73.624	1.624.390
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	Persentase	0,45	0,35	0, 11	0,041	0,89

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 819.760 m² atau 0,45% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2023 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 1.624.390 m² atau 0.89% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Kota

Perintisan RPPLH dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah dan dimulai dengan penyusunan data melalui Inventarisasi RPPLH Kota Lhokseumawe. Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses pengusulan penetapan Qanun. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

B. Terselenggaranya KLHS untuk Kota

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

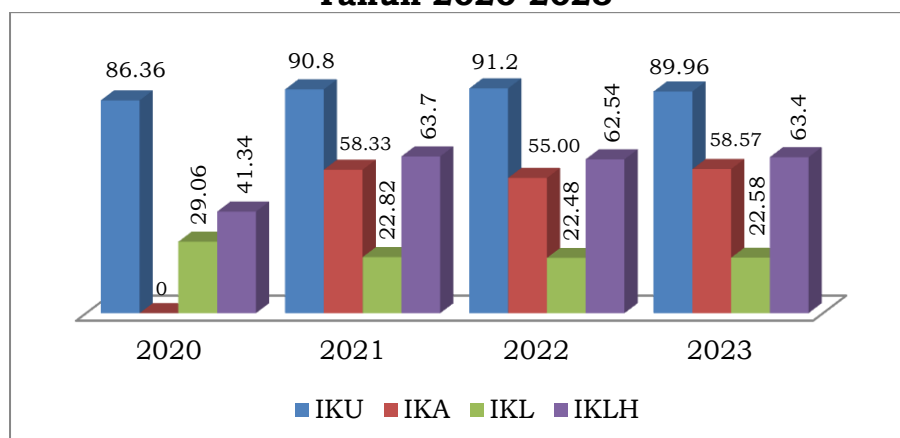
yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMK 2017-2022, dan KLHS RTRW 2012-2032. Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJMK 2025-2029.

C. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Gambar 2.32
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)
Tahun 2020-2023



Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 63.70 dengan predikat sedang dan Tahun 2022 menurun menjadi 62.54 masih dengan predikat sedang. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 63.4. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 91.20. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 89.96. Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 sebesar 58.33 dan Tahun 2022 menurun menjadi 55.00. Dan Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 58.57. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dan mengalami penurunan menjadi 22.48 pada Tahun 2022. Dan sedikit meningkat menjadi 22.58 di Tahun 2023.

D. Timbulan Sampah yang ditangani

Indikator timbulan sampah yang ditangani didapatkan dari pembangian volume timbulan sampah yang ditangani dengan total timbulan sampah dikalikan dengan dengan bilangan 100. Timbulan sampah yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.118
Timbulan Sampah yang ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	25.604	27.396	29.672	28.470	35.643
2	Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton)	33.067	33.729	34.403	35.091	35.793
	Persentase	77,43	81,22	86,25	81,13	99,58

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas Tahun 2019 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.067 ton yang ditangani sebanyak 25.604 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 77,43%. Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton sampah yang tertangani meningkat menjadi 27.396 ton, capaian penanganan menjadi 81,22% dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang tertangani menurun menjadi 81.13%. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah sebanyak 35.793 ton dan yang tertangani sebanyak 35.643 ton sehingga mencapai 99.58%

E. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Indikator ini didapat dari luas area pelayanan pengelolaan sampah (km²/ha) dengan luas area kota(km²/ha) dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah. Persentase cakupan area pelayanan sampah di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.119
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	150	160	165	166	174
2.	Luas area kabupaten/kota (km ² /ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
	Persentase	82.84	88,36	91,13	91.68	96.10

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan menjadi sebesar 82.84%, pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68% dan Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 96.10%.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.120
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	122.958	125.483	126.300	129.740	132.586
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	128.230	130.141	130.633	132.102	138.705
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.96	0,96	0,97	0.98	0.96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2019-2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio penduduk ber-KTP dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dan jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah meningkat lebih besar.

B. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel 2.121
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	18.311	18.159	18.532	20.567	19.563
2	Jumlah Bayi	20.996	20.296	18.589	20.753	20.234
	Rasio	0.87	0,96	0,97	0.99	0.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2019 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,87. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 0.99. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Rumah Sakit ABBY, Rumah Sakit Arun, dan Rumah Sakit MNC.

C. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Lhokseumawe sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.122
Rasio Pasangan Berakta Nikah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan berakta nikah	27.699	34.959	40.731	45.648	49.198
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	78.995	80.135	80.639	80.972	81.573
Rasio pasangan berakta nikah		0.35	0.44	0.51	0.56	0.60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio pasangan berakta nikah dari tahun 2019 ke 2023 menjadi 0,60 di tahun 2023. Akta nikah dikeluarkan untuk warga masyarakat non muslim. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

D. Rasio Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan KTP-el, tetapi KIA tidak memiliki *chip* seperti KTP-el. Dilansir dari Permendagri 2 tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat di antara lain, (1) melindungi pemenuhan hak anak, (2) menjamin akses sarana umum, (3) menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah terjadinya perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang

pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Berikut adalah data anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

Tabel 2.123
Rasio Anak yang Memiliki KIA
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak yang memiliki KIA	N/A	12.161	16.955	19.104	22.121
2	Jumlah penduduk wajib KIA <17 tahun	N/A	60.822	58.980	57.863	61.066
Rasio anak yang memiliki KIA		N/A	0.20	0.29	0.33	0.36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio anak yang memiliki KIA dari tahun 2020 ke 2023 menjadi 0,36 di tahun 2023. Namun, rasio anak yang memiliki KIA ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

E. Akta Kematian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian atau lahir mati, maka pihak keluarga wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan sipil. Berikut data Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.124
Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah akta kematian	650	994	979	867	1.154

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan data di atas jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah akte kematian berjumlah 650 lembar dan menjadi 1.154 lembar pada tahun 2023. Jumlah pembuatan akte

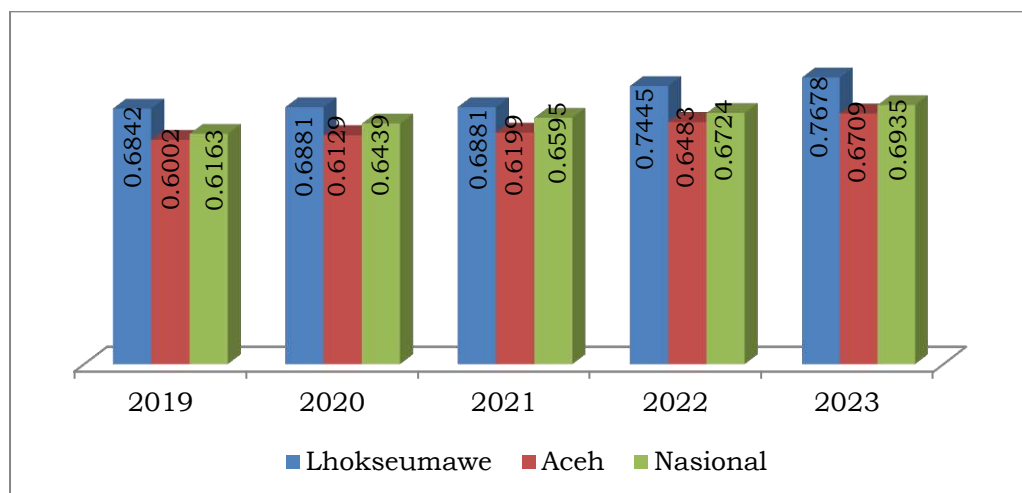
kematian meningkat karena kebutuhan akan kelengkapan administrasi ahli waris.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Indeks Desa Membangun

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Untuk mengetahui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.33
Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe
Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari gambar dapat di lihat secara lengkap status perkembangan desa di Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan nasional mulai tahun 2019-2023. Status IDM Kota Lhokseumawe termasuk dalam kategori Maju dengan nilai 0.7445 lebih baik dari Provinsi Aceh Tahun 2022 masuk dalam Kategori Berkembang dengan nilai 0,6483, meningkat dibandingkan dengan status IDM Kota Lhokseumawe tahun 2021 dengan nilai 0,6881. Meskipun demikian, perolehan nilai status IDM Kota Lhokseumawe

Tahun 2022 berada di atas nilai rata-rata Aceh dan nasional yaitu 0,6724. Dan pada Tahun 2023 nilai IDM Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 0.7678 di atas Aceh dengan nilai 0,6709 dan nasional sebesar 0.6935 Adapun dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk IDM masing-masing Gampong di Kota Lhokseumawe.

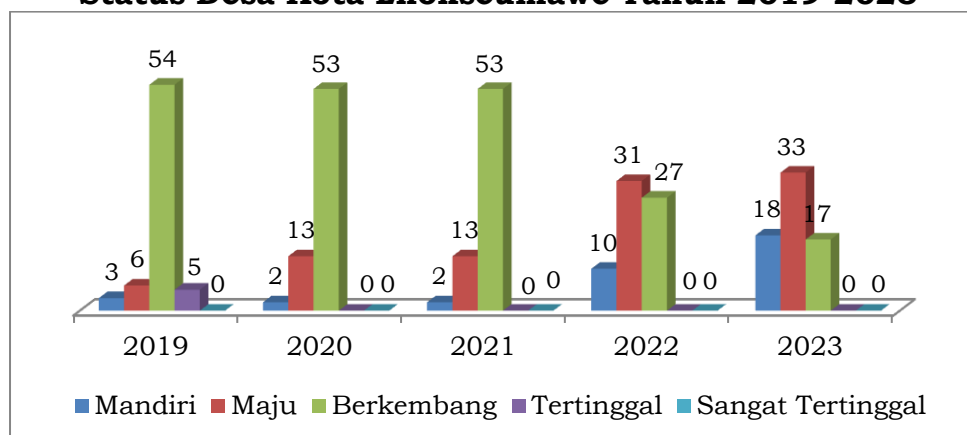
Tabel 2.125
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No.	Nama Desa	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Muara Dua					
	- Mandiri	0	0	0	1	2
	- Maju	2	5	5	12	14
	- Berkembang	13	12	12	4	1
	- Tertinggal	2	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
B	Banda Sakti					
	- Mandiri	2	1	1	5	12
	- Maju	1	3	3	12	6
	- Berkembang	15	14	14	1	0
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
C	Blang Mangat					
	- Mandiri	0	0	0	2	2
	- Maju	0	2	2	1	7
	- Berkembang	21	20	20	19	13
	- Tertinggal	1	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
D	Muara Satu					
	- Mandiri	1	1	1	2	2
	- Maju	3	3	3	6	6
	- Berkembang	5	7	7	3	3
	- Tertinggal	2	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
	TOTAL	68	68	68	68	68

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2024

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.34
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada, dan status desa tertinggal menurun dari tahun 2019 sebanyak 5 desa menjadi tidak ada desa tertinggal sejak tahun 2020. Sedangkan status desa berkembang dari tahun 2019 sebanyak 54 desa menurun menjadi 53 desa di tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang dan tahun 2023 menjadi 17 desa. Status desa maju terdapat pada 6 desa pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlah desa yang berstatus maju menjadi sebanyak 13 desa serta tahun 2022 juga terus mengalami peningkatan menjadi 31 desa yang berstatus desa maju dan tahun 2023 menjadi 33 desa maju. Status desa mandiri pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 18 desa yang berstatus desa mandiri. Sedangkan tahun 2021 dan 2020 justru mengalami penurunan menjadi 2 desa yang berstatus mandiri, dari kondisi pada tahun 2019 yang terdapat sebanyak 3 desa berstatus mandiri.

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.126
Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2023

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS	
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	0.7219	MAJU	
	HAGU BARAT LAUT	0.7813	MAJU	
	HAGU SELATAN	0.8324	MANDIRI	
	HAGU TEUNGOH	0.7951	MAJU	
	JAWA BAROE	0.8375	MANDIRI	
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	0.8959	MANDIRI	
	KEUDE ACEH	0.8133	MAJU	
	KOTA LHOKSEUMAWE	0.893	MANDIRI	
	KUTA BLANG	0.8933	MANDIRI	
	LANCANG GARAM	0.9048	MANDIRI	
	MON GEUDONG	0.8635	MANDIRI	
	PUSONG BARU	0.8229	MANDIRI	
	PUSONG LHOKSEUMAWE	0.8168	MANDIRI	
	SIMPANG EMPAT	0.8221	MANDIRI	
	TUMPOK TEUNGOH	0.8511	MANDIRI	
	UJONG BLANG	0.8263	MANDIRI	
	ULEE JALAN	0.7638	MAJU	
	UTEUN BAYI	0.7702	MAJU	
	BLANG MANGAT	ALUE LIM	0.691	BERKEMBANG
		ASAN KAREUNG	0.6651	BERKEMBANG
BALOI		0.7157	MAJU	
BLANG BULOH		0.7068	BERKEMBANG	
BLANG CUT		0.7113	MAJU	
BLANG PUNTEUET		0.7202	MAJU	
BLANG TEUE		0.6817	BERKEMBANG	
BLANG WEU BAROH		0.6906	BERKEMBANG	
BLANG WEU PANJOE		0.6908	BERKEMBANG	
JAMBO MESJID		0.7276	MAJU	
JAMBO TIMU		0.7063	BERKEMBANG	
JEULIKAT		0.711	MAJU	
KEUDE PUNTEUET		0.8319	MANDIRI	
KUALA		0.7108	MAJU	
KUMBANG PUNTEUET		0.6797	BERKEMBANG	
MANE KAREUNG		0.684	BERKEMBANG	
MESJID PUNTEUET		0.8381	MANDIRI	
RAYEUK KAREUNG		0.6857	BERKEMBANG	
SEUNEUBOK		0.7	BERKEMBANG	
TEUNGOH		0.7035	BERKEMBANG	
TUNONG	0.7013	BERKEMBANG		
ULEE BLANG MANE	0.76	MAJU		
MUARA DUA	ALUE AWE	0.8468	MANDIRI	
	BLANG CRUM	0.7419	MAJU	
	BLANG POROH	0.7394	MAJU	
	COT GIREK KANDANG	0.7841	MAJU	
	CUT MAMPLAM	0.7314	MAJU	
	KEUDE CUNDA	0.8002	MAJU	
	LHOK MON PUTEH	0.7575	MAJU	
	MEUNASAH ALUE	0.721	MAJU	
	MEUNASAH BLANG	0.7289	MAJU	
	MEUNASAH MANYANG	0.7554	MAJU	
	MEUNASAH MEE	0.8117	MAJU	
	MEUNASAH MESJID	0.8529	MANDIRI	
	MNS. PANGGOI	0.7783	MAJU	
	PALOH BATEE	0.714	MAJU	
PAYA BILI	0.7035	BERKEMBANG		

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
	PAYA PUNTEUET	0,7581	MAJU
	UTEUNKOT	0.7892	MAJU
MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	0,8102	MAJU
	BATUPHAT TIMUR	0.8454	MANDIRI
	BLANG NALEUNG MAMEH	0.797	MAJU
	BLANG PANYANG	0,7171	MAJU
	BLANG PULO	0,8749	MANDIRI
	COT TRIENG	0.6952	BERKEMBANG
	MEUNASAH DAYAH	0,7063	BERKEMBANG
	MEURIA PALOH	0.7892	MAJU
	PADANG SAKTI	0.7843	MAJU
	PALOH PUNTI	0,7417	MAJU
	UJONG PACU	0.6921	BERKEMBANG

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2024

B. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik

Perkantoran pemerintahan gampong merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat gampong. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe. Kualitas perkantoran pemerintahan gampong yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.127

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Kondisi Kantor	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	52	54	64	64	61
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	10	11	1	1	2
3	Belum Memiliki Kantor	6	5	3	3	5
	Jumlah	68	68	68	68	68
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik	76.47	79.41	94.12	94.12	89.70

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2019 adalah sebesar 76.47% meningkat mencapai 94.12% di tahun 2022. Pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 89.70%, Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi kantor gampong kondisi rusak menjadi

bertambah menjadi 2 unit yaitu Gampong Kota Lhokseumawe dan Ulee Blang Mane. Sementara itu, terdapat 5 Gampong yang belum memiliki kantor pemerintah gampong yaitu Gampong Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Batuphat Timurn Cot Trieng. Berikut cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik per Kecamatan tahun 2019-2023.

Tabel 2.128
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	2019		2020		2021		2022		2023		
		Jumlah Gampong	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana
1	Banda Sakti	18	16	88,88	16	88,88	16	88,88	16	88,88	17	100
2	Muara Satu	11	6	54,54	7	63,63	10	90,91	10	90,90	16	88.89
3	Blang Mangat	22	17	72,72	18	95,45	21	95,45	21	95,45	20	90.91
4	Muara Dua	17	13	76,47	13	94,11	17	100	17	100	8	72.73
Jumlah		68	52	76,47	54	79.41	64	94,12	64	94.12	61	89.70

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 menjadi sebesar 76,47% namun di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 79,41% hingga mencapai 88,23% serta 94,11% pada tahun 2022. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pada tahun 2023 sedikit mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi 89.70%.

C. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Gampong

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Gampong dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah gampong sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Gampong digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong. Selain dana gampong sumber pendapatan gampong yang

diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada gampong menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.129
Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	49.971.344.117	40.846.685.523	44.587.713.353	43.990.585.700	45.048.128.300
2	Dana Desa (DD)	58.773.329.996	60.285.819.000	61.858.474.338	53.900.119.902	61.401.253.255
3	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	-	-	1.542.801.500	1.659.031.000	2.843.458.400
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	-	-	251.267.448	198.394.770	340.108.444
Jumlah		108.744.674.113	101.579.702.858	108.319.969.912	107.831.150.469	109.632.948.399

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada gampong berupa alokasi dana gampong mengalami peningkatan, pada tahun 2019 alokasi bantuan keuangan gampong sebesar Rp.108.744.674.113,- akan tetapi kembali mengalami penurunan di Tahun 2020 dan Tahun 2022. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Bagi hasil retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

D. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan

pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Lhokseumawe muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari Gampong, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.130
Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TP.PKK Kota Lhokseumawe	1	1	1	1	1
2	Jumlah TP.PKK Kecamatan se-Kota Lhokseumawe	4	4	4	4	4
3	Jumlah TP. PKK Gampong se Kota Lhokseumawe	68	68	68	68	68
4	Jumlah Kel PKK RW se-Kota Lhokseumawe	51	51	51	51	51
5	Jumlah Kel PKK RT	70	70	70	70	70
6	Jumlah Kel Dasawisma	17.077	17.077	17.077	17.077	17.077

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2019 hingga ke tahun 2023, sudah semuanya aktif. Namun tetap perlu perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah.

E. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.131
Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah seluruh Posyandu	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif		100	100	100	100	100

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2019-2023 sudah mencapai 100%. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Kampung KB Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana, sejak tahun 2016 Kota Lhokseumawe telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis kegiatan program Bangga Kencana secara lengkap mulai dari PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS dan sektor pembangunan lainnya di tingkat kampung (Pedukuhan/Desa). Hingga tahun 2023, di Kota Lhokseumawe telah terbentuk 52 Kampung KB Di tahun 2024 jumlah Kampung KB bertambah menjadi 68 Kampung KB.

Tabel 2.132
Perkembangan Kampung KB Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Kp. KB	Nama Gampong	Tahun dibentuk
1	Banda Sakti	1	Ujong Blang	2016
2	Banda Sakti	1	Keude Aceh	2017
3	Muara Dua	1	Lhok Mon Puteh	2017
4	Muara satu	1	Batuphat Timur	2017
5	Blang Mangat	1	Jambo Timu	2017
6	Banda Sakti	1	Kota Lhokseumawe	2023
7	Banda Sakti	1	Mon-Geudong	2023
8	Banda Sakti	1	Pusong baru	2023

No	Kecamatan	Jumlah Kp. KB	Nama Gampong	Tahun dibentuk
9	Banda Sakti	1	Kampung. Jawa Lhokseumawe	2023
10	Banda Sakti	1	Pusong Lama	2023
11	Banda Sakti	1	Nbanda Masen	2023
12	Banda Sakti	1	Jawa Baru	2023
13	Banda Sakti	1	Hagu barat Laut	2023
14	Banda Sakti	1	Kuta Blang	2023
15	Banda Sakti	1	Simpang Empat	2023
16	Banda Sakti	1	Hagu Teungeh	2023
17	Banda Sakti	1	hagu selatan	2023
18	Muara Dua	1	Blang Poroh	2023
19	Muara Dua	1	Utenkot	2023
20	Muara Dua	1	Mns. Mesjid	2023
21	Muara Dua	1	Panggoi	2023
22	Muara Dua	1	Mns. Alue	2023
23	Muara Dua	1	Alue Awe	2023
24	Muara Dua	1	Cot Girek	2023
25	Muara Dua	1	Mns. Manyang	2023
26	Muara Dua	1	Mns. Cut mamplam	2023
27	Muara Dua	1	Mns. Mee	2023
28	Muara Dua	1	Paya Bili	2023
29	Muara Dua	1	Keude Cunda	2023
30	Muara Dua	1	Paloh Batee	2023
31	Muara Satu	1	Mns. Dayah	2023
32	Muara Satu	1	Blang Panyang	2023
33	Muara Satu	1	Ujong Pacu	2023
34	Muara Satu	1	Cot Trieng	2023
35	Muara Satu	1	Meuria Paloh	2023
36	Muara Satu	1	Blang Naleung mameh	2023
37	Muara Satu	1	Batuphat Barat	2023
38	Muara Satu	1	Blang Pulo	2023
39	Muara Satu	1	Padang Sakti	2023
40	Muara Satu	1	Paloh Puntti	2023
41	Blang Mangat	1	Jeulekat	2023
42	Blang Mangat	1	Blang Weu Panjo	2023
43	Blang Mangat	1	Blang Cut	2023
44	Blang Mangat	1	Kuala	2023
45	Blang Mangat	1	Blang Teu	2023
46	Blang Mangat	1	Tunong	2023
47	Blang Mangat	1	Alue Liem	2023
48	Blang Mangat	1	Mesjid Peuntet	2023
49	Blang Mangat	1	Asan Kareung	2023
50	Blang Mangat	1	Ulee Blang mane	2023
51	Blang Mangat	1	Teungeh	2023
52	Blang Mangat	1	Kumbang Penteut	2023
53	Banda Sakti	1	Lancang Garam	2024
54	Banda Sakti	1	Tumpok teungeh	2024
55	Banda Sakti	1	Ulee Jalan	2024

No	Kecamatan	Jumlah Kp. KB	Nama Gampong	Tahun dibentuk
56	Banda Sakti	1	Ureun bayi	2024
57	Muara Dua	1	Blang Crum	2024
58	Muara Dua	1	Mns. Blang	2024
59	Muara Dua	1	Paya Peuntet	2024
60	Blang Mangat	1	Blang Buloh	2024
61	Blang Mangat	1	Blang peuntet	2024
62	Blang Mangat	1	Blang Weu Baroh	2024
63	Blang Mangat	1	Baloy	2024
64	Blang Mangat	1	Keude Peuntet	2024
65	Blang Mangat	1	Jambo Mesjid	2024
66	Blang Mangat	1	Mane Kareung	2024
67	Blang Mangat	1	Rayek Kareung	2024
68	Blang Mangat	1	Seuneobok	2024

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kampung KB, di setiap Kampung KB telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB. Di Kampung KB, selain dikembangkan berbagai kegiatan program Bangga Kencana bersama lintas sektor juga dikembangkan Rumah Data Kependudukan. Rumah Data Kependudukan yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB. Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenalkan pada masyarakat luas sebagai “Rumah Dataku” tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.

2.1.3.2.9 Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Lhokseumawe adalah data penumpang bis yang masuk Terminal.

Tabel 2.133
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Keluar	Masuk
2019	129.575	172.154	165.189
2020	13.207	27.068	26.575
2021	15.151	33.160	31.176
2022	15.330	41.980	36.650
2023	17.155	171.550	137.550

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024.

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Penurunan jumlah penumpang bis pada tahun 2020, akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum. Pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang dan pada tahun 2023 jumlah penumpang bis meningkat tajam dari tahun 2022.

B. Rasio Ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek didapat dari jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.134
Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Ijin Trayek	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah Penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
	Rasio Ijin Trayek	0,007	0,008	0,009	0.008	0.008

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Pada tabel di atas tahun 2019-2023 jumlah ijin trayek tetap sebanyak 1.636. Rasio ijin trayek pada tahun 2019 sebesar 0,007, Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,008 dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 0.009 sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021. Dan tahun 2023 jumlah ijin trayek tetap. Rasio ijin trayek dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.135
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	2.496	2.006	3.078	3.154	3.252

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat, yaitu sebanyak 2.496 unit pada tahun 2019 menjadi 3.252 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota

Lhokseumawe dikarenakan meningkatnya kesadaran untuk melakukan uji KIR.

D. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.136
Jumlah Terminal Bus
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Terminal Bus	3	3	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Terdapat dua terminal bus di Kota Lhokseumawe, yakni Terminal Keude Aceh yang merupakan Terminal Tipe C di Kecamatan Banda Sakti yang hanya melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan/atau pedesaan dan Terminal Kandang yang merupakan Terminal tipe A yang terdapat di Kecamatan Muara Dua yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum angkutan antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dan angkutan pedesaan.

E. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Tabel 2.137
Persentase Layanan Angkutan Darat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	2.558	3.845	3.195	3.612	3.682
2	Jumlah Penumpang angkutan darat	172.154	27.068	33.160	41.980	171.550
	Persentase layanan angkutan darat	1.48	14.20	9.63	8.60	2.15

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 1.48% pada tahun 2019 menjadi 2.15% di tahun 2023. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Lhokseumawe menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mempengaruhi persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan. Pada tahun 2023 persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan dari tahun 2022 karena jumlah penumpangnya mengalami kenaikan.

F. Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2023		2023
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	60	80	0	0	0	195	Buah	71.79
2	Cermin Tikungan	0	0	3	0	3	24	Unit	25.00
3	Marka Jalan	6.447	21.250	4.516	682	1.021	35.580	m ²	95.3
4	Traffic Light (APILL)	1	0	0	0	0	0	Unit	0
5	Warning Light	0	0	0	0	0	12	Unit	0,0
6	Guard Rall (Pagar Pengaman)	0	0	0	0	0	3.000	Meter	0,0
7	Halte	0	0	0	0	0	0	Unit	0,0
8	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	10	0	485	Titik	2.06

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan gampong belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan gampong juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan gampong bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kota, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada.

Jumlah Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Arah) yang ada di Kota Lhokseumawe masih belum bisa memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan. Dari 195 buah rambu dan RPPJ yang dibutuhkan baru terpenuhi sejumlah 140 atau sebesar 71.79% pada Tahun 2023. Jumlah rambu yang ada masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk kelancaran para pengguna jalan serta meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Cermin tikungan dibutuhkan pada persimpangan jalan yang tertutup untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraanya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL).

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. APILL sudah terpasang di setiap persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya sehingga telah cukup.

Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati. Warning light yang dibutuhkan Kota Lhokseumawe sebanyak 12 unit, namun satupun belum ada. Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kota Lhokseumawe yang sebagian berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardrail*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing/jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena belum tersedia dari sekitar 3000 meter jumlah kebutuhan.

G. Rasio Panjang per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.139
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Kendaraan	52.402	59.064	55.461	50.546	50.646
Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan		0.0078	0.0069	0.0074	0.0081	0.0081

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi, yakni 52.402 unit kendaraan pada tahun 2019 meningkat menjadi 59.064 unit kendaraan pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kendaraan, menjadi 55.461 unit. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Lhokseumawe. Jumlah kendaraan di kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah sebanyak 50.546 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 4.915 kendaraan dibanding tahun 2021. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan sedikit meningkat menjadi 50.646 unit.

H. Kinerja Jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau *Volume Capacity Ratio*, yaitu perbandingan antara volume lalu-

lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2020 dari 3 ruas jalan Kota yang diukur VC Rationya 0.9. Tiga ruas jalan kota yang diukur terletak Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140
VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota
Lhokseumawe Tahun 2020

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
1	Jl.Darussalam	0.81	D
2	JL.Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan)	0.99	E
3	JL.Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh)	1.05	F

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Jalan Darussalam memiliki tingkat pelayanan jalan dengan skor D yaitu arus mendekati tidak stabil, dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditelerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kecepatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan besar yang besar. Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan) memiliki tingkat pelayanan E yaitu kepadatan lalu lintas tinggi, pengemudi mulai merasakan kemacetan durasi pendek, sedangkan Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh) memiliki tingkat pelayanan F yaitu arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dan terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

A. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang *tercoverage* dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di Kota Lhokseumawe terkait layanan telekomunikasi. Data terkait layanan telekomunikasi didapatkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe..

Tabel 2.141
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas wilayah yang ter-coverage (km)					
2	Luas wilayah keseluruhan (Km)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06

Cakupan layanan Telekomunikasi

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan domain layanan SPBE akan dievaluasi dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.142
Nilai Indeks SPBE
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Indeks SPBE	1.60	1.60	1.54	1.54	2.35
		Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2019-2022 masuk dalam kategori kurang dan tahun 2021-2022 Nilai Indeks SPBE kota Lhokseumawe menurun menjadi 1.54 dari 1.60 di tahun 2019-2020. Tahun 2023, evaluasi

penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe menunjukkan kategori cukup dengan nilai Indeks SPBE 2.35.

C. Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan terselenggaranya SDI ini, dibutuhkan peran, kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 diatur pula mengenai penyelenggara SDI serta peran dan tugasnya. Pada tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai walidata, serta Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SDI ini, salah satunya untuk dapat menjalankan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data.

Dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Lhoskeumawe telah menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2024 juga telah ditetapkan Form Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe. Untuk penyajian dan pengelolaan data, Pemerintah Kota Lhkseumawe melakukan penginputan data pada portal Satu

Data Lhokseumawe yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku Walidata Kota Lhokseumawe, dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe selaku Produsen Data.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Peresentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 2.143
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	196	106	107	107	181
2	Jumlah Koperasi	391	207	208	208	312
	Persentase Koperasi Aktif	50.13	51.21	51.44	51.44	58.01

Sumber: Disperindagkop, 2024.

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2019-2022 menunjukkan nilai yang menurun. Dari 196 unit koperasi aktif di tahun 2019, turun menjadi 107 unit koperasi aktif pada tahun 2022. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tahun 2023, jumlah koperasi meningkat menjadi sebesar 181.

B. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha

BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

Tabel 2.144
Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Variabel	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Unit Simpan Pinjam	158	158	163	163	161
2	Koperasi Simpan Pinjam	6	6	6	4	2
3	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	-	1	5	6
4	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	-	-	10	12
Jumlah		164	164	170	172	181

Sumber: Disperindagkop, 2024.

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Namun untuk Koperasi Simpan Pinjam mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

C. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam

perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.145
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	5433	5563	5679	6292	6787
2	Jumlah seluruh UKM	5493	5623	5739	6353	6848
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98.90	98.93	98.95	99.04	99.11

Sumber: Disperindagkop, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2019 -2023 yaitu mencapai 6.787 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/ *craft*, dan jasa).

D. Nilai Omset UKM yang dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Lhokseumawe. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2019-2021 masih dibawah 100% namun tahun 2022-2023 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.146
Nilai Omset UKM yang dibina
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah UKM	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)		
		Tahun Dasar (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2019	5493		4.614.02	95.21
2020	5623		4.615.49	95.24
2021	5739	4.846.05	4.615.60	95.24
2022	6353		5.510.65	113.71
2023	6848		5.525.80	114.02

Sumber: Disperindagkop, 2024.

2.1.3.2.12 Pananaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya

penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Lhokseumawe banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan dengan morfologi perkotaan.

Tabel 2.147
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Investor PMA	0	2	1	1	1
2	Investor PMDN	152	434	432	459	412
Total		152	436	433	460	413

Sumber: DPMPSTSP Kota Lhokseumawe, 2024.

Jumlah Investor PMA di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari nol di tahun 2019 menjadi 2 unit di tahun 2020 dan turun menjadi 1 unit di tahun 2021-2023. Sedangkan jumlah Investor PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 152 unit dan di tahun 2020 menjadi 436 unit, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 433 unit. Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 460 unit. Dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 413 unit. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2020 dan 2022 mengalami peningkatan yang hingga sebesar 436 unit pada tahun 2020 dan 460 unit pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan total investor menjadi 433 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 jumlah Investasi PMDN sebesar 793 (milyar), di tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 1.268 (milyar) dan pada tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar) dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 1.107 milyar dan tahun 2023 menurun kembali sebesar 238 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.148
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PMA	0	2,402	508	19,250	0
2	PMDN	205,926	166,051	2.489,008	1.093,466	249,540
Total		205,926	168,453	2.489,517	1.112,716	249,540

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2024.

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.112.716.277.156,- dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 249.539.799.410,- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori : Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

C. Pelayanan Perizinan

Dengan adanya Peraturan tentang kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dampak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaku usaha diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam melakukan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri tanpa harus datang ke DPMPPT dan dapat dilakukan kapan saja karena OSS dapat di akses dimana saja dan kapan saja.
2. Pelaku usaha dimungkinkan mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen izin yang lain.

Dalam hal perizinan, kondisi pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.149
Pelayanan Perizinan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	izin	1952	1066	1174	2891	3349
2	Jumlah pengajuan perizinan	izin	2384	1749	1528	2901	3375
	Capain	%	81.88	60.95	76.83	99.65	99.22
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	3	21	5	9	22
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	3	21	5	9	22
	Capain	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	94	93	61	68	73
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	96	96	96	96	69
	Capain	%	97.91	96.87	63.54	70.83	105.79

Sumber: DPMPPTSP Kota Lhokseumawe, 2024.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku

berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.150
Organisasi Pemuda yang aktif
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	50	50	50	16	16
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	60	60	60	20	20
Persentase		83.3	83.3	83.3	80	80

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024

Jumlah organisasi olahraga di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 mengalami penurunan yaitu sebanyak 34 organisasi dari yang semula 50 organisasi menjadi 16 organisasi.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.151
Cakupan Pembinaan Olahraga
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	36	36	36	35	35
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	44	44	44	45	45
Persentase cakupan pembinaan olahraga		81,82	81.82	81.82	77.77	77.77

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2019-2023 terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 44. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 45. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan cabang olahraga yang dibina, yaitu..... Cakupan pembinaan olahraga di Kota Lhokseumawe belum mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar belum terbina dengan baik.

C. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.152
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelatih bersertifikat	53	53	53	60	60
2	Jumlah seluruh pelatih	146	146	146	87	87
	Persentase cakupan pelatih bersertifikat	36,3	36,3	36,3	68,9	68,9

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024

Kota Lhokseumawe memiliki 60 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2023 adalah 87. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

2.1.3.2.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Data yang dibutuhkan dalam

proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Kota Lhokseumawe serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

2.1.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Lhokseumawe secara bertahap.

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Tabel 2.153
Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah	34	34	34	34	34
Persentase PD yang menggunakan sandi		2.94	2.94	2.94	2.94	2.94

Sumber : Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Diharapkan untuk tahun berikutnya akan bertambah jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukkan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradenya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.154
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya
di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023

No	Kegiatan	Tahun
1	Teluk Samawi	2022
2	Pameran Budaya	2022
3	Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8	2023
4	Panteu Meuseuraya	2023
5	Pameran Budaya	2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari Tabel di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 terdapat 3 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruék Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dari tabel 2.149 di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

Tabel 2.156
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	1488	2037	1990	1990	1958
2	Jumlah populasi yang harus dilayani	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan		0.007	0.010	0.010	0.010	0.009

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2020 yang kemudian diikuti pula dengan penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2021. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.

B. Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.157
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	5749	6348	7625	8539	8539
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan (Eksemplar)	21.500	23.500	27.276	29.512	29.512
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		0.26	0.27	0.27	0.29	0.29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

C. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.158
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Umum/ Perpustakaan Daerah	15	15	15	15	15
2	Perpustakaan Sekolah	163	163	163	163	158
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	13	13	13	13	14
4	Perpustakaan Khusus	14	14	14	14	12
5	Perpustakaan Pesantren/Dayah	8	8	8	14	8
6	Jumlah Perpustakaan	213	213	213	219	207
7	Jumlah penduduk	207.202	188.713	189.941	191.396	196.067
Rasio jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk		1,03	1,13	1,12	1,14	1,06

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2019-2023, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan, yaitu dari 1,03 menjadi 1,06. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Tahun 2021 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 1,12, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1,14 karena penambahan jumlah penduduk. Tahun 2023 jumlah perpustakaan berkurang sehingga rasio jumlah perpustakaan menjadi 1,06.

D. Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 307.355 jiwa pengunjung.

Tabel 2.159
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengunjung	1488	2037	1990	1990	1958
2	Rata-rata jumlah pengunjung	1892.6				

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Lhokseumawe. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan.

E. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Terkait pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Kota Lhokseumawe belum memilikinya.

2.1.3.2.18 Kearsipan

A. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel 2.160
Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Thaun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	1	10	15	8	8
2	Jumlah OPD	34	34	34	34	34
Persentase		2.94	29.41	44.11	23.53	23.53

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, pada tahun 2019 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku sebesar 2.94% atau 1 OPD dari Jumlah 34 OPD. Persentase pengelolaan arsip ini meningkat dikarenakan jumlah OPD

yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 menjadi 15 OPD. Dan pada tahun 2022-2023 menurun menjadi 8 OPD.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Tabel 2.161
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Jumlah Pengunjung				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kunjungan wisata	325.233	293.680	150.297	245.374	321.499

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Lhokseumawe di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

B. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.162
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam		
a.	Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti	
b.	Pulau semadu	Kecamatan Muara Satu	
c.	Pantai pulo daruet	Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata Budaya/Spiritual		
a.	Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)	
b.	Gua Jepang cot Panggoi	Gp. Blang Panyang (Muara Satu)	
c.	Meriam Belanda	Gp. Kuta Blang (Banda Sakti)	
d.	Tugu Pahlawan TKR	Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)	
e.	Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat)	
f.	Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)	
g.	Mon tujuh	Gp. Mesjid (Blang Mangat)	
h.	Makam Tgk. Dilhokseumawe	Gp. Banda Masen (Banda Sakti)	
i.	Makam Tgk. Chik Ditunong	Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)	
j.	Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)	
k.	Makam Mualim Taufik Shaleh	Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)	
l.	Makam Putroe Neng	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
m.	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
n.	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
o.	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
p.	Makam Tgk. Chik Buket Krueng	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
q.	Museum P. Ramli	Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan		
a.	Reservoir (Waduk)	Gp. Pusong (Banda Sakti)	
b.	Taman Riyadah	Kecamatan Banda Sakti	
c.	Taman Mangat Cerita	Kecamatan Blang Mangat	
d.	Waduk Jeulikat	Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2024.

C. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Lhokseumawe. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir 2019-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2019 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 5.56%. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 4.45%, namun di tahun 2021-2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 10.63% di tahun 2023

Tabel 2.163
PAD Sektor Pariwisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel	268.149.000	105.194.000	287.803.500	534.054.623	744.194.756
2	Pajak Restoran	3.129.727.796,	2.775.990.026	3.587.507.600	5.563.411.570	6.139.818.064
3	Pajak Hiburan	13.600.000	48.524.600	170.092.200	218.205.800	348.147.200
4	Total Sektor Pariwisata	3.411.476.796	2.929.708.626	4.045.403.300	6.315.671.993	7.232.160.020
5	Total PAD	61.401.722.784	65.875.904.859	62.415.913.242	68.212.506.871	68.047.614.286
6	Persentase (%)	5.56	4.45	6.48	9.26	10.63

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024 Hasil Olahan 2024

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 merupakan dampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan jam operasional objek wisata ataupun penutupan tempat wisata untuk sementara.

2.1.3.3.2 Pertanian

A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota

Lhokseumawe sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.164
Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi (Ton)	9.948	9.688	5.957	6.859	7294.71
2	Luas Panen Padi (Ha)	2718	1828	1083	1247	1326.31
Produktivitas Lahan (Ton/Ha)		3.7	5.3	5.3	5.5	5.5

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, DKPPP Kota Lhokseumawe, 2024.

Pada tahun 2019 hingga 2021 produksi padi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Tahun 2019 produksi padi mencapai 9.948 ton dan terus menurun menjadi 5.957 ton di tahun 2021. Tahun 2019 luas lahan baku sawah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu 1.102,34 Ha dari luasan sebelumnya 2.050 Ha, penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi padi.

Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Lhokseumawe. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Namun pada tahun 2022-2023 produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia.

2.1.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Lhokseumawe. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase

rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

Tabel 2.165
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga penggun listrik	40.828	47.945	49.976	51.460	53.549
2	Jumlah rumah tangga	44.165	47.620	47.726	55.661	57.755
Persentase rumah tangga		92.44	100.7	104	92.45	92.71

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2024

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe sebesar 92.44% di tahun 2019 dan meningkat menjadi 100.7% di tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 104% dan turun di tahun 2022 menjadi 92.45% dan meningkat kembali menjadi 92.71 di tahun 2023. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor kenaikan jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN yakni ada rumah tangga yang memasang meteran lebih dari satu..

B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.166
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Daya Listrik terpasang	240	240	240	240	240
2	Jumlah kebutuhan	86,48	94,00	106.72	111.42	117.07
Rasio ketersediaan daya listrik		2.78	2.55	2.25	2.15	2.05

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2024

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

2.1.3.3.4 Perdagangan

A. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik adalah nilai ekspor netto.

Tabel 2.167
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Ekspor Neto	(1.852.822,83)	(1.949.696,13)	(1.715.289,13)	(1.140.393,52)	(901.791,90)
2	Persentase nilai Ekspor Neto	-20,82	-21,99	-18,20	-11,11	-8,07

Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe 2019-2023

Dari tahun 2019-2023, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor.

B. Pendapatan Sektor Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.168
Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	662.082.500	520.207.500	312.692.500	464.260.000	370.105.000
2	Retribusi Pelayanan Pasar	244.378.500	167.900.000	746.525.000	708.311.000	922.465.000
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000	3.345.600	14.449.500	11.323.000	12.535.000
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	952.740.000	650.937.000	30.217.000	41.400.000	57.750.000
Jumlah		1.859.223.019	1.342.392.120	1.103.886.021	1.225.296.022	1.362.857.023

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024 Hasil Olahan 2024

Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,23% dari tahun lalu dengan nilai kenaikan sebesar Rp 137.561.001. Peningkatan terbesar dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan kenaikan sebesar 39,49% dan retribusi pelayanan pasar sebesar 30,23%, dilanjutkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan peningkatan mencapai 10,70%. Penurunan jumlah retribusi persampahan sebesar Rp 94.155.000 atau sebesar 20,28%. Dampak Pandemi Covid-19 di sektor perdagangan antara lain penurunan aktivitas perdagangan di pasar.

2.1.3.3.5 Perindustrian

A. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.169
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	25	17	25	40	43
2	Total Kelompok Pengrajin	101	87	96	107	107
Persentase bina kelompok pengrajin		24,75	19,54	26,04	37,38	40,18

Sumber: Disperindagkop Kota Lhokseumawe, 2024

Pada tahun 2019 terdapat 25 kelompok pengrajin dan angka tersebut menurun menjadi 17 kelompok pada tahun 2020. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 mencapai 24,75%, dan angka tersebut menurun menjadi 19,54 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 jumlah kembali menjadi 25. Pada tahun 2022-2023 persentase bina kelompok pengrajin meningkat signifikan menjadi 40.18% hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2.1.3.3.6 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Lhokseumawe sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.170
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	4.424	9.725	4481	4.870	13.119
2	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	3.470	3.350	3.400	8.065	1.995
Total Produksi (Ton)		7.894	13.075	7.881	8.552	15.114

Sumber: LDA 2019-2024, DKPPP 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat total produksi perikanan tangkap dan budidaya Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 meningkat. Total produksi ikan tahun 2019 tercapai 7.894 Ton dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 15.114 ton.

2.1.3.4 Aspek Penunjang Urusan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJP yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2.171
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Lhokseumawe telah ada berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2.172
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Lhokseumawe. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2017-2022, RPJMD ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kemudian untuk tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah ditetapkan Dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen

yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Qanun. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 telah ditetapkan

Tabel 2.173
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Perwal	Perwal	Perwal	Perwal	Perwal
		No	No 21	No.51	No.24	No 17
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2018	2019	2020	2021	2022

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Qanun dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa Qanun yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

D. Tersedianya RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel 2.174
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan
dengan PERDA Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

Dokumen RTRW yang berlaku 2019-2023 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2013-2033.. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

E. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.175
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	301	306	182	152	183
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun	307	301	189	189	182
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		98.04	101,6	96.29	80.42	100

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2019-2023 Fuktuatif. Kecenderungan OPD memasukkan byk program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD

lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKPD. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2019 ke tahun 2023, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.1.3.4.2 Keuangan

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.176
Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

B. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase SILPA Kota Lhokseumawe

menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2021 dan SILPA terkecil di tahun 2022.

Tabel 2.177
Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
2019	16.390.941.983,89	947.061.755.758,79	1.73
2020	42.045.667.332,97	898.210.311.849,29	4.68
2021	52.399.883.518,38	879.310.221.282	5.96
2022	10.541.034.674,37	874.851.664.000	1.20
2023	37.480.808.630	798.260.907.647	4.70

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

C. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu senilai 30,38% dari total APBD Kota Lhokseumawe. Sedangkan di tahun 2020-2021 persentase belanja pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja urusan pendidikan meningkat karena adanya insentif pendidikan PAUD, kesejahteraan insentif GTT/PTT, serta inklusi insentif GPK (Guru Pendamping Khusus). Kemudian di tahun 2021 ada kenaikan di satuan BOS Nasional untuk jenjang SD dan SMP serta adanya bantuan DAK fisik untuk bidang SD dan SMP.

Tabel 2.178
Persentase Belanja Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
2019	215.589701.810,79	947.061.755.758,79	22.76
2020	199.342.253.650,99	898.210.311.849,29	22,19
2021	194.345.855.680	879.310.221.282	22.10
2022	195.258.081.775	874.851.664.000	22.32
2023	177.628.068.026	798.260.907.647	22.25

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

D. Perbandingan Belanja Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Lhokseumawe, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2019-2020, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Lhokseumawe ini bersifat fluktuatif dengan belanja langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2019 dan belanja tidak langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2020.

Tabel 2.179
Proporsi Belanja Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2020

Variabel	2019	2020
Jumlah Belanja Langsung	500.041.625.906	449.394.961.057
Total APBD	947.041.625.906,79	898.210.311.849,29
Persentase	52,80	50,03
Jumlah Belanja Tidak Langsung	447.020.129.852	448.815.350.792,29
Total APBD	947.061.755.758,79	898.210.311.849,29
Persentase	47,20	49,97

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 0503708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 2.180
Proporsi Belanja Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2020

Variabel	2021	2022	2023
Belanja Operasi	590.366.995.636	605.522.237.180	595.256.623.128
	67.14	69.21	74.57
Belanja Modal	168.374.880.958	156.583.508.120	82.331.873.436
	19.15	17.90	10.31
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	3.000.000.000	52.650.368
	0.51	0.34	0.01
Belanja Transfer	116.068.344.688	109.745.918.700	120.619.760.715
	13.20	12.54	15.11
Total APBD	879.310.221.282	874.851.664.000	798.260.907.647

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

E. Indeks Penelolan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

A. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total Struktural.

Tabel 2.181
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	81	56	45	0	37
2	Jumlah total struktural	518	495	513	305	208
	Persentase	15.64	11.31	8.77	0	17.78

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus menurun dari tahun 2019 sejumlah 15,64% sampai dengan tahun 2022 menjadi 0%. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,78%. Jika dicermati pada tabel di atas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.

B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

Tabel 2.182
Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	32	32	32	32

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi

pemerintah di Kota Lhokseumawe sebanyak 26 orang. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tabel 2.183
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.624	1.686	1770	1.939	1.749

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 1.624 orang. Pada tahun 2020 angka tersebut bertambah menjadi 1.686 orang dan meningkat kembali pada tahun 2021 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi sebesar 1.770 orang, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2021-2022 jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2023 jumlah ini kembali turun menjadi 1.749 orang hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Jabatan Fungsional sebagian besar pada Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD).

Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampingan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

D. Penilaian Sistem Merit

Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2023 pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai buruk pada capaian penerapan sistem merit.

Tabel 2.184
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

No	Aspek	Maksimal	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	27.5	2.5
2	Pengadaan	20	8
3	Pengembangan Karir	32.5	-
4	Promosi dan Mutasi	22.5	10
5	Manajemen Kinerja	30	5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17.5	7.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	4	-
8	Sistem Informasi	8	-
		Nilai Capaian	33
		Sebutan	Buruk

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.

Berdasarkan hasil penilain tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, penyelenggaraan diklat, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

E. Penilaian Indeks Profesional ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan

sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut :

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30%

dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan

- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi diatas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah.

Tabel 2.185
Indeks Profesionalitas ASN
di Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
21.4	25.7	24	5	36.26	Sangat Rendah

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2023 indeks profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe sebesar 36.26 sehingga masuk pada kategori sangat rendah.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

A. Inovasi

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik

pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.186
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66

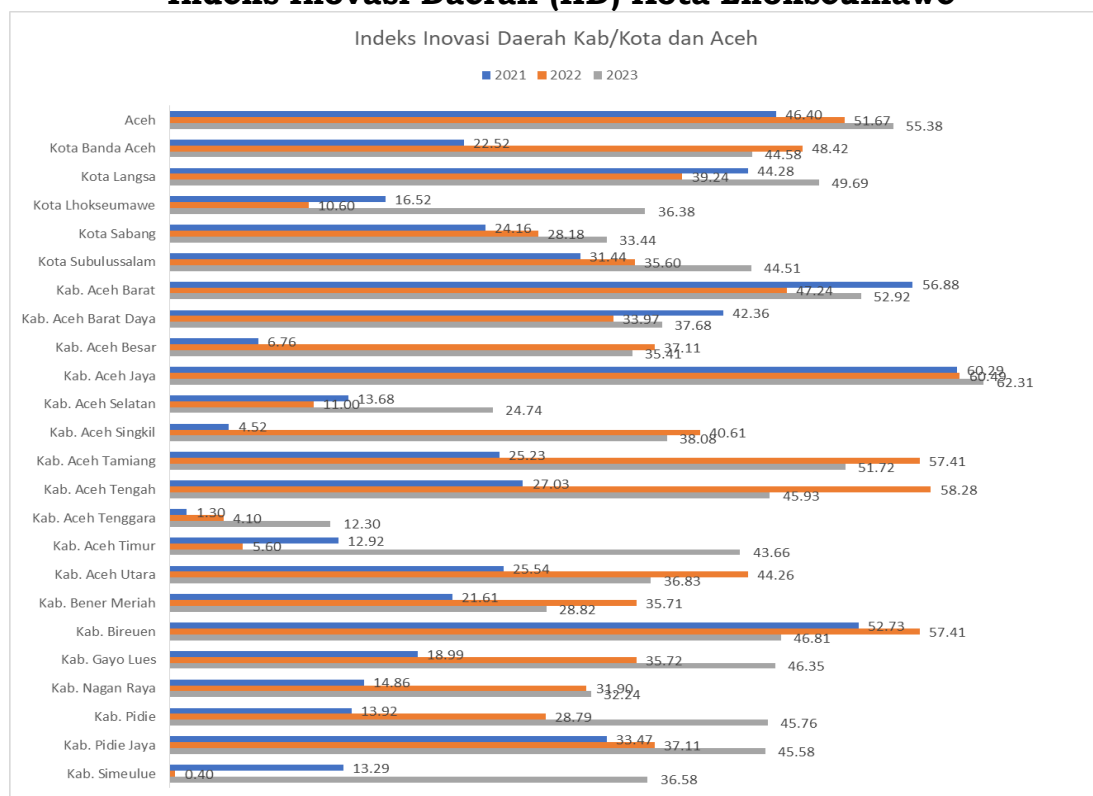
No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVA)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

B. Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 36,38 berada pada peringkat ke 83 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong dalam kelompok pemerintah kota yang inovatif. IID tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang pada saat itu IID Kota Lhokseumawe sebesar 10,60 dan berada pada peringkat ke 91 di Indonesia. Selanjutnya berikut ini merupakan posisi peringkat IID Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 s.d 2023.

Gambar 2.35
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe



Sumber : SK Kemendagri tentang IID 2021-2023 (diolah)

2.1.3.4.5 Pengawasan

A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel, dimana di tahun 2019-2023 telah berada pada level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.187
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2024

B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan. Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.188
Capaian Tingkat Maturitas SPIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2 2.314	Level 2 2.314	Level 3 3.031

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2024

C. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama yaitu 1. Perencanaan dengan penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Kapabilitas dengan penilaian atas komponen terhadap area-area kepemimpinan, kapabilitas, SDM, kemitraan dan proses pengelolaan risiko. 3. Hasil dengan penilaian atas komponen aktivitas penanganan risiko dan outcome. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2022 masih sama yaitu level 2 dengan nilai 2,092. Dan pada tahun 2023 masih berada pada level 2 namun dengan nilai 2.832 meningkat sedikit dari tahun 2022.

D. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam

organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar kapabilitas pengelola risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan dan pilar penanganan kejadian korupsi. Untuk tahun 2021-2022 IEPK Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan nilai 2,276. Untuk tahun 2023 IEPK Kota Lhokseumawe masih berada pada level 2 dengan nilai 2.800 meningkat dari tahun 2022.

E. Indeks Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

Tabel 2.189
Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SPI KPK	N/A	N/A	66,33	70,94	69,44

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi 69.44.

2.1.3.4.6 Sekretariat DPRK

A. Pesentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting

karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Tabel 2.190
Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	8	7	7	4	5
2	Jumlah Prolegda	17	21	17	10	8
	Persentase	47.06	33.33	41.18	40.00	65.50

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2024

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2019 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 47.06% dan di tahun 2020 semakin menurun menjadi 33.33%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%, walaupun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.00% dan tahun 2023 meningkat menjadi 65.50%.

2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks reformasi hukum. Hasil capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.191
Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	C 41.23	C 44.03	C 45.36	CC 54.79
2	Nilai SAKIP	CC 54.87	CC 55.00	CC 55.40	CC 55.80	B 60.18
3	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	B- 3.33	D 1.87
4	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	55.13

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2024

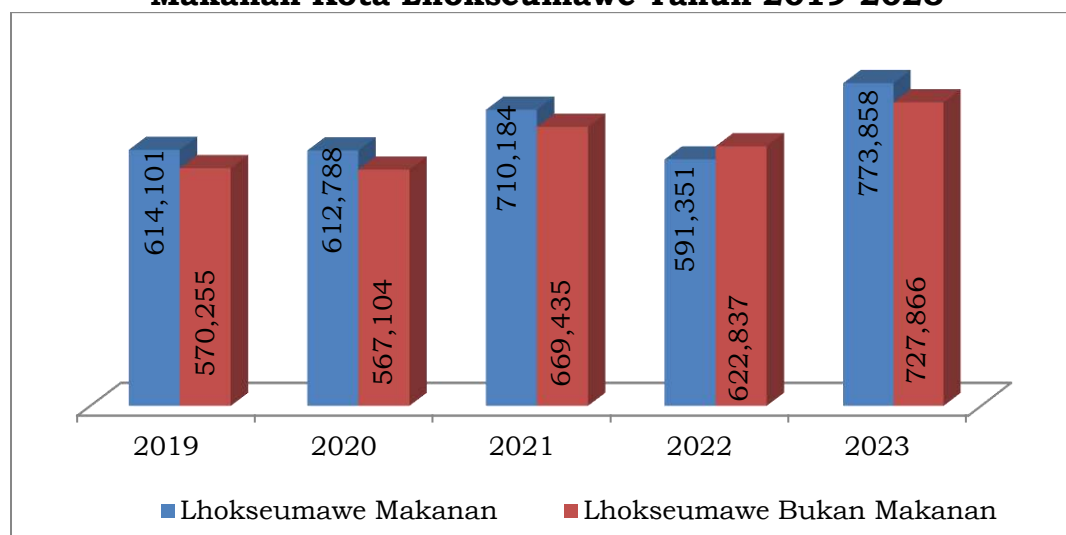
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Gambar 2.36
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Menurut Makanan dan Non Makanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



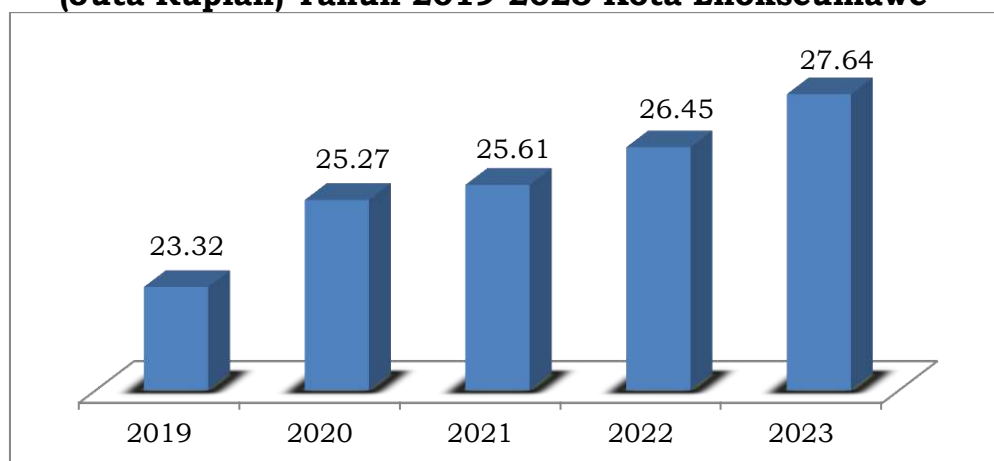
Sumber : BPS Nasional, 2024

Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan makanan dan non makanan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Pengeluaran makanan pada masyarakat Kota Lhokseumawe lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Hal ini sama dengan Propinsi Aceh, sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita nasional untuk non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

B. Pengeluaran Konsimsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga. Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan representasi mengenai gambaran tingkat pendapatan per kapita suatu masyarakat, sehingga informasi mengenai konsumsi rumah tangga per kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.37
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
(Juta Rupiah) Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita meningkat sebesar 4,32 juta rupiah selam kurun waktu 5 tahun, dari 23.32 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 27.64 juta rupiah di tahun 2023. Konsumsi rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 1.44 juta rupiah dalam 5 tahun. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga per-kapita tahun 2023 sebesar 4.49 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3.28 persen.

C. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah pinjaman terhadap simpanan nasabah di bank. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2019 rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum sebesar 1.32 kemudian mengalami penurunan hingga sebesar 0.99 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 angka ini mengalami

peningkatan menjadi 1.64, mengalami penurunan menjadi 0.76 di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 1.58.

Tabel 2.192
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Bank Umum
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Juta)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pinjaman di bank	5.354.703.	5.683.259	3.870.255	5.001.633	4.352.104
2	Dana pihak ketiga di bank	4.066.811	5.730.123	2.354.064	6.608.741	2.739.776
	Persentase	1,32	0,99	1,64	0,76	1,58

Sumber : Bank Indonesia, 2024

D. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 47.21%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.193
Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk usia <15 th +usia>64th	70.111	60.029	59.536	59.668	62.875
2	Penduduk usia 15-64	137.091	128.684	130.405	131.728	133.192
	Rasio Ketergantungan	51.14	46.65	45.65	45.30	47.21

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tahun 2019-2023, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2019 angka rasio ketergantungan mencapai 51.14%, dan mengalami pnurunan pada tahun 2020, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2021 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa

beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Lhokseumawe semakin berkurang setiap tahunnya.

E. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah banyaknya jenis pelanggaran/kejahatan yang disidik oleh Polresta Kota Lhokseumawe. Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Lhokseumawe. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat.

Tabel 2.194
Jumlah Tindak Krinimalitas
di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	2022	2023
1	Pencurian	158	168
2	Penganiayaan	177	99
3	Curanmor	90	62
4	KDRT	23	16
5	Pembunuhan	0	2
6	Penggelapan	62	43
7	Pemerasan	3	3
8	Perkosaan	13	9
9	Narkoba	38	106
10	Perusakan	21	8
11	Penipuan	124	59
12	Perzinaan	3	2
13	Perjudian	21	2
14	Lain-lain	134	106
Jumlah Tindak Kriminal		867	685

Sumber : LDA, 2024

Dengan melihat kenyataan tersebut, kedepan diupayakan untuk meningkatkan patroli terpadu, meningkatkan pembinaan mental, dan menggiatkan pengamanan swadaya.



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - III

GAMBARAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

RPJMK

LHOKSEUMAWE

2025 - 2029

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan yang berisi tentang kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan; perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, pada bab ini akan menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis data terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). APBK

pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBK merupakan salah satu bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang akan dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing dalam APBK. Dalam rangka analisis kinerja keuangan Kota Lhokseumawe, maka akan diuraikan kinerja keuangan masa lalu, yaitu kinerja keuangan Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023.

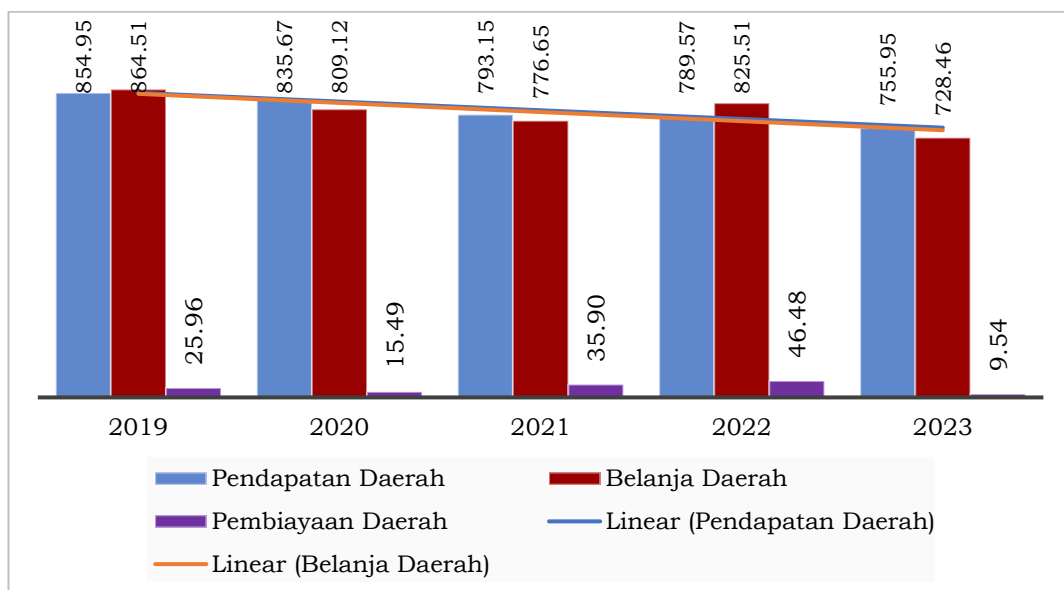
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Kinerja pelaksanaan APBK Lhokseumawe dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun (2019-2023) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1.
Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Milyar Rp)



Sumber: Laporan Realisasi APBK Lhokseumawe 2019-2023 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2023 realisasi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Pendapatan Kota Lhokseumawe mencapai Rp.854,95 Milyar mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi Rp.755,95 Milyar dengan rata-rata pertumbuhan minus 2,43% per tahunnya. Seiring dengan penurunan pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Rp. 864,51 Milyar mengalami penurunan hingga tahun 2023

menjadi Rp.776,65 Milyar, pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp.825,51 Milyar, namun pada tahun 2023 belanja daerah turun kembali menjadi Rp.728,46 Milyar. Secara keseluruhan penurunan belanja daerah minus 3,37 persen setiap tahunnya.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (audit BPK RI), realisasi APBK terendah selama periode 2019-2023 terjadi pada tahun 2021 yaitu 88,41 persen atau sebesar Rp.782.796.321.455,- dari anggaran sebesar Rp.885.454.861.282,- dengan SILPA mencapai Rp.52.399.883.518,-. Realisasi APBK tertinggi tercatat pada tahun 2022 mencapai 94,37 persen atau sebesar Rp.827.509.672.418,- dengan SILPA sebesar Rp.10.541.034.674,-. Lebih jelasnya untuk mengetahui target dan realiasi APBK Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2019	948,061,755,758	865,514,148,988	91.29	16,390,941,983
2020	899,710,311,849	810,615,344,069	90.10	42,045,667,332
2021	885,454,861,282	782,796,321,455	88.41	52,399,883,518
2022	876,851,664,000	827,509,672,418	94.37	10,541,034,674
2023	800,260,907,647	729,461,011,932	91.15	37,029,821,414

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Audited)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 27 sampai dengan 28), diuraikan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selama periode tahun 2019-2023 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,43 persen, belanja daerah Kota Lhokseumawe juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,37 persen, dan pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan negatif 18,14 persen. Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.	PENDAPATAN DAERAH	854,946,044,978	835,667,970,983	793,150,537,641	789,566,096,080	755,949,798,672	(2.43)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	61,401,722,785	65,875,904,859	62,415,913,243	68,212,506,871	67,901,946,334	2.03
4.1.1.	Pajak Daerah	28,474,959,318	35,168,842,182	30,115,978,587	40,032,463,310	39,586,915,813	6.81
4.1.2.	Retribusi Daerah	3,756,566,496	3,405,689,671	3,073,325,409	3,022,508,323	3,733,420,512	(0.12)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,108,664,333	4,327,896,492	4,174,105,667	4,350,084,432	3,236,124,545	(8.73)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24,061,532,638	22,973,476,514	25,052,503,580	20,807,450,806	21,345,485,464	(2.37)
4.2.	Pendapatan Transfer	781,658,811,277	732,812,691,124	706,642,912,398	721,353,589,208	687,825,852,338	(2.53)
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	675,462,239,754	628,914,528,526	607,680,159,000	622,773,568,549	630,906,590,568	(1.36)
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	<i>34,791,220,312</i>	<i>43,303,103,998</i>	<i>28,117,593,050</i>	<i>25,508,814,157</i>	<i>25,249,350,413</i>	(6.21)
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>469,471,445,000</i>	<i>425,306,246,000</i>	<i>418,626,656,000</i>	<i>415,683,229,737</i>	<i>436,369,459,000</i>	(1.45)
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>61,264,233,147</i>	<i>35,308,708,637</i>	<i>38,447,374,289</i>	<i>33,292,658,226</i>	<i>22,632,985,556</i>	(18.06)
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>41,770,742,993</i>	<i>46,319,182,891</i>	<i>44,474,034,323</i>	<i>59,943,665,527</i>	<i>79,522,976,344</i>	13.74
	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	<i>10,018,090,000</i>	<i>18,391,468,000</i>	<i>16,156,027,000</i>	<i>34,445,081,000</i>	<i>5,730,566,000</i>	(10.57)
	<i>Dana Desa</i>	<i>58,146,508,302</i>	<i>60,285,819,000</i>	<i>61,858,474,338</i>	<i>53,900,119,902</i>	<i>61,401,253,255</i>	1.10
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106,196,571,523	103,898,162,598	98,962,753,398	98,580,020,659	56,919,261,770	(11.73)
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	<i>26,704,399,172</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>27,269,583,603</i>	<i>29,261,429,715</i>	<i>34,250,277,597</i>	5.10
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi (Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA))</i>	<i>79,492,172,351</i>	<i>72,678,056,143</i>	<i>71,693,169,795</i>	<i>69,318,590,944</i>	<i>22,668,984,173</i>	(22.17)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,885,510,916	36,979,375,000	24,091,712,000	-	222,000,000	(54.89)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	11,885,280,000	21,979,375,000	8,899,544,000	-	222,000,000	(54.89)
4.3.2.	Pendapatan Lainnya	230,916	15,000,000,000	15,192,168,000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	854,946,044,978	835,667,970,983	793,150,537,641	789,566,096,080	755,949,798,672	(2.43)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
5.	BELANJA DAERAH	864,514,148,988	809,115,344,069	776,651,681,455	825,509,672,418	728,461,011,932	(3.37)
5.1.	Belanja Operasi	553,472,179,764	519,576,952,633	521,495,267,967	576,374,939,708	548,509,273,989	(0.18)
5.1.1.	Belanja Pegawai	288,883,934,479	283,796,919,084	283,308,654,473	304,916,122,038	316,584,344,048	1.85
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	250,663,500,785	203,976,543,666	169,787,596,364	185,425,254,292	177,812,072,024	(6.64)
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	200,000,000	470,000,000	
5.1.5.	Belanja Hibah	6,228,895,000	7,780,367,500	26,757,974,805	36,702,542,385	22,501,686,262	29.29
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	7,695,849,500	24,023,122,383	41,641,042,325	49,131,020,993	31,141,171,655	32.26
5.2.	Belanja Modal	201,817,865,446	177,257,389,327	137,196,135,419	142,251,751,256	60,336,467,761	(21.45)
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	23,371,711,743	16,998,498,043	8,819,863,140	13,713,809,182	-	(12.48)
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,971,085,676	26,266,396,053	27,807,298,336	21,363,441,916	15,637,989,339	(10.33)
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,593,984,049	109,317,854,810	34,414,916,470	40,945,930,770	21,923,145,455	(8.72)
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111,675,243,022	20,826,592,200	62,684,960,792	62,614,371,138	18,771,759,227	(30.00)
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,205,840,956	3,848,048,221	3,469,096,681	3,614,198,250	4,003,311,800	(5.12)
5.3.	Belanja Tak Terduga	127,952,364	10,823,441,265	3,720,021,430	2,134,850,082	52,650,368	(16.27)
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	127,952,364	10,823,441,265	3,720,021,430	2,134,850,082	52,650,368	(16.27)
5.4.	Belanja Transfer	109,096,151,414	101,457,560,844	114,240,256,639	104,748,131,372	119,562,619,814	1.85
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	1,794,068,948	1,820,631,270	3,183,566,844	21.07
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	109,096,151,414	101,457,560,844	112,446,187,691	102,927,500,102	116,379,052,970	1.30
	JUMLAH BELANJA	864,514,148,988	809,115,344,069	776,651,681,455	825,509,672,418	728,461,011,932	(3.37)
	Surplus / (Defisit)	(9,568,104,011)	26,552,626,914	16,498,856,185	(35,943,576,338)	27,488,786,740	(223.50)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	25,959,045,995	15,493,040,419	35,901,027,333	46,484,611,013	9,541,034,674	(18.14)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	48,484,611,013	10,541,034,674	(17.12)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	48,484,611,013	10,541,034,674	(17.12)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000	2,000,000,000	1,000,000,000	-
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000	2,000,000,000	1,000,000,000	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	16,390,941,984	42,045,667,333	52,399,883,518	10,541,034,674	37,029,821,414	17.70

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer; yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari pendapatan hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 Audited diketahui pencapaian realisasi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe mengalami tren penurunan atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.854.946.044.978,- sedangkan pada tahun 2023 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.755.949.798.672.-. Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	921,102,709,764	854,946,044,978	92.82	17.62
2020	882,717,271,430	835,667,970,983	94.67	(2.25)
2021	843,409,193,949	793,150,537,641	94.04	(5.09)
2022	828,367,052,987	789,566,096,080	95.32	(0.45)
2023	768,471,407,647	755,949,798,672	98.37	(4.26)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Adapun rincian target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 diuraikan sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Terjadi tren peningkatan PAD Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.68.212.506.871,-. Jika dilihat pertumbuhan pertahunnya, hanya pada tahun 2020 dan 2022 yang mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 7,29 persen dan 9,29 persen, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya, begitu juga dengan tahun 2021 dan 2023 pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe juga tumbuh negatif. Akan tetapi jika dilihat tren pertumbuhannya selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe tumbuh positif mencapai 2,03 persen per tahun. Lebih jelas tentang perkembangan pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	76,178,941,193	61,401,722,785	80.60	(6.39)
2020	70,342,465,350	65,875,904,859	93.65	7.29
2021	91,165,667,619	62,415,913,243	68.46	(5.25)
2022	88,262,140,311	68,212,506,871	77.28	9.29
2023	75,120,033,625	67,901,946,334	90.39	(0.46)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Capaian realisasi PAD Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019-2023 didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah, dimana secara kumulatif kontribusinya terhadap PAD Kota Lhokseumawe mencapai 53,22 persen. Kontribusi kedua disumbangkan oleh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencapai 35,06 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 6,51 persen dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 5,22 persen. Secara umum kontribusi komponen PAD Kota Lhokseumawe diuraikan sebagai berikut.

A.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah Kota Lhokseumawe terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mencapai Rp.173.379.159.210,-. Pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan tren positif selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 6,81 persen pertahun. Meski demikian Pemerintah Kota Lhokseumawe harus tetap melakukan upaya yang komprehensi dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah. Untuk melihat perkembangan anggaran dan realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	34,282,500,000	28,474,959,318	83.06	(15.89)
2020	35,237,500,000	35,168,842,182	99.81	23.51
2021	48,791,981,138	30,115,978,587	61.72	(14.37)
2022	51,002,250,000	40,032,463,310	78.49	32.93
2023	34,060,750,000	39,586,915,813	116.22	(1.11)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp.40.032.463.310,-. Namun jika dilihat pencapaian realisasi Pajak Daerah selama lima tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 116,22 persen. Dari sisi pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir, tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 32,93 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan minus 15,89 persen.

A.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota Lhokseumawe

untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Secara umum perkembangan anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	4,719,823,350	3,756,566,496	79.59	21.76
2020	4,471,983,350	3,405,689,671	76.16	(9.34)
2021	4,319,500,000	3,073,325,409	71.15	(9.76)
2022	3,996,000,000	3,022,508,323	75.64	(1.65)
2023	4,087,500,000	3,733,420,512	91.34	23.52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019 s.d 2023) realisasi Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai Rp.3.756.566.496,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp.4.719.823.350,- atau 79,56 persen, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.022.508.323,- atau 75,64 persen dari target yang dianggarkan pada tahun tersebut sebesar Rp.3.996.000.000,-. Dari sisi pertumbuhan pertahunnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 23,52 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan minus 9,76 persen.

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Capaian realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe dari Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berasal dari Bagian Laba (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang flukutif. Realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp.5.108.664.333,- dan yang terendah pada tahun sebesar

Rp.3.236.124.545,-. Dari sisi pertumbuhan tiap tahunnya juga berfluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 4,22 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang menunjukkan pertumbuhan negatif 25,61 persen. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	6,000,000,000	5,108,664,333	85.14	0.15
2020	5,200,000,000	4,327,896,492	83.23	(15.28)
2021	5,200,000,000	4,174,105,667	80.27	(3.55)
2022	5,200,000,000	4,350,084,432	83.66	4.22
2023	5,200,000,000	3,236,124,545	62.23	(25.61)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

A.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah Rp.114.240.449.001,-. Pencapaian realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut bersumber dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan; Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP; Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah; dan Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2021

sebesar Rp.25.052.503.580,- dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.20.807.450.806,-. Tren pertumbuhan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 2,37 persen pertahun. Lebih lanjut untuk melihat perkembangan anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	31,176,617,843	24,061,532,638	77.18	2.17
2020	25,432,982,000	22,973,476,514	90.33	(4.52)
2021	32,854,186,481	25,052,503,580	76.25	9.05
2022	28,063,890,311	20,807,450,806	74.14	(16.94)
2023	31,771,783,625	21,345,485,464	67.18	2.59
Total	149,299,460,260	114,240,449,001	76.52	(2.37)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

B. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat, dan Transfer Antar Daerah. Realisasi pendapatan transfer selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 berjumlah sebesar Rp.3.630.293.856.345,-. Pendapatan transfer ini berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pusat; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Insentif Daerah;

dan Dana Desa; dan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Secara umum perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	814,746,968,571	781,658,811,277	95.94	18.21
2020	764,186,777,080	732,812,691,124	95.89	(6.25)
2021	718,461,782,330	706,642,912,398	98.35	(3.57)
2022	740,104,912,676	721,353,589,208	97.47	2.08
2023	692,811,374,022	687,825,852,338	99.28	(4.65)
Total	3,730,311,814,679	3,630,293,856,345	97.32	(2.53)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dana transfer tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai Rp.781.658.811.277,- kemudian tahun 2020 menurun menjadi Rp.732.812.691.124,-. Realisasi Pendapatan transfer terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 yang mencapai Rp.687.825.852.338,-. Secara umum pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan trend negatif, dengan pertumbuhan minus 2,53 persen per tahunnya.

Secara umum komponen terbesar dari pendapatan transfer selama kurun waktu lima tahun terakhir bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 59,65 persen, kemudian kontribusi terbesar kedua berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi (Dana Otonomi Khusus Aceh) dengan kontribusi sebesar 8,70 persen, dan kontribusi terbesar ketiga berasal dari Dana Desa memberikan kontribusi sebesar 8,14 persen, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik memberikan kontribusi sebesar 7,49 persen. Secara garis besar komposisi masing-masing pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut.

B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

B.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan bagi dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan; DBH PPh Pasal 21; DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND; DBH Cukai Hasil Tembakau; DBH SDA Minyak Bumi; DBH SDA Gas Bumi; DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi; DBH SDA Mineral dan Batubara; DBH SDA Kehutanan; dan DBH SDA Perikanan. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pusat
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	56,773,845,101	34,791,220,312	61.28	6.46
2020	61,278,718,235	43,303,103,998	70.67	24.47
2021	27,803,662,449	28,117,593,050	101.13	(35.07)
2022	25,978,449,889	25,508,814,157	98.19	(9.28)
2023	25,268,064,383	25,249,350,413	99.93	(1.02)
Total	197,102,740,057	156,970,081,930	79.64	(6.21)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Secara kumulatif realisasi DBH dari Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2019 s.d 2023 sebesar Rp.156.970.081.930,- dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp.43.303.103.998,- dan yang terendah tahun 2023 sebesar Rp.25.249.350.413,-. Pertumbuhan DBH dari Pemerintah Pusat menunjukkan tren negatif, dimana pertumbuhan rata-rata pertahun minus 6,21 persen.

B.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Realisasi DAU selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 mencapai Rp.2.165.457.035.737,- dengan capaian rata-rata 99,86 persen dari target yang dianggarkan. Realisasi tertinggi DAU Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 yang mencapai Rp.469.471.445.000,- sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.415.683.229.737,-. Secara umum pertumbuhan DAU Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 1,45 persen pertahun. Perkembangan mengenai anggaran dan realisasi DAU Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	469,471,445,000	469,471,445,000	100.00	2.14
2020	428,195,816,000	425,306,246,000	99.33	(9.41)
2021	418,626,656,000	418,626,656,000	100.00	(1.57)
2022	418,626,656,000	415,683,229,737	99.30	(0.70)
2023	433,613,526,000	436,369,459,000	100.64	4.98
Total	2,168,534,099,000	2,165,457,035,737	99.86	(1.45)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

B.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya

telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan dengan tujuan: (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah, (c) mengurangi kesenjangan layanan publik, (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan (e) mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas: (a) DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, (b) DAK Non Fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 total penerimaan DAK mencapai Rp.462.976.561.933,- yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.190.945.959.855,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.272.030.602.078,-. Secara parsial, realisasi DAK Fisik Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 DAK Fisik Kota Lhokseumawe mencapai Rp.61.264.233.147,- selanjutnya turun hingga tahun 2023 menjadi Rp.22.632.985.556,- Sedangkan realisasi DAK Non Fisik menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp.41.770.742.993,- terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai Rp.79.522.976.344,-. Perkembangan anggaran dan realisasi DAK Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	115,030,278,000	103,034,976,140	89.57	9.67
2020	83,475,179,000	81,627,891,528	97.79	(20.78)
2021	89,958,488,000	82,921,408,612	92.18	1.58
2022	108,854,236,000	93,236,323,753	85.65	12.44
2023	105,256,051,000	102,155,961,900	97.05	9.57
Total	502,574,232,000	462,976,561,933	92.12	(0.17)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

B.1.4. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan DID diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan kinerja tertentu. Kriteria utama penilaian DID meliputi Opini BPK atas LKPD; Penetapan Perda APBD tepat waktu; Penggunaan *e-Government* (*e-budgeting*, dan *e-procurement*); dan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perkembangan anggaran dan realisasi DID Kota Lhokseumawe tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	10,018,090,000	10,018,090,000	100.00	-
2020	18,391,468,000	18,391,468,000	100.00	83.58
2021	16,156,027,000	16,156,027,000	100.00	(12.15)
2022	22,949,580,000	34,445,081,000	150.09	113.20
2023	5,730,566,000	5,730,566,000	100.00	(83.36)
Total	73,245,731,000	84,741,232,000	115.69	(10.57)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Realisasi penerimaan DID Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir mencapai Rp.84.741.232.000,- dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp.34.445.081.000,- dan realisasi terendah pada tahun 2023 sebesar Rp.5.730.566.000,-.

B.1.5. Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pengalokasian DD dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penggunaan DD dapat ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Perkembangan realisasi DD Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dimana rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,10 persen. Secara kumulatif realisasi penerimaan DD selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mencapai Rp.295.592.174.797,-. Realisasi tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp.61.858.474.338,- sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.53.900.119.902,-. Perkembangan anggaran dan realisasi DD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	58,773,330,000	58,146,508,302	98.93	9.48
2020	60,285,819,000	60,285,819,000	100.00	3.68
2021	61,983,149,000	61,858,474,338	99.80	2.61
2022	53,928,333,000	53,900,119,902	99.95	(12.87)
2023	61,827,136,000	61,401,253,255	99.31	13.92
Total	296,797,767,000	295,592,174,797	99.59	1.10

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Sedangkan Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus berupa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 total penerimaan yang bersumber dari Transfer antar Daerah sebesar Rp.464.556.769.948,- yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp.148.705.796.542,- dan Bantuan Keuangan sebesar Rp.315.850.973.406,-. Pendapatan transfer dari provinsi didominasi oleh penerimaan yang berasal DOKA dengan kontribusi sebesar 67,99 persen sedangkan Bagi Hasil dari Provinsi memberikan kontribusi sebesar 32,01 persen. Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Transfer antar Daerah selama periode 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
A.	Bagi Hasil dari Provinsi			
2019	25,177,808,119	26,704,399,172	106.06	27.89
2020	34,763,380,046	31,220,106,455	89.81	16.91
2021	29,372,956,024	27,269,583,603	92.84	(12.65)
2022	31,220,106,455	29,261,429,715	93.73	7.30
2023	31,220,106,455	34,250,277,597	109.71	17.05
Subtotal	151,754,357,099	148,705,796,542	97.99	5.10
B.	Bantuan Keuangan dari Provinsi			
2019	79,502,172,351	79,492,172,351	99.99	271.66
2020	77,796,396,799	72,678,056,143	93.42	(8.57)
2021	74,560,843,857	71,693,169,795	96.15	(1.36)
2022	78,547,551,332	69,318,590,944	88.25	(3.31)
2023	29,895,924,184	22,668,984,173	75.83	(67.30)
Subtotal	340,302,888,523	315,850,973,406	92.81	(22.19)
TOTAL	492,057,245,622	464,556,769,948	94.41	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi sejak selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuatif. Realisasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar

Rp.34.250.277.597,- sedangkan terendah pada tahun 2019 sebesar Rp.26.704.399.172,-. Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi menunjukkan tren yang positif, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,10 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Selanjutnya, Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi yang berasal dari DOKA, tahun 2023 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 penerimaan Dana Otsus menjadi 1 persen dari DAU nasional, sedangkan sebelumnya Dana Otsus sebesar 2 persen dari DAU nasional.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 mencapai Rp.73.178.597.916,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Pertumbuhan tertinggi terlihat pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhannya minus 99,08 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat drastis, dikarenakan pendapatan hibah yang berasal dari Belanja Hibah BOS tidak lagi dianggarkan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, akan tetapi dialihkan ke Pendapatan Transfer dari Pusat. Untuk mengetahui perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	30,176,800,000	11,885,510,916	39.39	-
2020	48,188,029,000	36,979,375,000	76.74	211.13
2021	33,781,744,000	24,091,712,000	71.32	(34.85)
2022	-	-	-	-
2023	540,000,000	222,000,000	41.11	(99.08)
Total	112,686,573,000	73,178,597,916	64.94	(54.89)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang menurun. Dimana pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp.864.514.148.988,- mengalami penurunan pada 2020 dengan realisasi sebesar Rp.809.115.344.069,-; pada tahun 2021 juga mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp.776.651.681.455,- pada tahun 2022 realisasi belanja menunjukkan peningkatan menjadi Rp.825.509.672.418,- dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan

dengan realisasi sebesar Rp.728.461.011.932,-. Secara total selama kurun waktu lima tahun terakhir total belanja Kota Lhokseumawe sebesar Rp.4.004.251.858.863,- dengan capaian rata-rata 91.05 persen dari total anggaran 4.397.694.860.537,-. Pertumbuhan belanja Kota Lhokseumawe secara umum menunjukkan tren negatif, dimana rata-rata pertumbuhan pertahunnya minus 3,37 persen. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Total Belanja Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	947,061,755,759	864,514,148,988	91.28	14.47
2020	898,210,311,849	809,115,344,069	90.08	(6.41)
2021	879,310,221,282	776,651,681,455	88.33	(4.01)
2022	874,851,664,000	825,509,672,418	94.36	6.29
2023	798,260,907,647	728,461,011,932	91.26	(6.20)
Total	4,397,694,860,537	4,004,251,858,863	91.05	(3.37)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

A. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2023 sebesar Rp.2.719.428.614.062,- atau sebesar 90,75 persen dari total anggaran selama lima tahun sebesar Rp.2.996.624.862.074,-. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja operasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	619,537,040,351	553,472,179,764	89.34	-
2020	585,941,965,779	519,576,952,633	88.67	(6.12)
2021	590,366,995,636	521,495,267,967	88.33	0.37
2022	605,522,237,180	576,374,939,708	95.19	10.52
2023	595,256,623,128	548,509,273,989	92.15	(4.83)
Jumlah	2,996,624,862,074	2,719,428,614,062	90.75	(0.18)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir realisasi belanja operasi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp.576.374.939.708,- dan realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp.519.576.952.633,-. Pertumbuhan belanja operasi menunjukkan tren yang menurun, dimana rata-rata pertumbuhannya minus 0,18 persen pertahunnya.

Realisasi belanja sebagaimana tabel di atas merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai Rp.1.477.489.974.122,-; belanja barang dan jasa Rp.987.664.967.131,-; belanja subsidi Rp.670.000.000,-; belanja hibah Rp.99.971.465.952,-; dan belanja bantuan sosial Rp.153.632.206.856,-.

Belanja Pegawai merupakan belanja yang berkontribusi paling besar dalam struktur belanja operasi, dimana kontribusinya selama lima tahun terakhir mencapai 54,33 persen, selanjutnya belanja barang dan jasa merupakan kontributor kedua sebesar 36,32 persen, belanja bantuan sosial menjadi penyumbang terbesar ketiga dalam pengeluaran belanja operasi yang mencapai 5,65 persen, selebihnya belanja hibah memberikan kontribusi sebesar 3,68 persen, dan belanja subsidi sebesar 0,02 persen. Untuk mengetahui perkembangan anggaran, realisasi, dan proporsi komponen belanja operasi berdasarkan kelompoknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Kelompok Belanja Operasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
A.	Belanja Pegawai			
2019	307,333,130,440	288,883,934,479	94.00	
2020	297,130,883,403	283,796,919,084	95.51	
2021	297,039,601,519	283,308,654,473	95.38	
2022	311,129,275,068	304,916,122,038	98.00	
2023	333,590,854,673	316,584,344,048	94.90	
Jumlah	1,546,223,745,103	1,477,489,974,122	95.55	54.33

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
B.	Belanja Barang dan Jasa			
2019	285,719,309,911	250,663,500,785	87.73	
2020	260,819,869,876	203,976,543,666	78.21	
2021	216,154,393,150	169,787,596,364	78.55	
2022	199,364,284,562	185,425,254,292	93.01	
2023	198,420,544,061	177,812,072,024	89.61	
Jumlah	1,160,478,401,560	987,664,967,131	85.11	36.32
C.	Belanja Subsidi			
2019	-	-	-	
2020	-	-	-	
2021	-	-	-	
2022	200,000,000	200,000,000	100.00	
2023	470,000,000	470,000,000	100.00	
Jumlah	670,000,000	670,000,000	100.00	0.02
D.	Belanja Hibah			
2019	17,160,000,000	6,228,895,000	36.30	
2020	16,885,600,000	7,780,367,500	46.08	
2021	29,932,342,256	26,757,974,805	89.39	
2022	40,581,033,585	36,702,542,385	90.44	
2023	29,753,421,564	22,501,686,262	75.63	
Jumlah	134,312,397,405	99,971,465,952	74.43	3.68
E.	Belanja Bantuan Sosial			
2019	9,324,600,000	7,695,849,500	82.53	
2020	11,105,612,500	24,023,122,383	216.32	
2021	47,240,658,711	41,641,042,325	88.15	
2022	54,247,643,965	49,131,020,993	90.57	
2023	33,021,802,830	31,141,171,655	94.30	
Jumlah	154,940,318,006	153,632,206,856	99.16	5.65
Total	2,996,624,862,074	2,719,428,614,062	90.75	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi belanja modal Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah sebesar Rp.718.859.609.209,- atau sebesar 88,73 persen dari anggaran sebesar Rp.810.187.669.690,- dan menunjukkan tren yang fluktuaktif. Lebih rinci mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja modal Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	214,322,315,995	201,817,865,446	94.17	45.36
2020	188,575,091,181	177,257,389,327	94.00	(12.17)
2021	168,374,880,958	137,196,135,419	81.48	(22.60)
2022	156,583,508,120	142,251,751,256	90.85	3.68
2023	82,331,873,436	60,336,467,761	73.28	(57.58)
Jumlah	810,187,669,690	718,859,609,209	88.73	(21.45)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Total belanja modal sebagaimana tabel di atas merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Modal Tanah sebesar Rp.62.903.882.108,- atau sebesar 8,75 persen; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.118.046.211.320,- atau sebesar 16,42 persen; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.241.195.831.554,- atau sebesar 33,55 persen; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.276.572.926.379,- atau 38,47 persen; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.20.140.495.908,- atau 2,80 persen. Proporsi belanja modal selama lima tahun terakhir didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, proporsi kedua adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan; selanjutnya proporsi terbesar ketiga adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran dan realisasi serta proporsi belanja modal menurut kelompoknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Modal
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
A.	Belanja Modal Tanah			
2019	26,099,920,000	23,371,711,743	89.55	
2020	18,294,926,262	16,998,498,043	92.91	
2021	9,830,000,000	8,819,863,140	89.72	
2022	15,878,345,366	13,713,809,182	86.37	
2023	523,400,000	-	-	
Jumlah	70,626,591,628	62,903,882,108	89.07	8.75

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
B.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2019	31,198,987,106	26,971,085,676	86.45	
2020	28,689,775,391	26,266,396,053	91.55	
2021	34,262,297,410	27,807,298,336	81.16	
2022	25,853,496,837	21,363,441,916	82.63	
2023	16,744,311,095	15,637,989,339	93.39	
Jumlah	136,748,867,839	118,046,211,320	86.32	16.42
C.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
2019	37,331,962,803	34,593,984,049	92.67	
2020	113,727,250,350	109,317,854,810	96.12	
2021	38,017,772,330	34,414,916,470	90.52	
2022	46,887,676,045	40,945,930,770	87.33	
2023	36,586,560,395	21,923,145,455	59.92	
Jumlah	272,551,221,923	241,195,831,554	88.50	33.55
D.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
2019	113,742,253,490	111,675,243,022	98.18	
2020	24,011,479,398	20,826,592,200	86.74	
2021	80,807,172,063	62,684,960,792	77.57	
2022	64,087,255,518	62,614,371,138	97.70	
2023	24,463,735,146	18,771,759,227	76.73	
Jumlah	307,111,895,615	276,572,926,379	90.06	38.47
E.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
2019	5,949,192,596	5,205,840,956	87.50	
2020	3,851,659,780	3,848,048,221	99.91	
2021	5,457,639,155	3,469,096,681	63.56	
2022	3,876,734,354	3,614,198,250	93.23	
2023	4,013,866,800	4,003,311,800	99.74	
Jumlah	23,149,092,685	20,140,495,908	87.00	2.80
Total	810,187,669,690	718,859,347,269	88.73	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

C. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK Lhokseumawe untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah sebesar Rp.16.858.915.509,- atau sebesar 78,48 persen dari anggaran

sebesar Rp.21.481.224.491,- dan menunjukkan tren yang fluktuaktif. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	500,000,000	127,952,364	25.59	6.21
2020	13,428,574,123	10,823,441,265	80.60	8,358.96
2021	4,500,000,000	3,720,021,430	82.67	(65.63)
2022	3,000,000,000	2,134,850,082	71.16	(42.61)
2023	52,650,368	52,650,368	100.00	(97.53)
Jumlah	21,481,224,491	16,858,915,509	78.48	(16.27)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, realisasi belanja tak terduga tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.10.823.441.265,-. Tingginya belanja tak terduga pada tahun 2020 tersebut dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Lhokseumawe.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Desa yang meliputi Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik. Realisasi belanja transfer selama lima tahun terakhir (2019-2023) sebesar Rp.549.104.720.083,- atau 96,44 persen dari anggaran Rp.569.401.104.282,-. Pertumbuhan belanja transfer menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,85 persen per tahun. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja transfer Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	112,702,399,413	109,096,151,414	96.80	6.63
2020	110,264,680,766	101,457,560,844	92.01	(7.00)
2021	116,068,344,688	114,240,256,639	98.42	12.60
2022	109,745,918,700	104,748,131,372	95.45	(8.31)
2023	120,619,760,715	119,562,619,814	99.12	14.14
Jumlah	569,401,104,282	549,104,720,083	96.44	1.85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Besaran belanja transfer selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel di atas merupakan belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.6.798.267.062,- dengan proporsi sebesar 1,24 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik sebesar Rp.542.306.453.021,- dengan proporsi 98,76 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Transfer
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
A.	Belanja Bagi Hasil			
2019	-	-	-	
2020	6,692,257,785	-	-	
2021	3,497,482,335	1,794,068,948	51.30	
2022	3,827,000,000	1,820,631,270	47.57	
2023	3,814,825,000	3,183,566,844	83.45	
Jumlah	17,831,565,120	6,798,267,062	38.12	1.24
B.	Belanja Bantuan Keuangan			
2019	112,702,399,413	109,096,151,414	96.80	
2020	103,572,422,981	101,457,560,844	97.96	
2021	112,570,862,353	112,446,187,691	99.89	
2022	105,918,918,700	102,927,500,102	97.18	
2023	116,804,935,715	116,379,052,970	99.64	
Jumlah	551,569,539,162	542,306,453,021	98.32	98.76
Total	569,401,104,282	549,104,720,083	96.44	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), dan Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal daerah. Perkembangan pembiayaan daerah selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2019	25,959,045,995	25,959,045,995	100.00	(51.05)
2020	15,493,040,419	15,493,040,419	100.00	(40.32)
2021	35,901,027,333	35,901,027,333	100.00	131.72
2022	46,484,611,013	46,484,611,013	100.00	29.48
2023	29,789,500,000	9,541,034,674	32.03	(79.47)
Jumlah	153,627,224,760	133,378,759,434	86.82	(18.14)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah Rp.133.378.759.434,- atau sebesar 86,82 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp.153.627.224.760,-. Realisasi tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp.46.484.611.013,- dan terendah tahun 2023 sebesar Rp.9.541.034.674,-. Besar kecilnya realisasi pembiayaan daerah sangat tergantung dari besarnya penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya adalah SiLPA. Demikian juga dengan pengeluaran pembiayaan yang

sangat tergantung pada besarnya peruntukkan dana untuk penyertaan modal pada BUMD. Gambaran mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Lhoskeumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
A.	Penerimaan Pembiayaan			
2019	26,959,045,995	26,959,045,995	100.00	(51.28)
2020	16,993,040,419	16,993,040,419	100.00	(36.97)
2021	42,045,667,333	42,045,667,333	100.00	147.43
2022	48,484,611,013	48,484,611,013	100.00	15.31
2023	31,789,500,000	10,541,034,674	33.16	(78.26)
Jumlah	166,271,864,760	145,023,399,434	87.22	(17.12)
B.	Pengeluaran Pembiayaan			
2019	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	(56.52)
2020	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	50.00
2021	6,144,640,000	6,144,640,000	100.00	309.64
2022	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	(67.45)
2023	2,000,000,000	1,000,000,000	50.00	(50.00)
Jumlah	12,644,640,000	11,644,640,000	92.09	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari SiLPA selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) mencapai Rp.145.023.399.434,- atau sebesar 87,22 persen dari anggaran yang ditargetkan. SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.48.484.611.013,-. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD mencapai Rp.11.644.640.000,-.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan Neraca Kota Lhokseumawe diketahui Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,64 persen. Pertumbuhan aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset Lancar mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 25,15 persen, Aset Tetap juga mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,05 persen, dan Aset Lainnya tumbuh sebesar 1,72 persen per tahunnya.

Selanjutnya pertumbuhan kewajiban keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami tren penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 2,63 persen. Sedangkan pertumbuhan ekuitas dana mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen. Lebih jelasnya mengenai perkembangan Neraca Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Neraca Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET	1,839,921,956,062.94	1,950,181,640,698.35	2,099,007,467,471.58	2,191,335,492,092.24	2,200,505,853,300.86	3.64
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	15,515,462,628.89	40,515,949,305.97	48,189,789,614.01	10,334,150,946.69	33,408,590,754.69	16.58
Kas di Bendahara Penerimaan	58,254,000.00	-	-	2,650,000.00	42,113.00	(76.46)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,388,987.00	467,766,572.00	8,265,100.00	26,900.00	567,776,147.00	198.67
Kas Dana BOS	979,676,052.00	107,912,255.00	111,660,304.00	4,587,180.00	4,227,000.00	(66.35)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	493,784,603.00	957,311,927.00	203,621,981.84	204,216,827.68	1,720,331,153.68	28.36
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	1,328,854,246.00	-
Kas Lainnya	-	12,000,000.00	-	-	58,239,967.00	-
Piutang Pajak Daerah	38,184,660,072.01	43,523,221,278.01	29,142,995,234.01	27,614,851,292.00	29,821,469,331.00	(4.82)
Piutang Retribusi Daerah	-	-	3,790,948,084.00	4,278,923,084.00	4,456,647,851.00	5.54
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	4,693,874,490.00	676,358.48	22,509,388,107.00	68.63
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	4,859,030,068.00	7,763,074,737.00	7,758,384,383.00	16.88
Piutang Lainnya	825,681,880.00	825,681,880.00	1,366,106,463.00	1,366,106,463.00	1,366,106,463.00	10.59
Penyisihan Piutang	(22,219,516,109.20)	(23,871,713,859.91)	(25,866,191,511.06)	(24,785,654,357.75)	(27,241,974,117.50)	4.16
Beban Dibayar Dimuka	245,789,573.06	376,197,464.15	679,552,756.78	376,496,187.83	218,201,653.87	(2.35)
Persediaan	4,743,946,987.39	27,662,942,754.36	43,228,432,061.00	56,015,157,515.35	43,244,906,326.79	55.58
JUMLAH ASET LANCAR	38,830,128,674.15	90,577,269,576.58	110,408,084,645.58	83,175,263,134.28	119,221,191,379.53	25.15

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	-
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal	27,839,991,845.00	23,191,241,521.00	25,319,255,052.00	24,384,016,280.00	23,846,136,984.00	(3.05)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	27,839,991,845.00	23,191,241,521.00	25,319,255,052.00	24,384,016,280.00	23,846,136,984.00	(3.05)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	27,964,491,845.00	23,315,741,521.00	25,443,755,052.00	24,508,516,280.00	23,970,636,984.00	(3.04)
ASET TETAP						
Tanah	605,308,732,684.38	606,547,036,587.38	654,257,241,344.38	769,004,582,939.24	775,155,473,039.24	5.07
Peralatan dan Mesin	244,117,475,768.27	282,540,868,967.28	304,910,762,771.91	322,182,283,002.91	335,705,052,210.58	6.58
Gedung dan Bangunan	531,892,687,010.13	575,619,755,254.13	656,528,290,480.59	701,845,960,348.09	732,100,853,803.09	6.60
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,023,011,943,498.00	1,080,043,453,748.00	1,150,515,572,494.73	1,211,372,189,882.73	1,230,910,841,509.73	3.77
Aset Tetap Lainnya	11,437,159,369.00	14,300,667,519.00	15,050,701,194.00	15,458,801,449.00	16,468,602,833.00	7.56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24,850,641,950.00	53,840,245,000.00	18,686,213,050.00	18,686,213,050.00	11,876,358,050.00	(13.73)
Akumulasi Penyusutan	(707,966,545,921.27)	(816,694,418,525.02)	(877,231,987,755.01)	(997,185,512,556.01)	(1,088,983,491,094.31)	8.99
JUMLAH ASET TETAP	1,732,652,094,358.51	1,796,197,608,550.77	1,922,716,793,580.60	2,041,364,518,115.96	2,013,233,690,351.33	3.05

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	383,952,673.40	2,788,757,383.00	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	1,239,134,475.00	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	235,046,669.00	320,133,180.00	3,986,835,091.00	4,161,072,491.00	4,161,072,491.00	77.67
Aset Lain-lain	39,073,053,416.28	38,500,835,770.00	36,809,534,270.00	37,462,517,588.00	37,594,726,995.00	(0.77)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	(1,980,622,316.00)	(2,125,152,900.00)	(2,225,079,900.00)	3.96
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	-	-	-	-	4,549,615,000.00	-
Aset DED	1,167,141,100.00	1,270,052,100.00	-	-	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	40,475,241,185.28	40,091,021,050.00	40,438,834,193.40	42,287,194,562.00	44,080,334,586.00	1.72
JUMLAH ASET	1,839,921,956,062.94	1,950,181,640,698.35	2,099,007,467,471.58	2,191,335,492,092.24	2,200,505,853,300.86	3.64
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56,525,852.00	15,272,727.00	28,725,987.00	4,597,180.00	4,210,967.00	(47.27)
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	414,119,342.11	302,681,843.28	2,144,480,984.84	365,104,768.82	994,895,840.06	(22.59)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Utang Belanja	15,588,581,043.80	44,584,723,172.23	48,853,240,415.23	39,806,720,922.76	31,526,194,189.23	(13.58)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	383,952,673.40	-	14,927,644,376.00	238.77
Utang Retensi	12,244,700.00	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,071,470,937.91	44,902,677,742.51	51,410,400,060.47	40,176,422,871.58	47,452,945,372.29	(2.63)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	16,071,470,937.91	44,902,677,742.51	51,410,400,060.47	40,176,422,871.58	47,452,945,372.29	(2.63)
EKUITAS						
EKUITAS	1,823,850,485,125.03	1,905,278,962,955.84	2,047,597,067,411.11	2,151,159,069,220.66	2,153,052,907,928.57	1.69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,839,921,956,062.94	1,950,181,640,698.35	2,099,007,467,471.58	2,191,335,492,092.24	2,200,505,853,300.86	1.59

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Terdapat dua analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu:

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*);
2. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Solvabilitas dibagi menjadi dua yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Tabel 3.28
Balance Sheet Ratio Neraca Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Balance Sheet Ratio		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Liquidity Ratio	Current Ratio	2.416	2.017	2.148	2.070	2.512
	Quick Ratio	2.121	1.401	1.307	0.676	1.601
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0.009	0.023	0.024	0.018	0.022
	Debt to Equity Ratio	0.009	0.024	0.025	0.019	0.022

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio lancar (*current ratio*) selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka di atas 1 atau di atas 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) berada di atas hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Sementara itu *quick ratio* juga menunjukkan di atas 1 atau 100 persen, yang berarti kemampuan aktiva lancar mampu menutupi hutang lancar. Selain itu juga, nilai *total debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung berfluktuatif, namun masih dalam batas aman (*solvable*) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

3.2. Kebijakan Pengelola Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal,

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota. Diharapkan melalui pengelolaan APBK yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Belanja aparatur menjadi perhatian yang serius dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. Dominasi belanja pegawai dalam APBK pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non aparatur yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, rata-rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran adalah sebesar 36,79 persen atau sebesar Rp.1.477.489.974.122,- dari

total pengeluaran sebesar Rp.4.015.896.498.863,-. Hal ini menunjukkan bahwa postur belanja Kota Lhokseumawe masih dapat dikatakan ideal karena pemenuhan untuk belanja aparatur masih berada dibawah 50 persen, dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik masih diatas 60 persen. Perkembangan proporsi belanja pemenuhan aparatur tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2019	288,883,934,479	865,514,148,988	33.38
2020	283,796,919,084	810,615,344,069	35.01
2021	283,308,654,473	782,796,321,455	36.19
2022	304,916,122,038	827,509,672,418	36.85
2023	316,584,344,048	729,461,011,932	43.40
Total	1,477,489,974,122	4,015,896,498,863	36.79

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Tabel 3.30
Surplus/Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Anggaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi Pendapatan	854,946,044,978	835,667,970,983	793,150,537,641	789,566,096,080	755,949,798,672
	<i>dikurangi realisasi:</i>					
2	Belanja Daerah	864,514,148,988	809,115,344,069	776,651,681,455	825,509,672,418	728,461,011,932
3	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000	2,000,000,000	1,000,000,000
	Surplus / (Defisit) Riil	(10,568,104,011)	25,052,626,914	10,354,216,185	(37,943,576,338)	26,488,786,740
	<i>Penutup Defisit Riil</i>					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	48,484,611,013	10,541,034,674
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	16,390,941,984	42,045,667,333	52,399,883,518	10,541,034,674	37,029,821,414

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 (Audited)

Tabel di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kota Lhokseumawe mengalami surplus riil anggaran pada tahun 2020, 2021 dan 2023, sedangkan tahun 2019 dan 2022 mengalami defisit riil anggaran masing-masing sebesar Rp.10.568.104.011,- dan Rp.37943.576.338,-. Defisit yang terjadi pada tahun 2022 merupakan defisit tertinggi selama lima tahun terakhir. Defisit riil anggaran terjadi karena tingginya belanja dan pengeluaran daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit riil dalam APBK diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum terhadap kondisi keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan

keuangan daerah tersebut secara terstruktur akan menggambarkan komponen APBK yang meliputi: 1) Pendapatan; 2) Belanja; dan 3) Pembiayaan. Dalam menganalisis kerangka pendanaan tersebut terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Selain itu juga diperlukan data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah yang digunakan sebagai acuan dalam memproyeksikan kerangka pendanaan APBK selama 5 (lima) tahun mendatang dalam periode RPJMK 2025-2029, kemudian dapat diproyeksikan yang disesuaikan dengan tren dan perkembangan serta asumsi dalam setiap komponen APBK.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

3.3.1.1. Pendapatan

Pendapatan Kota Lhokseumawe untuk kurun waktu lima tahun mendatang (2025-2029) diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Proyeksi peningkatan pendapatan bersumber dari PAD yaitu dari Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta dari Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Alokasi Umum.

Pada tahun 2025 pendapatan Kota Lhokseumawe diproyeksikan sebesar Rp.816.384.456.234,- yang berasal dari PAD sebesar Rp.72.381.799.031,-; Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp.655.218.442.940,-; Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp.75.437.596.420,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.13.346.17.843,-. Dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata pertahun, hingga tahun 2029 pendapatan Kota Lhokseumawe mencapai Rp.905.346.170.859,-. Untuk mengetahui proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	
4.	Pendapatan Daerah	816,384,456,234	840,709,712,152	866,833,074,363	885,466,948,557	905,346,170,859	2.09
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	72,381,799,031	74,941,799,031	74,903,281,062	77,623,758,893	80,385,445,124	2.12
4.1.1.	Pajak Daerah	40,610,299,031	43,070,299,031	45,091,781,062	47,767,258,893	50,483,945,124	4.45
4.1.2.	Retribusi Daerah	3,451,500,000	3,501,500,000	3,441,500,000	3,486,500,000	3,531,500,000	0.46
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	-
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	12,820,000,000	12,870,000,000	10,870,000,000	10,870,000,000	10,870,000,000	(3.25)
4.2.	Pendapatan Transfer	730,656,039,360	749,618,505,531	775,618,891,635	791,369,178,981	808,321,974,946	2.04
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655,218,442,940	683,520,846,076	709,521,232,180	725,271,519,526	742,224,315,491	2.53
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	-
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>471,706,718,940</i>	<i>500,009,122,076</i>	<i>525,009,578,180</i>	<i>540,759,865,526</i>	<i>556,982,661,491</i>	3.38
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	-
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	-
	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Dana Desa</i>	<i>60,415,070,000</i>	<i>60,415,070,000</i>	<i>61,415,000,000</i>	<i>61,415,000,000</i>	<i>62,145,000,000</i>	0.57
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,437,596,420	66,097,659,455	66,097,659,455	66,097,659,455	66,097,659,455	(2.61)
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	<i>40,560,043,420</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>	(5.10)
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,346,617,843	16,149,407,590	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789	4.51
4.3.1.	Pendapatan Lainnya (JKN pada FKTP)	13,346,617,843	16,149,407,590	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789	4.51
	JUMLAH PENDAPATAN	816,384,456,234	840,709,712,152	866,833,074,363	885,466,948,557	905,346,170,859	2.09

Sumber: Proyeksi, BPKD Kota Lhokseumawe

3.3.1.2. Belanja

Seiring dengan proyeksi pendapatan yang mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun mendatang, proyeksi belanja Kota Lhokseumawe juga diproyeksi mengalami peningkatan hingga lima tahun mendatang. Pada tahun 2025 belanja Kota Lhoskeumawe diproyeksikan mencapai Rp.816.384.456.234,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.599.279.401.985,- yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai Rp.379.621.372.711,- Belanja Barang dan Jasa Rp.184.611.656.124,-, Belanja Subsidi sebesar Rp.483.000.000,-, Belanja Hibah sebesar Rp.6.249.467.180,- dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.28.313.905.970,-. Selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp.94.327.685.129,- yang dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.19.498.610.094,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.24.874.578.023,-, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.45.982.182.380,-, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.972.314.632,-. Kemudian untuk Belanja Tak Terduga sebesar Rp.3.981.680.998,-, serta untuk Belanja Transfer kepada pemerintah desa sebesar Rp.118.795.688.122,- yang dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.10.568.178.722,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.108.227.509.400,-. Dengan proyeksi pertumbuhan belanja rata-rata pertahun sebesar 2,14 persen hingga tahun 2029 belanja daerah Kota Lhokseumawe diproyeksikan mencapai Rp.907.372.901.714,-. Untuk mengetahui proyeksi belanja Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2025 hingga 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32
Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	
5.	Belanja Daerah	816,384,456,234	843,413,260,713	869,667,239,735	887,894,283,299	907,372,901,714	2.14
5.1.	Belanja Operasi	599,279,401,985	608,506,759,304	619,914,196,751	631,360,582,258	643,728,991,262	1.44
5.1.1.	Belanja Pegawai	379,621,372,711	391,010,013,892	402,740,314,309	410,795,120,595	414,903,071,801	1.79
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	184,611,656,124	193,842,238,930	195,780,661,320	197,738,467,933	199,715,852,612	1.59
5.1.3.	Belanja Subsidi	483,000,000	500,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	9.20
5.1.4.	Belanja Hibah	6,249,467,180	8,131,384,098	7,957,974,805	9,836,201,670	15,874,458,947	20.50
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	28,313,905,970	15,023,122,383	12,685,246,317	12,240,792,060	12,485,607,902	(15.11)
5.2.	Belanja Modal	94,327,685,129	113,193,222,155	130,172,205,478	136,680,815,752	143,514,856,540	8.76
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,498,610,094	23,398,332,113	26,908,081,930	28,253,486,026	29,666,160,328	8.76
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,874,578,023	29,849,493,628	34,326,917,672	36,043,263,555	37,845,426,733	8.76
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45,982,182,380	55,178,618,856	63,455,411,684	66,628,182,269	69,959,591,382	8.76
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,972,314,632	4,766,777,558	5,481,794,192	5,755,883,902	6,043,678,097	8.76
5.3.	Belanja Tak Terduga	3,981,680,998	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	(8.89)
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	3,981,680,998	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	(8.89)
5.4.	Belanja Transfer	118,795,688,122	119,213,279,255	117,080,837,506	117,352,885,289	117,629,053,912	(0.20)
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	10,568,178,722	6,985,769,855	4,853,328,106	5,125,375,889	5,401,544,512	(12.56)
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	108,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400	0.73
	JUMLAH BELANJA	816,384,456,234	843,413,260,713	869,667,239,735	887,894,283,299	907,372,901,714	2.14

Sumber: Proyeksi

3.3.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe untuk lima tahun mendatang (2025-2029) akan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian realisasi lima tahun sebelumnya (2019-2023). Dalam rangka memperkecil terjadinya SiLPA dapat dilakukan melalui optimalisasi belanja oleh perangkat daerah. Dari sisi penerimaan pembiayaan diproyeksikan hanya berkisar 0,5 persen dari jumlah pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai penutup defisit anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan berkisar 0,18 sampai dengan 0,28 persen dari total belanja daerah. Untuk mengetahui gambaran proyeksi pembiayaan daerah dari tahun 2025 hingga 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	
6.	Pembiayaan Daerah	-	2,703,548,561	2,834,165,372	2,427,334,743	2,026,730,854	(6.95)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	4,203,548,561	4,334,165,372	4,427,334,743	4,526,730,854	1.87
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000	13.62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-	

Sumber: Proyeksi

3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan

Proyeksi kerangka pendanaan bertujuan untuk melihat kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan untuk lima tahun mendatang (2025-2029) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.34
Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBK Lhokseumawe Tahun 2025-2029

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
4.	PENDAPATAN DAERAH	816,384,456,234	840,709,712,152	866,833,074,363	885,466,948,557	905,346,170,859
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	72,381,799,031	74,941,799,031	74,903,281,062	77,623,758,893	80,385,445,124
4.1.1.	Pajak Daerah	40,610,299,031	43,070,299,031	45,091,781,062	47,767,258,893	50,483,945,124
4.1.2.	Retribusi Daerah	3,451,500,000	3,501,500,000	3,441,500,000	3,486,500,000	3,531,500,000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	12,820,000,000	12,870,000,000	10,870,000,000	10,870,000,000	10,870,000,000
4.2.	Pendapatan Transfer	730,656,039,360	749,618,505,531	775,618,891,635	791,369,178,981	808,321,974,946
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655,218,442,940	683,520,846,076	709,521,232,180	725,271,519,526	742,224,315,491
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>	<i>19,384,221,000</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>471,706,718,940</i>	<i>500,009,122,076</i>	<i>525,009,578,180</i>	<i>540,759,865,526</i>	<i>556,982,661,491</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>	<i>20,409,944,000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>	<i>83,302,489,000</i>
	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	-	-	-	-	-
	<i>Dana Desa</i>	<i>60,415,070,000</i>	<i>60,415,070,000</i>	<i>61,415,000,000</i>	<i>61,415,000,000</i>	<i>62,145,000,000</i>
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,437,596,420	66,097,659,455	66,097,659,455	66,097,659,455	66,097,659,455
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	<i>40,560,043,420</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>	<i>31,220,106,455</i>
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>	<i>34,877,553,000</i>
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,346,617,843	16,149,407,590	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789
4.3.2.	Pendapatan Lainnya (JKN pada FKTP)	13,346,617,843	16,149,407,590	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789
	Jumlah Pendapatan	816,384,456,234	840,709,712,152	866,833,074,363	885,466,948,557	905,346,170,859

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
5.	BELANJA DAERAH	816,384,456,234	843,413,260,713	869,667,239,735	887,894,283,299	907,372,901,714
5.1.	Belanja Operasi	599,279,401,985	608,506,759,304	619,914,196,751	631,360,582,258	643,728,991,262
5.1.1.	Belanja Pegawai	379,621,372,711	391,010,013,892	402,740,314,309	410,795,120,595	414,903,071,801
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	184,611,656,124	193,842,238,930	195,780,661,320	197,738,467,933	199,715,852,612
5.1.3.	Belanja Subsidi	483,000,000	500,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000
5.1.4.	Belanja Hibah	6,249,467,180	8,131,384,098	7,957,974,805	9,836,201,670	15,874,458,947
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	28,313,905,970	15,023,122,383	12,685,246,317	12,240,792,060	12,485,607,902
5.2.	Belanja Modal	94,327,685,129	113,193,222,155	130,172,205,478	136,680,815,752	143,514,856,540
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,498,610,094	23,398,332,113	26,908,081,930	28,253,486,026	29,666,160,328
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,874,578,023	29,849,493,628	34,326,917,672	36,043,263,555	37,845,426,733
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45,982,182,380	55,178,618,856	63,455,411,684	66,628,182,269	69,959,591,382
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,972,314,632	4,766,777,558	5,481,794,192	5,755,883,902	6,043,678,097
5.3.	Belanja Tak Terduga	3,981,680,998	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	3,981,680,998	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
5.4.	Belanja Transfer	118,795,688,122	119,213,279,255	117,080,837,506	117,352,885,289	117,629,053,912
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	10,568,178,722	6,985,769,855	4,853,328,106	5,125,375,889	5,401,544,512
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	108,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400	112,227,509,400
	Jumlah Belanja	816,384,456,234	843,413,260,713	869,667,239,735	887,894,283,299	907,372,901,714
	Surplus / (Defisit)	-	(2,703,548,561)	(2,834,165,372)	(2,427,334,743)	(2,026,730,855)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	2,703,548,561	2,834,165,372	2,427,334,743	2,026,730,854
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	4,203,548,561	4,334,165,372	4,427,334,743	4,526,730,854
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

RPJMK
LHOKSEUMAWE
2025 - 2029

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS
KOTA LHOKSEUMAWE

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isi strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition* dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMK karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan PDRB
 - 1) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 4,21 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,23 persen dan nasional sebesar 5,04 persen.

2. Laju Inflasi
 - 1) Inflasi Kota Lhokseumawe masih belum stabil, hal ini ditandai pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,97 persen, meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2022. Kondisi inflasi Lhokseumawe pada tahun 2023 kembali turun menjadi 1,56 persen, namun masih berada di atas inflasi Aceh yang sebesar 1,53%.
3. PDRB Per Kapita
 - 1) PDRB Per Kapita Lhokseumawe masih berada di rata-rata nasional. Hal ini dapat ditandai pada tahun 2023 PDRB Per Kapita Lhokseumawe sebesar 56,60 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 41,42 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 74,96 juta rupiah.
4. Indeks Gini
 - 1) Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Lhokseumawe sebesar 0,296 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,348, lebih tinggi dari Indeks Gini Aceh 0,291. Pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Lhokseumawe kembali mengalami penurunan menjadi 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388.
5. Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih berfluktuasi. Hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,45 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023. Disamping itu juga laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,35 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 2,82 persen.
6. Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran kontribusi sub kategori ini dari tahun 2010 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan

setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 4,15 persen menjadi 8,20 persen pada tahun 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kontribusinya cenderung mengalami penurunan menjadi 7,27 persen.

7. Kontribusi Ekspor Netto dalam PDRB Kota Lhokseumawe belum menggembirakan, hal ini ditandai dengan kontribusi ekspor neto pada tahun 2023 masih berada pada -12,1 persen.
8. Angka Kemiskinan di Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 10,73 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.100 jiwa. Angka kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2023 relatif lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Dari sisi kemiskinan ekstrem, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe semakin membaik. Hal ini ditandai dengan peningkatan IPM dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 IPM Kota Lhokseumawe sebesar 80,26 meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,04. IPM Kota Lhokseumawe tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan IPM Aceh sebesar 74,70 dan nasional sebesar 74,39, Namun IPM Kota Lhokseumawe masih rendah dibandingkan IPM Kota Banda Aceh sebesar 88,32.
- 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada tahun 2019 APS SD/MI sebesar 100% kemudian pada tahun 2020-2022 terjadi penurunan APS menjadi 99.84% di tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 99.89% di tahun 2023. Adapun

angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 APS SMP/MTS 99.5% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 99.25% tahun 2020, pada tahun 2021-2022 sedikit meningkat sehingga menjadi 99.59% kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 99.36%.

Adapun APS pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APS SMA sebesar 86.88% dan menjadi 91.67% pada tahun 2023. APS SMA mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 tahun jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah.

- 3) Mutu Tenaga Pendidik Belum Optimal, hal ini ditandai dengan persentase guru menurut jenjang pendidikan. Pada tahun 2023 persentase guru PAUD yang belum sertifikasi sebesar 95,1 persen, guru SD yang belum sertifikasi sebesar 69,2 persen, dan guru SMP yang belum sertifikasi sebesar 64,3 persen.
- 4) Kemampuan Numerasi dan Kemampuan Literasi SMP masih kurang. Angka Kemampuan Numerasi SMP di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 39,5 persen, dan angka Kemampuan Literasi SMP sebesar 58,36 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 40,63 persen untuk Angka Kemampuan Numerasi SMP dan 59,00 persen untuk Angka Kemampuan Literasi SMP.
- 5) Belum tercapainya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Pada tahun 2022 capaian SPM Pendidikan di Kota Lhokseumawe masih sebesar 74,90 persen dari yang seharusnya 100 persen.
- 6) Total dayah di Kota Lhokseumawe belum seluruhnya Terakreditasi. Dari 70 dayah yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, sebanyak 56 dayah yang berakreditasi. Walaupun jumlah dayah yang terakreditasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi dayah yang bertipe A

di Kota Lhokseumawe hanya sebanyak 6 dayah (6 persen dari total dayah).

2. Kesehatan

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan belum tercapai. Hal ini ditandai dengan nilai SPM Kesehatan tahun 2022 di Kota Lhokseumawe masih sebesar 79,28 persen dari yang seharusnya 100 persen.
- 2) Masih terjadinya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan jumlah kasus Kematian Ibu sebanyak 226/100.000 kelahiran hidup. Angka ini di atas AKI Aceh sebesar 201/100.000 kelahiran hidup, dan AKI Nasional sebesar 189/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.
- 3) Masih terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Meski relatif lebih baik dibandingkan AKB Aceh dan nasional, namun perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk penurunan Angka Kematian Bayi.
- 4) Prevelensi Stunting masih tinggi. Angka prevelensi Stunting di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 20,70 persen, relatif lebih baik dari rata-rata Stunting Aceh yang mencapai 29,40 persen dan nasional sebesar 21,5 persen.
- 5) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum optimal. Pada tahun 2023 Cakupan IDL di Kota Lhokseumawe masih sebesar 56,5 persen, walaupun relatif meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 51,5 persen akan tetapi masih perlu dilakukan upaya untuk mencapai cakupan Imunisasi Dasar Lengkap bagi Anak di Kota Lhokseumawe sampai dengan 100 persen.
- 6) Kasus penyakit menular Tuberculosis masih tinggi. Angka kasus penyakit menular Tuberculosis di Kota Lhokseumawe

pada tahun 2023 mencapai 1.076 kasus, meningkat dari tahun 2022 sebesar 883 kasus.

- 7) Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum mencapai 100 persen, dimana pada tahun 2023 cakupan kepersertaan JKN baru mencapai 95,60 persen.
 - 8) Derajat Keluarga Sehat masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 0,367. Walaupun IKS Kota Lhokseumawe lebih baik dari IKS Aceh 0,326 dan IKS Nasional 0,255 namun IKS Kota Lhokseumawe masih berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat karena nilai IKS lebih kecil dari 0,500.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Akses penduduk terhadap Air Minum masih rendah, hal ini ditandai tahun 2022 penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 22,57 persen, bahkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 22,45 persen.
 - 2) Kondisi kemantapan jalan kota mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan Kondisi Jalan Mantap pada tahun 2023 sebesar 69,52 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 76,97 persen dan masih berada di bawah kondisi mantap jalan provinsi yang mencapai 84,41 persen dan kondisi jalan mantap nasional sebesar 98,65 persen
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1) Masih terdapat rumah tinggal belum bersanitasi layak, hal ini ditandai dengan rumah tinggal berakses sanitasi layak sebesar 71,08 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa tahun masih terdapat 28,92 persen rumah tinggal yang belum bersanitasi layak di Kota Lhokseumawe, dan pada tahun 2023 terdapat rumah tinggal bersanitasi layak sebesar 72,67 persen yang mengindikasikan bahwa terdapat 27,33 persen rumah tinggal belum bersanitasi layak.
 - 2) Penyediaan Rumah Layak Huni belum optimal, hal ini ditandai dengan persentase penyediaan rumah layak huni

di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 masih sebesar 72,07 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 27,93 persen rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe.

- 3) Masih terdapat luasan kawasan perumahan kumuh, dimana pada tahun 2023 luasan kawasan perumahan kumuh di Kota Lhokseumawe sebesar 78,46 ha.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Masih adanya kasus pelanggaran Syariat Islam, dimana kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 64 kasus, walaupun jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi diperlukan usaha yang serius untuk mengantisipasi pelanggaran Syariat di tengah-tengah masyarakat.
 - 2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum, hal ini ditandai dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hanya sebesar 79,76 persen lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

4.1.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe masih tinggi, berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2022 TPT Kota Lhokseumawe 8,78 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Aceh sebesar 6,03 persen, dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen.
 - 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe masih fluktuatif dan masih berada di bawah rata-rata TPAK Aceh. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPAK Lhokseumawe sebesar 64,36%, sedangkan TPAK Provinsi Aceh sebesar 64,77%.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Pengarusutamaan Gender di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 IPG Kota

Lhokseumawe sebesar 96,55. Walaupun lebih baik dari IPG Aceh sebesar 92,71 dan nasional sebesar 92,29 tetapi belum mencapai angka 100 yang menggambarkan rasio perbandingan yang sempurna.

- 2) Persamaan Peranan antara Perempuan dan Laki-laki yang digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan IDG pada tahun 2023 sebesar 65,7, walaupun lebih baik dari IDG Aceh sebesar 63,57 namun masih berada IDG nasional sebesar 76,9. Di samping itu juga masih terjadi Ketimpangan Gender di Kota Lhokseumawe yang ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 sebesar 0,345 lebih rendah dari Aceh 0,504 dan nasional sebesar 0,459. Selain itu, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga relatif lebih baik dibandingkan Aceh dan nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Lhokseumawe sebesar 58,57 sedangkan Aceh sebesar 57,79 dan nasional 57.

3. Pangan

- 1) Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi belum maksimal, hal ini ditandai dengan skor PPH Ketersediaan sebesar 76,27 dan skor PPH Konsumsi sebesar 81,6 pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 skor PPH Konsumsi mengalami penurunan menjadi 76,5. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan Konsumsi seharusnya mencapai nilai 100.
- 2) Ketahanan pangan Kota Lhokseumawe masih belum stabil. Hal ini ditandai dengan angka Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2022 yang sebesar 69,34, walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2021 namun Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhoskeumawe mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 71,33 dan pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe kembali meningkat menjadi 80,678.

4. Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal, hal ini ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Lhokseumawe 63,4 dengan predikat Sedang yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,96, Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,57 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 22,58 dengan predikat Waspada. Walaupun IKLH Kota Lhokseumawe meningkat jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2022 sebesar 62,54 namun terdapat satu indikator yang mengalami penurunan yaitu Indeks Kualitas Udara dari tahun 2022 sebesar 91,2.
- 2) Pengelolaan persampahan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 81,13 persen sedangkan pada tahun 2021 persentase penanganan sampah sebesar 86,25 persen. Dengan dukungan berbagai pihak pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe sudah semakin membaik, dimana penanganan sampah pada tahun 2023 mencapai 99,58 persen.
- 3) Belum optimalnya manajemen kebencanaan. Hal ini ditandai dengan Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe yang masih berada pada kategori sedang dengan nilai 130,44 pada tahun 2022 dan 124,22 pada tahun 2023.

5. Perhubungan

- 1) Prasarana Perhubungan dan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Pembangunan LPJU yang belum maksimal, Jumlah Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ Dari 195 buah rambu dan RPPJ yang dibutuhkan baru terpenuhi sejumlah 140 atau sebesar 71.79% pada Tahun 2023. warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati. Warning light yang dibutuh Kota

Lhokseumawe sebanyak 12 unit, namun satupun belum ada. Kebutuhan Guard Rall (Pagar Pengaman) untuk sebagian daerah perbukitan Kota Lhokseumawe yang belum tersedia.

6. Komunikasi dan Informasi

1) Pemanfaatan Digital untuk Pelayanan Publik belum Optimal, hal ini ditandai dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Lhokseumawe masih kurang. Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori Kurang dengan nilai 1,54 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1503 tahun 2021. Nilai tersebut masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh yang mencapai 3,19 dengan kategori Baik. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 2,53 dengan kategori Cukup, nilai ini juga masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh sebesar 3,62 dengan kategori Sangat Baik.

7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih sangat minim dan fluktuatif, hal ini ditandai dengan perkembangan rasio usaha koperasi pada tahun 2021 sebesar 0,16 persen, turun menjadi 0,15 persen pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,79 persen.

8. Penanaman Modal

1) Investasi di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran realisasi investasi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai nilai sebesar Rp.2.489.517 milyar, namun hingga akhir tahun 2023 terus mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp.249.540 milyar. Demikian juga dengan jumlah investor, cenderung mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020-2023), dimana pada tahun 2020 jumlah investor mencapai

436 investor yang terdiri dari 434 PMDN dan 2 PMA, dan pada tahun 2022 sempat mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 460 investor yang terdiri dari 459 PMDN dan 1 PMA. Namun pada tahun 2023 jumlah investor kembali mengalami penurunan menjadi 413 investor yang terdiri dari 412 PMDN dan 1 PMA.

9. Kebudayaan

- 1) Belum terlegalisasinya cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe. Terdapat 22 situs/bangunan cagar budaya yang di Kota Lhokseumawe, namun sampai saat ini belum satupun yang terlegalisasi.

4.1.4. Layanan Urusan Pilihan

1. Perdagangan

- 1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 21,37 persen turun menjadi 21,28 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 22,93 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan relatif lebih baik, dimana selama lima tahun terakhir (2018-2023) terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi hingga -3,85 persen, namun hingga tahun 2023 kembali meningkat menjadi 9,44 persen.

2. Sekretariat Daerah

- 1) Belum tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi, hal ini ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe tahun 2022 yang masih berada pada Kategori C dengan capaian angka sebesar 45,36, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi CC dengan capaian angka 54,79. Kategori ini masih belum memenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJM dengan kategori B.
- 2) Capaian Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe tahun 2023 membaik dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun

2023 SAKIP Kota Lhokseumawe adalah B sedangkan tahun 2022 masih berada pada kategori CC.

4.1.5. Penunjang Urusan

1. Bappeda
 - 1) Belum terintegrasinya data sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD saat ini masih mencakup integrasi perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan realisasi pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.
2. Keuangan
 - 1) Rasio Pajak terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe masih sangat minim dan berfluktuasi, hal ini ditandai dengan besaran Tax Ratio pada tahun 2023 yang sebesar 0,71, angka ini merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir (2018-2023). Tax ratio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 1,18.
 - 2) Masih tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap dana pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Lhokseumawe yang mencapai 58,28 persen dari DAU, 9,64 persen dari DAK Non Fisik, 8,20 persen dari Dana Desa, dan 3,02 persen dari DAK Fisik pada tahun 2023.
 - 3) Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah yang diukur berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2022 sebesar 0,086.
 - 4) Kemandirian pendanaan masih rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen.
3. **Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**
 - 1) Pembangunan Sumber Daya ASN masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalisme ASN pada tahun

2022 sebesar 36,26 dengan kategori Sangat Rendah, bahkan pada tahun 2023 turun menjadi 33 dengan kategori Buruk.

- 2) Pejabat ASN Kota Lhokseumawe yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural masih sangat rendah, hal ini ditandai tahun 2023 persentase ASN yang mengikuti Diklat sebesar 17,78 persen, walaupun meningkat jika dibandingkan dari tahun 2021 dimana jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural hanya sebesar 8,7 persen, bahkan pada tahun 2022 tidak ada satupun yang mengikuti diklat, tetapi pencapaiannya belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah total jabatan struktural di Kota Lhokseumawe.

4. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan masih rendahnya tingkat Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 berada dalam predikat “Kota Kurang Inovatif” dengan nilai IID sebesar 10,60, walaupun Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 meningkat menjadi 36,38 dengan predikat "Kota Inovatif", tetapi posisi Kota Lhokseumawe masih berada pada peringkat 83 dari 93 kota di Indonesia.

5. Pengawasan

- 1) Nilai Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe relatif membaik, hal ini ditandai dengan capaian tahun 2022 yang berada pada Level 2 dengan nilai 2,314 menjadi Level 3 dengan nilai 3,031. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe juga relatif membaik, dimana pada tahun 2021-2022 MRI Kota Lhokseumawe berada pada Level 2 dengan nilai 2,092 meningkat menjadi 2,832 dengan tetap masih berada pada Level 2.

4.1.6. Kekhususan Aceh

- 1) Dari hasil survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada tahun 2023, capaian IPS Kota Lhokseumawe sebesar 80,65. Capaian Dimensi Hukum Jinayat, Manajemen Masjid, Lembaga Keuangan Syariah serta Dimensi Zakat masih rendah dengan nilai masih dibawah 80. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya upaya yang lebih sistematis dan terukur untuk mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah kepada masyarakat Kota Lhokseumawe.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe diidentifikasi berdasarkan pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang.

4.2.1. Isu Megatren dan Internasional

Isu strategis Megatren dan Internasional meliputi:

1. Perkembangan Demografi Global
2. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3. Perkembangan teknologi
4. Peningkatan urbanisasi dunia
5. Perubahan konstelasi global
6. Pergeseran tata kelola keuangan global
7. Pertumbuhan kelas menengah

8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9. Perubahan iklim
10. Pemanfaatan ruang angkasa.

Isu strategis perubahan iklim meliputi:

1. Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat celcius pada tahun 2100.
2. Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda-beda.
3. Daya dukung lingkungan mengalami penurunan.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional ke depan meliputi:

- 1) Produktivitas rendah;
- 2) IPTEKIN dan Riset Lemah;
- 3) Deindustrial Dini;
- 4) Pariwisata di bawah Potensi;
- 5) Ekonomi Laut Belum Optimal;
- 6) Kontribusi Koperasi dan UMKM Rendah;
- 7) Infrastruktur dan Literasi Rendah;
- 8) Pembangunan belum Berkelanjutan;
- 9) Integrasi Domestik Terbatas;
- 10) Kualitas SDM masih rendah;
- 11) Tata kelola pemerintahan belum optimal;
- 12) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah;
- 13) Demokratisasi belum optimal;
- 14) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa;

Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu:

- 1) Regulasi;
- 2) Kelembagaan yang efektif;
- 3) Proses bisnis yang adaptif;
- 4) Manajemen talenta;

- 5) Meritokrasi dan integritas;
- 6) Manajemen ASN strategis;
- 7) Pelayanan publik yang berkualitas;
- 8) Pelayanan bidang strategis;
- 9) Digitalisasi;
- 10) Integritas partai politik, dan;
- 11) Relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

4.2.3. Isu Strategis Aceh

Isu-isu strategis pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan nasional maupun internasional yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun (2025-2045) mendatang yaitu:

- 1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum maksimal, hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 70,18 masih dibawah rata-rata nasional yaitu 71,85 pada tahun 2022; Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil belum optimal, hal ini ditandai dengan angka kematian ibu tahun 2022 di Aceh mencapai 141/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2022 yaitu sebesar 130/100.000 kelahiran hidup, namun masih perlu dinolkan. Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh, dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada tahun 2028 akan berakhir; Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin. Masih tingginya prevalensi stunting, tahun 2022 sebesar 31,20 persen sedangkan Nasional 21,60 persen.

2) Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Sumber daya manusia masih rendah dan adanya disparitas yang tinggi antar kabupaten/kota, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 74,70% (2023) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,32 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 69,66 dan Masih rendahnya lulusan vokasi yang diserap di dunia kerja, hal ini ditandai dengan besarnya persentase Angkatan Kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan Menengah dan 80,72 persen pada Perguruan Tinggi di tahun 2022. Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2022 masih sebesar 58,46 menjadikan Aceh provinsi nomor 8 dengan IPLM terendah dan yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 83,63;

3) Penanggulangan Kemiskinan

Penduduk miskin Aceh masih tinggi, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen (Maret 2023) sedangkan nasional 9,36 persen, dan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 1,83 persen pada tahun 2023.

4) Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pendapatan perkapita Aceh masih rendah, hal ini ditandai tahun 2022 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang mengembirakan, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 sebesar 4,24 persen sedangkan nasional 4,94%. Inflasi Aceh masih belum stabil, hal ini ditandai tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, namun tahun 2022 menjadi 5,89 serta tahun 2023 (November) turun lagi menjadi 1,95%. Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat

masih tinggi dan dinamis, hal ini ditandai pada tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,324 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,291. Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2045, Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen, masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB, belum optimalnya *Return On Asset* (ROA) BUMD yang hanya 2.00 persen, namun secara Indonesia ini sudah baik, namun idealnya adalah 5-20 persen adalah angka yang sangat ideal, Pembangunan koperasi masih lemah, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berkisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.

5) Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

6) Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi yaitu sebesar 6,03 persen (2023) sedangkan nasional sebesar 5,86 persen dan Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan menengah dan

perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen sedangkan nasional mencapai 77,67% pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Aceh 46,15 persen sedangkan nasional 58,22 persen (2022), Kesejahteraan pekerja belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86%. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen. Angka ketergantungan penduduk masih tinggi, hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen lebih baik daripada nasional 44,4%, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.

7) Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah, hal ini ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 persen dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 baru sekitar 5,14 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif, masih rendahnya proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Iklim investasi belum mengembirakan, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar 6,2 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan

Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.

- 8) Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau
- Daerah rawan pangan masih tinggi, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah daerah rawan pangan Aceh yaitu tahun 2021 sejumlah 29 kecamatan meningkat menjadi 34 kecamatan di tahun 2022, pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang dan gejolak harga pangan yang sering timbul sehingga mengakibatkan kerugian di pihak produsen dan konsumen, belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan, Skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh dari tahun 2013 - 2022 belum mencapai angka 100. Skor PPH ketersediaan dan konsumsi pangan tahun 2022 masing-masing 85,89 dan 75,50 yang seharusnya sudah mencapai angka skor 100. Produktivitas Pertanian semakin menurun, hal ini ditandai dengan masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022, produksi padi mengalami penurunan, pada tahun 2013 produksi padi Aceh sebanyak 1.937.889,5 ton dan pada tahun 2022 menjadi 1.533.138,1 ton atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun; Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen; Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2022 yaitu masing-masing 107,45 dan 109,00 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian. Kesejahteraan Petani belum maksimal, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak

(NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81. Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal, hal ini ditandai belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku. Potensi Kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan, Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi terbaru yang adaptif; Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

9) Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan gampong masih rendah, hal ini ditandai dengan masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724. Pemerintah Aceh harus lebih focus kepada upaya untuk memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh, seperti meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan

keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa- desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

10) Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh: Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal, hal ini ditandai Indeks Reformasi Hukum Aceh masih sekitar 39.93 sedangkan nasional sudah mencapai, Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, hal ini ditandai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2.76 (2022) sedangkan yang paling tinggi adalah DKI 3,67. Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini. Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal, hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen, Masih belum optimalnya SDM ASN, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 77,50 (2022) sedangkan nasional sudah mencapai, Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh, hal ini Indeks Integritas Nasional 71,94 sedangkan Aceh 70.2. Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan

evaluasi pembangunan. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Belum optimalnya pemanfaatan digital bagi pelayanan pemerintah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan belum optimalnya inovasi daerah. Pelayanan dasar belum optimal, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akta kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

11) Memperkuat Otonomi Khusus

Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus. Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban konflik, hal ini ditandai data data konflik yang belum akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

12) Kemandirian Dalam Ruang Fiskal

Kemandirian Pendanaan Masih lemah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum

dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

13) Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian. Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh masih sekitar sebesar 82,72 (dimensi aqidah, akhlak, melek Al-Qur'an, manajemen masjid, ZIS, hukum jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah). Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Aceh yaitu sebesar 48,89 dan nasional 51,90. Adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam. Belum optimalnya aspek pendapatan dan pendistribusian Baitul Mal, hal ini ditandai dengan besarnya SILPA dari Ziswaf pada tahun 2023 ini hampir mencapai Rp. 114 Milyar hal ini disebabkan karena terkendalanya dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian, disamping itu masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan akan tetapi lebih fokus pada perbaikan sapsras. Dari 1.484 jumlah dayah hanya 44% yang mandiri.

14) Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga Daya tampung dalam panti masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi. Penanganan PPKS yang dilaksanakan

Dinas Sosial tahun 2017-2022 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen. Penanganan Disabilitas belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20% dari jumlah 8,361 PMKS. Ketimpangan Gender yang masih tinggi, hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2022 IPG Aceh 92,24 sedangkan nasional 91,63, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 (924 kasus) menjadi 1.029 kasus di tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh. Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahrgaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.

- 15) Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah; Pembangunan kehutanan belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas

±1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada tahun 2020-2022 terutama dengan gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada tahun 2022; dan kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan. Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal, hal ini ditandai dengan belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati; dan masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI) di 8 lokasi.

16) Pengurangan Risiko Bencana

Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 149.1/tinggi (2022) bandingkan nasional sebesar 138,81.

17) Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Aceh; dan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan sertifikat tanah. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah; Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan sebesar 84,41 persen (2022) dan di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen; Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN),

Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Kawasan transmigrasi belum optimal, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan, masih defisitnya ekspor.

18) Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas

Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 6.245,94 ha tahun 2020 menjadi 7.419,78 ha di tahun 2022, capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh tahun 2022 sebesar 89,7 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 91,05 persen; dan rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 77,48 persen dan nasional sebesar 86,03 persen pada tahun 2022; infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 60,39 persen tahun 2022, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik yang mencapai 82,56 persen dari luas areal 65.409 Ha. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas

masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2022 sebesar 0,73 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026 (sesuai dengan target pada dokumen RPA Tahun 2023-2026).

4.2.4. Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Lhokseumawe dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025-2045), yaitu:

4.2.4.1. Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan

Implementasi pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan hasil survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, capaian Dimensi Hukum Jinayat, Manajemen Mesjid, Lembaga Keuangan Syariah serta Dimensi Zakat masih rendah dengan nilai masih dibawah 80. Masih adanya kasus pelanggaran Syariat Islam, dimana kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 64 kasus, walaupun jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi diperlukan usaha yang serius untuk mengantisipasi pelanggaran Syariat di tengah-tengah masyarakat. Akreditasi dayah dan dayah bertipe A masih rendah, hal ini ditandai dari total dayah yang ada di Kota Lhokseumawe belum seluruhnya *terakreditasi*. Dari 70 dayah yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023, sebanyak 56 dayah yang berakreditasi. Walaupun jumlah dayah yang terakreditasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi dayah yang bertipe A di Kota Lhokseumawe hanya sebanyak 6 dayah (6 persen dari total dayah). Pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe juga belum optimal, hal ini ditandai dengan adanya 22 situs/bangunan cagar budaya yang di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum satupun yang terlegalisasi. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah

untuk peningkatan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, diantaranya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH). Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menggalakkan sosialisasi dan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi nilai-nilai Dinul Islam. Dalam hal pembangunan kebudayaan, diperlukan usaha promosi kekayaan budaya serta melakukan legalisasi situs/cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

4.2.4.2. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe sebesar 4,21 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,23 persen dan nasional sebesar 5,04 persen. Inflasi Kota Lhokseumawe juga masih fluktuatif, hal ini ditandai pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,97 persen, meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2022. Kondisi inflasi Lhokseumawe pada tahun 2023 kembali turun menjadi 1,56 persen, namun masih berada di atas inflasi Aceh yang sebesar 1,53 persen. Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai dengan Indeks Gini Kota Lhokseumawe 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 21,37 persen turun menjadi 21,28 persen pada tahun 2022,

dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 22,93 persen.

Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga masih berfluktuasi, hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,45 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023. Disamping itu juga laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,35 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 2,82 persen. Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran kontribusi sub kategori ini dari tahun 2010 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 4,15 persen menjadi 8,20 persen pada tahun 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 kontribusinya cenderung mengalami penurunan menjadi 7,27 persen. PDRB Per Kapita Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata nasional, hal ini dapat ditandai pada tahun 2023 PDRB Per Kapita sebesar 56,59 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 41,42 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 74,96 juta rupiah. Kontribusi Ekspor Netto dalam PDRB Pengeluaran belum menggembirakan, hal ini ditandai dengan kontribusi ekspor neto pada tahun 2023 masih berada pada -12,1 persen. Investasi di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan besaran realisasi investasi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian juga dengan jumlah investor, cenderung mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020-2023). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB selama tiga tahun terakhir (2021-2023) masih berfluktuasi. Perkembangan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi belum maksimal, Ketahanan pangan Kota Lhokseumawe juga masih belum stabil. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh melalui pengembangan sektor

pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu juga dapat dilakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Memberikan dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran dan pengembangan produk. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah Kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

4.2.4.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun di Kota Lhokseumawe masih rendah, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,53 persen, dan APS Anak Usia 7-18 tahun Kesetaraan sebesar 9,53 persen serta APS usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas juga masih rendah, dimana pada tahun 2023 APS 4-18 tahun Penyandang Disabilitas hanya sebesar 41,52 persen. Mutu Tenaga Pendidik belum optimal, yang ditandai dengan persentase sertifikasi guru menurut jenjang pendidikan. Persentase guru PAUD yang belum sertifikasi sebesar 95,1 persen, guru SD yang belum sertifikasi sebesar 69,2 persen, dan guru SMP yang belum sertifikasi sebesar 64,3 persen. Kemampuan Numerasi dan Kemampuan Literasi SMP masih kurang, Angka Kemampuan Numerasi SMP di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 39,5 persen, dan angka Kemampuan Literasi SMP sebesar 58,36 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 40,63 persen untuk Angka Kemampuan Numerasi SMP nasional dan 59,00 persen untuk Angka Kemampuan Literasi SMP nasional. Masih terjadinya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan jumlah kasus Kematian Ibu sebanyak 226/100.000 kelahiran hidup. Angka ini di atas AKI Aceh sebesar 201/100.000 kelahiran

hidup, dan AKI Nasional sebesar 189/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Masih terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 15/1.000 kelahiran hidup. Meski relatif lebih baik dibandingkan AKB Aceh dan nasional, namun perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan untuk penurunan Angka Kematian Bayi. Prevelensi Stunting juga masih tinggi di Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2023 sebesar 20,70 persen, relatif lebih baik dari rata-rata Stunting Aceh yang mencapai 29,40 persen dan nasional sebesar 21,5 persen. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum tercapai 100 persen pada tahun 2023 baru mencapai 56,5 persen, walaupun relatif meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 51,5 persen akan tetapi masih perlu dilakukan upaya untuk mencapai cakupan Imunisasi Dasar Lengkap bagi Anak di Kota Lhokseumawe sampai dengan 100 persen. Kasus penyakit menular Tuberculosis pada tahun 2023 mencapai 1.076 kasus, meningkat dari tahun 2022 sebesar 883 kasus. Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum mencapai 100 persen, dimana pada tahun 2023 cakupan kepersertaan JKN baru mencapai 95,60 persen. Derajat Keluarga Sehat masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Lhokseumawe sebesar 0,367. Walaupun IKS Kota Lhokseumawe lebih baik dari IKS Aceh 0,326 dan IKS Nasional 0,255 namun IKS Kota Lhokseumawe masih berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat karena nilai IKS lebih kecil dari 0,500. Pengarustamaan Gender di Kota Lhokseumawe belum optimal, hal ini ditandai dengan angka IPG sebesar 96,55. Walaupun lebih baik dari IPG Aceh 92,71 dan nasional 92,29 tetapi belum mencapai angka 100 yang menggambarkan rasio perbandingan sempurna. Persamaan Peranan antara Perempuan dan Laki-laki yang digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal yang ditandai dengan IDG pada tahun 2023 sebesar 65,7, walaupun lebih baik dari IDG Aceh sebesar 63,57 namun masih berada di bawah IDG nasional sebesar 76,9. Di samping itu juga masih terjadi Ketimpangan Gender di Kota Lhokseumawe yang ditandai dengan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 sebesar 0,345. Upaya yang dapat ditempuh oleh

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu dengan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan. Memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya untuk meningkatkan minat baca, dapat dilakukan dengan pengembangan program promosi literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan terutama di perpustakaan daerah. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam keterampilan literasi digital, pelatihan keterampilan literasi, membangun budaya baca yang kuat dan berkelanjutan dengan menyediakan pojok-pojok baca di setiap ruang publik. Selanjutnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Lhokseumawe pemerintah dapat meningkatkan akses kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan makanan bergizi seimbang, membentuk Dapur Pangan Sehat di setiap gampong dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi balita terutama balita stunting. Pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan, meningkatkan akses ibu hamil dan anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi dan layanan reproduksi yang komprehensif. Meningkatkan akses masyarakat ke sanitasi yang layak dan air bersih, serta penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

4.2.4.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Masih terdapat penduduk miskin di Kota Lhokseumawe yang mencapai 23.100 jiwa atau 10,73 persen dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Aceh tingkat kemiskinan di Lhokseumawe masih lebih baik, dimana tingkat kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun tingkat

kemiskinan Kota Lhokseumawe masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Selanjutnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah bantuan sosial yang bersifat produktif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemberian pelatihan usaha dan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe juga tergolong masih tinggi, berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPT Kota Lhokseumawe 8,78 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Aceh sebesar 6,03 persen, dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga masih fluktuatif dan masih berada di bawah rata-rata TPAK Aceh. Hal ini ditandai pada tahun 2023 TPAK Lhokseumawe sebesar 64,36%, sedangkan TPAK Aceh sebesar 64,77%. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan tingkat pengangguran adalah pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan terhadap nelayan dengan menyediakan akses teknologi perikanan yang modern, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan tenaga kerja siap pakai. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.2.4.5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal

Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, hal ini ditandai dengan belum tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi, dimana IRB dalam kategori CC dengan capaian angka 54,79. Kategori ini masih belum memenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam

RPJM dengan kategori B. Pemanfaatan Digital untuk Pelayanan Publik belum optimal, yang ditandai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori Kurang dengan nilai 1,54 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1503 tahun 2021. Nilai tersebut masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh yang mencapai 3,19 dengan kategori Baik. Pada tahun 2023 Indeks SPBE Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 2,53 dengan kategori Cukup, nilai ini juga masih berada di bawah Indeks SPBE Aceh sebesar 3,62 dengan kategori Sangat Baik. Pembangunan Sumber Daya ASN masih rendah, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2023 sebesar 33 dengan kategori Buruk. Masih rendahnya Pejabat ASN Kota Lhokseumawe yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, hal ini ditandai dengan persentase ASN yang mengikuti Diklat sebesar 17,78 persen. Belum terintegrasinya data sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD saat ini masih mencakup integrasi perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan realisasi pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan. Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan, dan masih rendahnya tingkat Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe, hal ini ditandai dengan nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 berada dalam predikat “Kota Kurang Inovatif” dengan nilai IID sebesar 10,60, walaupun Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023 meningkat menjadi 36,38 dengan predikat "Kota Inovatif", tetapi posisi Kota Lhokseumawe masih berada pada peringkat 83 dari 93 kota di Indonesia. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum, hal ini ditandai dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hanya sebesar 79,76 persen lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Kemandirian pendanaan masih rendah. Hal ini ditandai dengan pendanaan pembangunan masih bertumpu pada dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk

peningkatan tata kelola pemerintahan dengan cara memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat dan Bappeda untuk memastikan penggunaan sumberdaya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan, mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Sistem ini dapat mencakup manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan layanan publik, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi. Dalam hal peningkatan ruang kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer, memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar. Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan. Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif. Untuk peningkatan pendayagunaan riset dan inovasi daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus pada upaya optimalisasi riset dan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan regulasi pengembangan riset dan inovasi, kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya riset dan inovasi melalui

program pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

4.2.4.6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, hal ini ditandai dengan IKLH Kota Lhokseumawe 63,4 dengan predikat Sedang yang terdiri dari IKU 89,96, IKA 58,57, dan IKL 22,58 dengan predikat Waspada. Walaupun IKLH Kota Lhokseumawe meningkat jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2022, namun masih terdapat satu indikator yang mengalami penurunan yaitu IKU dari tahun 2022 sebesar 91,2. Pengelolaan persampahan juga masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan penanganan sampah mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 81,13 persen dari tahun 2021 86,25 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan upaya untuk mendorong pengelolaan hidup dan persampahan melalui program kampanye promosi kebersihan lingkungan dan bebas sampah, penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kebersihan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan, membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui penataan tempat pengolahan sampah, menyediakan armada pengangkut sampah, disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Manajemen kebencanaan masih belum optimal yang ditandai dengan Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe yang masih berada pada kategori sedang dengan nilai 130,44 pada tahun 2022 dan 124,22 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk penguatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko kebencanaan

melalui penyusunan dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan menghadapi bencana. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti pesisir, dan lereng-lereng bukit rawan longsong. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti pos evakuasi, pos-pos kesehatan, dan jalur evaluasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana, meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir terutama di waktu musim penghujan, meningkatkan institusi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, membangun kerjasama dan sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

4.2.4.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas

Masih belum optimalnya rumah dengan sanitasi layak, hal ini ditandai dengan rumah tinggal berakses sanitasi layak sebesar 71,08 persen, yang menunjukkan bahwa terdapat 28,92 persen rumah tinggal yang belum bersanitasi layak di Kota Lhokseumawe, dan pada tahun 2023 terdapat rumah tinggal belum bersanitasi layak 27,33 persen. Akses penduduk terhadap Air Minum masih rendah, yang ditandai dengan penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 22,57 persen pada tahun 2022, bahkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 22,45 persen. Penyediaan Rumah Layak Huni belum optimal, hal ini ditandai dengan masih terdapat sekitar 27,93 persen rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe. Kondisi kemantapan jalan kota mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan Kondisi Jalan Mantap pada tahun 2023 sebesar 69,52 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 76,97 persen dan masih berada di bawah kondisi mantap jalan provinsi yang mencapai 84,41 persen dan kondisi jalan mantap nasional sebesar 98,65 persen. Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat

mengambil langkah-langkah dengan perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada seluruh masyarakat yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta melakukan penataan kawasan permukiman kumuh.



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - V REKOMENDASI

**RPJMK
LHOKSEUMAWE
2025 - 2029**

BAB V
REKOMENDASI

5.1. Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis Tahun 2025-2029

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045 dijabarkan dalam arah kebijakan dalam periode jangka menengah untuk 5 (lima) tahunan. Arah kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi isu strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

5.1.1. Transformasi Sosial

- 1. Kesehatan Untuk Semua, Sasaran**, dengan sasaran pokok: Kesehatan untuk Semua melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejateraan SDM Kesehatan.

Tabel 5.1
Isu Strategis Pada Dinas Kesehatan

Indikator		Target Daerah	
		2025	2029
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,95	75,88
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	220	169
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28	20
3.	Penanganan Tuberkulosis:		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	100

Indikator		Target Daerah	
		2025	2029
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100

- 2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata**, dengan sasaran pokok Pendidikan Berkualitas dan merata melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah,

Tabel 5.2
Isu Strategis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator		Target Daerah	
		2025	2029
1.	Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase Satuan Pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	64,84	69,63
	- Numerasi	55,53	61,57
	b) Persentase Satuan Pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	58,36	62,77
	- Numerasi	39,5	47,13
	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,12	11,89
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,69	16,27
2.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	28,13	28,43

Indikator		Target Daerah	
		2025	2029
3.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	56,62	61,22

- 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif**, dengan sasaran pokok Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktek buang air besar sembarangan (BABS), akses Rumah layak, terutama di perkotaan.

Tabel 5.3
Isu Strategis Pada Bappeda, DPMPSTSP & Naker dan Dinas Sosial

Indikator		Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,58	8,08	Bappeda
2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	47.09	53.59	DPMPSTSP & Naker
3.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	4,7	17,28	Dinsos

5.1.2. Transformasi Ekonomi

- 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**, dengan sasaran pokok Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, jalan provinsi,

perhubungan, pemerataan listrik, peningkatan produktivitas BUMD dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan IPTEK dan Inovasi, pengembangan BUMD.

Tabel 5.4
Isu Strategis Pada Bappeda, Disporapar, Disperindagkop & UMKM, DPMPSTP & Naker dan Bagian Ekonomi Setdako

	Indikator	Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,45	20,24	Bappeda
2.	Pengembangan Pariwisata			
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,20	2,39	Disporapar
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	N/A	N/A	Disporapar
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama	N/A	N/A	Disporapar
4.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	6,08	9,59	Disperindagkop & UMKM
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1,54	2,21	Disperindagkop & UMKM
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,92	7,25	Disperindagkop & UMKM
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,15	1,99	Disperindagkop & UMKM
	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,06	1,25	Bag. Ekonomi
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,78	7,71	DPMPSTP & Naker

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,33	52,05	DPMPTSP & Naker
7. Tingkat Penguasaan IPTEK:			
a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	0,024	0,52	Bappeda
b) Peringkat Inovasi Daerah	83	68,50	Bappeda
c) Indeks Inovasi Daerah (IID)	10,6	22,95	Bappeda

2. **Penerapan Ekonomi Hijau**, dengan sasaran pokok Penerapan Ekonomi Hijau melalui meningkatkan porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.

Table 5.5
Isu Strategis Pada DLH dan Dinas PUPR

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N/A	N/A	DLH
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A	N/A	Dinas PUPR

3. **Transformasi Digital**, dengan sasaran pokok Transformasi Digital melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital.

Tabel 5.6
Isu Strategis Pada Diskominfo

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Indek Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	N/A	Diskominfo

- 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**, dengan sasaran pokok Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyediaan produk pertanian yang berpotensi pasar global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistic, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata rantai global, Kerjasama global.

Tabel 5.7
Isu Strategis Pada Bappeda dan Disperindagkop & UMKM

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	Disperindagkop3 & UMKM
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	47,93	47,95	Bappeda
3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(7.36)	(5.30)	Disperindagkop3 & UMKM

- 5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**, dengan sasaran pokok Menjadikan perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerjasama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana kota, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, penyediaan infrastruktur

energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Tabel 5.8
Isu Strategis Pada Bappeda, Dinas PUPR dan DPMG

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
a) Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap Nasional	0,05	0,06	Bappeda
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	70	77,50	Dinas PUPR
c1) Persentase Desa Mandiri	14,71	23,90	DPMG
c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,74	0,77	DPMG

5.1.3. Transformasi Tata Kelola

- Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif**, dengan sasaran pokok Reformasi tata Kelola dan perkuatan otonomi Aceh melalui Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembangaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi, dengan arah kebijakan.

Tabel 5.9
Isu Strategis Pada Bag. Hukum, Diskominfo, Bag. Organisasi dan Inspektorat

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Indeks Reformasi Hukum	55,15	60,27	Bag. Hukum
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	1,54	2,41	Diskominfo

	Indikator	Target Daerah		OPD
		2025	2029	
	Elektronik			
3.	Indeks Pelayanan Publik	3,33	3,75	Bag. Organisasi
4.	Indeks Integritas	69,45	74,59	Inspektorat

5.1.4. Transformasi Hukum, Stabilitas dan Implementasi Syariat Islam

- Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial**, dengan sasaran pokok Perkuatan Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung keamanan dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 5.10
Isu Strategis Pada Bag. Hukum dan Dinas Kesbangpol

	Indikator	Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan			
	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	Bag. Hukum
2.	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	85	87,50	Satpol PP & WH
3.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilukada	79,75	83,56	Dinas Kesbangpol

2. **Stabilitas Ekonomi Makro**, dengan sasaran pokok Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan pengendalian inflasi, peningkatan pajak daerah, stabilitas sektor keuangan daerah, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit.

Tabel 5.11
Isu Strategis Pada PBKD, Bag. Ekonomi dan Bappeda

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,86	1,00	BPKD
2. Tingkat Inflasi (%)	1,35-2.00	2,13	Bag. Ekonomi
3. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	24,53	33,20	BPKD
b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43	0,54	Bappeda
c) Nilai Transaksi Saham Per Kab/Kota Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	42,15	45,70	Bag. Ekonomi
d) Total Kredit/PDRB (%)	42,15	45,70	Bag. Ekonomi
4. Inklusi Keuangan (%)	94,91	95,95	Bag. Ekonomi

3. **Syariat Islam**, dengan sasaran pokok syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal.

Tabel 5.12
Isu Strategis Pada Dinas Syariat Islam dan Dayah

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Indeks Pembangunan Syariat	82,84	85,54	DSI-PD

Indikator		Target Daerah		OPD
		2025	2029	
2.	Persentase dayah yang mandiri	2,00	17,75	DSI-PD

5.1.5. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**, dengan sasaran pokok Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

Tabel 5.13
Isu Strategis Pada Dinas PK dan Dinas Kesbangpol

Indikator		Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45-53-46	56,49	Dinas PK
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7-73,81	74,36	Dinas Kesbangpol

- Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**, dengan sasaran pokok Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.

Table 5.14
Isu Strategis Pada DP3AP2KB

Indikator		Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,57	62,55	DP3AP2KB

	Indikator	Target Daerah		OPD
		2025	2029	
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,345	0,33	DP3AP2KB

- 3. Lingkungan Hidup Berkualitas,** dengan sasaran pokok Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular ekonomi.

Tabel 5.15
Isu Strategis Pada DLH dan Dinas PUPR

	Indikator	Target Daerah		OPD
		2025	2029	
1.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	N/A	DLH
2.	Kualitas Lingkungan Hidup			
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62,54	70,73	DLH
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	11.23	24.57	Dinas PUPR
	c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	0,0003	22,39	DLH
	d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	2,79	27,09	DLH

- 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan,** dengan sasaran pokok Peningkatan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi

dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan.

Tabel 5.16
Isu Strategis Pada Dinas PUPR. Dan DKPPP

Indikator	Target Daerah		OPD
	2025	2029	
1. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
a) Ketahanan Energi			
- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1223	1783	Dinas PUPR
- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	N/A	N/A	Dinas PUPR
b) Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	6,09	5,07	DKPPP
c) Ketahanan Air			
-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,05	1,92	Dinas PUPR
-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32	49	Dinas PUPR

- 5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim,** sasaran pokok Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 5.17
Isu Strategis Pada BPBD dan DLH

Indikator		Target Daerah		OPD
		2024	2029	
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	128,61	117,86	BPBD
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	a. Kumulatif	11,38	16,18	DLH
	b. Tahunan	33,89	48,19	DLH

5.2. Rekomendasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJPK Lhokseumawe (Tahun 2025-2045) Tahapan Pertama Tahun 2025-2029

5.2.1. Transformasi sosial dititikberatkan pada:

1. Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar;
2. Peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan;
3. Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;
4. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok Masyarakat;
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan;
6. Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan Masyarakat;
7. Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan numerasi bagi seluruh peserta didik; dan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS.

5.2.2. Transformasi ekonomi difokuskan pada:

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan;

2. Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan;
3. Optimalisasi kemudahan investasi;
4. Peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif;
5. Mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja;
6. Meningkatkan daya tarik dan promosi wisata; dan
7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi PAD dan retribusi daerah.

5.2.3. Transformasi tata kelola difokuskan pada:

1. Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka Panjang;
2. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;
3. Peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah;
4. Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP; dan
5. Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan.

5.2.4. Mewujudkan ketertiban daerah dengan:

1. Penegakan hukum;
2. Stabilitas dan implementasi Syariat Islam difokuskan pada pengembangan budaya hukum, penegakan hukum yang adil;
3. Ketertiban Masyarakat;
4. Stabilitas ekonomi yang ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor;

5. Menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan;
6. Pemantapan pelaksanaan nilai Syariat Islam dengan memantapkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada Masyarakat: dan
7. Pendidikan keagamaan secara optimal.

5.2.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada:

1. Penguatan Kelembagaan kesetaraan gender;
2. Penguatan kelembagaan kepengurusan anak;
3. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius dan melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan local;
4. Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana;
5. Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional;
6. Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
7. Peningkatan diversifikasi tanam;

5.2.6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas dengan difokuskan pada:

1. Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota;
2. Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah;
4. Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman;
5. Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
6. Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

5.2.7. Kestinambungan Pembangunan:

1. Memastikan perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka Panjang;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan kesinanbungan pembangunan dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

5.3. Rekomendasi Program dan Kegiatan Prioritas bedasarkan RTRW

5.3.1. Perwujudan Rencana Struktur Ruang

5.3.1.1. Sistem Pusat Pelayanan

A. Pusat Pelayanan Kota

No	Program	Lokasi
1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
2	Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
5	Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan	Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
6	Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR)	Kota Lhokseumawe

B. Sub Pusat Pelayanan Kota

No	Program	Lokasi
1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama 16awasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran	Gampong Mon Geudong di Kecamatan Banda Sakti
2	Penetapan dan pengembangan	Gampong Mns. Panggoi di

No	Program	Lokasi
	fungsi utama 17awasan perdagangan dan jasa, 17awasan permukiman, 17awasan perkantoran dan 17awasan pendidikan	Kecamatan Muara Dua
3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama 17awasan perdagangan dan jasa, 17awasan permukiman, 17awasan 17awasan1717n, Kawasan 17awasan17 dan kegiatan ruang terbuka hijau	Gampong Batuphat Barat di Kecamatan Muara Satu
4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama 17awasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian	Gampong Blang Punteuet di Kecamatan Blang Mangat

C. Pusat Pelayanan Lingkungan

No	Program	Lokasi
1	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan	Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti
2	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran	Gampong Alue Lim di Kecamatan Blang Mangat
3	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya	Gampong Meunasah Blang di Kecamatan Muara Dua
4	Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran	Gampong Batuphat Barat di Kecamatan Muara Satu
5	Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya	Kota Lhokseumawe

5.3.1.2. Sistem Jaringan Transportasi

A. Sistem Jaringan Jalan

No	Program	Lokasi
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Lhokseumawe
2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Lhokseumawe
3	Rehabilitasi Jalan	Kota Lhokseumawe
	a. Jalan Ateri Primer	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Primer pada ruas Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe)	<p>a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti. <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Keude Cunda; 2. Gampong Meunasah Mesjid; 3. Gampong Mns. Panggoi; 4. Gampong Uteunkot.
	2) Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Primer pada ruas Sp. CundaBuket Rata	<p>Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; dan 6. Gampong Uteunkot.
	3) Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Primer pada ruas Buket RataBts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Keude Punteuet; 2. Gampong Mesjid Punteuet; 3. Gampong Ulee Blang Mane. b. Gampong Alue Awe di

No	Program	Lokasi
		b. Kecamatan Muara Dua 1. Gampong Alue Awe
	b. Jalan Arteri Sekunder	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder pada ruas jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala)	a. Kecamatan Banda Sakti 1. Gampong Ujong Blang b. Kecamatan Muara Satu 1. Gampong Blang Payang
	2) Pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder pada ruas Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Pusong Baru; 7. Gampong Pusong Lhokseumawe; 8. Gampong Ujong Blang; 9. Gampong Ulee Jalan b. Kecamatan Muara Dua 1. Gampong Meunasah Mee
	c. Jalan Kolektor Primer	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer	1. Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata; 2. Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe); 3. Jl. Cunda Lhokseumawe; 4. Jl. Padang Sakti I; 5. Jl. Teungku Akhmad Kandang; 6. Jl. Alue Raya Line Pipa; 7. Jl. Cot Sabong Jeulikat; 8. Jl. Jambo Timu Lancok; 9. Jl. Kenari; 10. Jl. Merdeka Barat; 11. Jl. Merdeka Timur; 12. Jl. Pase; 13. Jl. Sp. Buloh Line Pipa; 14. Jl. Sp. Kandang Alue Liem; 15. Jl. Stadion Tunas Bangsa; 16. Jl. Tgk Chik di Paloh; dan

No	Program	Lokasi
		17. Ujong Pacu.
	2) Peningkatan status jalan nasional	Jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe
	d. Jalan Lokal Primer	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Air Bersih; 2. Jl. Akhmad Kandang; 3. Jl. Alkalali; 4. Jl. Aman; 5. Jl. Ampera; 6. Jl. Bakau; 7. Jl. Bangdes; 8. Jl. Blang Pulo Blang Naleung Mameh; 9. Jl. Blang Weu Baroh; 10. Jl. Cempaka Putih; 11. Jl. Cut Meutia; 12. Jl. Diponegoro; 13. Jl. Goa Jepang; 14. Jl. Gudang; 15. Jl. Gudang Baru; 16. Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath; 17. Jl. Haji Tana; 18. Jl. Imam; 19. Jl. Iskandar Muda; 20. Jl. Jamaika Timur; 21. Jl. Jambo Timu Lancok; 22. Jl. Kenari; 23. Jl. Keuchik Daud; 24. Jl. Koperasi; 25. Jl. Lr. Baroena/Listrik; 26. Jl. Lr. Blang Geulumpang; 27. Jl. Lr. Hasan; Jl. Lr. Kenanga; 28. Jl. Lr. Kuburan/Darussalam; 29. Jl. Lr. Kuta Kareung; 30. Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen; 31. Jl. Lr. Tgk Ben Puteh; 32. Jl. Lr. Suud/SMPN 8; 33. Jl. Lr. Tgk. Gambang; 34. Jl. Mahoni; 35. Jl. Malikussaleh; 36. Jl. Merpati; 37. Jl. Nelayan; 38. Jl. Palapa; 39. Jl. Paloh Bate; 40. Jl. Pandan/Uteun Bayi;

No	Program	Lokasi
		41. Jl. Panglath; 42. Jl. Panglima Kaom; 43. Jl. Pasar Sayur; 44. Jl. Pase; 45. Jl. Pelangi; 46. Jl. Pelita; 47. Jl. Pendidikan; 48. Jl. Perdagangan; 49. Jl. Perikanan; 50. Jl. Perniagaan; 51. Jl. Perum Bambu Kuning; 52. Jl. Peutua Rumoh Rayeuk; 53. Jl. Peutua Ali; 54. Jl. Peutua Beurahim; 55. Jl. Peutua Malim; 56. Jl. PPI Pusong; 57. Jl. Pramuka; 58. Jl. Purnawirawan; 59. Jl. PWI; 60. Jl. PWI I; 61. Jl. Rahmat; 62. Jl. Rumah Alue; 63. Jl. Samudera; 64. Jl. Samudera Baru; 65. Jl. Seuneubok - Line Pipa; 66. Jl. Stadion Tunas Bangsa; 67. Jl. Stasiun; 68. Jl. Suka Ramai; 69. Jl. T. Chik di Tiro; 70. Jl. T. Hamzah Bendahara; 71. Jl. T. Nyak Adam Kamil; 72. Jl. T.U. Agam; 73. Jl. Teratai Putih; 74. Jl. Teuku Chik di Tunong; 75. Jl. Teuku Syarief; 76. Jl. Teuku Umar; 77. Jl. Tgk Affan SMAN 3; 78. Jl. Tgk. Cik di Tunong; 79. Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan; 80. Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan 81. Jl. Ujong Pacu
	e. Jalan Lokal Sekunder	

No	Program	Lokasi
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Kuta Blang; 2. Gampong Mon Geudong; 3. Gampong Pusong Lhokseumawe; 4. Gampong Simpang Empat; 5. Gampong Tumpok Teungoh; 6. Gampong Ujong Blang; dan 7. Gampong Uteun Bayi. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Blang Weu Baroh; 4. Gampong Jambo Mesjid; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Kumbang Punteuet; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Mesjid Punteuet; 9. Gampong Rayeuk Kareung; 10. Gampong Tunong; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Keude Cunda; 6. Gampong Lhok Mon Puteh; 7. Gampong Meunasah Alue; 8. Gampong Meunasah Blang; 9. Gampong Meunasah Mayang; 10. Gampong Meunasah Mee; 11. Gampong Meunasah

No	Program	Lokasi
		<p>Mesjid;</p> <p>12. Gampong Mns. Panggoi;</p> <p>13. Gampong Paya Bili;</p> <p>14. Gampong Paya Punteuet; dan</p> <p>15. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdapat di:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Naleung Mameh;</p> <p>4. Gampong Blang Panyang;</p> <p>5. Gampong Blang Pulo;</p> <p>6. Gampong Cot Trieng;</p> <p>7. Gampong Meunasah Dayah;</p> <p>8. Gampong Meuria Paloh;</p> <p>9. Gampong Padang Sakti;</p> <p>10. Gampong Paloh Puntti;</p> <p>11. Gampong Ujong Pacu.</p>
	2) Rencana umum (masterplan) pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder	Kota Lhokseumawe
	f. Jalan Lingkungan Primer	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Prime	Kota Lhokseumawe
	g. Jalan Lingkungan Sekunder	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder	Kota Lhokseumawe
	h. Jalan Khusus	
	1) Pembangunan dan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan line pipa	<p>a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Blang Pulo;</p> <p>2. Gampong Padang Sakti; dan</p> <p>3. Gampong Paloh Puntti.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Blang Buloh;</p> <p>4. Gampong Blang Weu</p>

No	Program	Lokasi
		Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Seuneubok
	2) Pembangunan dan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua
	3) Pembangunan dan pengembangan Jalan Khusus berupa jalan akses KEK Arun	Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Meuria Paloh; dan 5. Gampong Padang Sakti
	i. Jalan Tol	
	1) Pembangunan exit tol LangsaLhokseumawe	Kota Lhokseumawe
	2) Pembangunan exit tol Lhokseumawe-Sigli	Kota Lhokseumawe
	3) Pembahasan lahan untuk Pembangunan exit tol LangsaLhokseumaw	Kota Lhokseumawe
	4) Pembahasan lahan untuk Pembangunan exit tol Lhokseumawe-Sigli	Kota Lhokseumawe
	j. Terminal Penumpang	
	1) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua
	2) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti
	3) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi	Kota Lhokseumawe
	k. Terminal Barang	
	1) Pengembangan Terminal Barang Gampong Meunasah Mee di Kota Lhokseumawe	Kecamatan Muara Dua
	l. Jembatan	
	1) Pembangunan dan pengembangan jembatan	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Mon Geudong;

No	Program	Lokasi
		<p>3. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan</p> <p>4. Gampong Ujong Blang.</p> <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Cut Mamplam;</p> <p>3. Gampong Keude Cunda;</p> <p>4. Gampong Meunasah Alue;</p> <p>5. Gampong Meunasah Blang;</p> <p>6. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>7. Gampong Meunasah Mesjid;</p> <p>8. Gampong Mns. Panggoi;</p> <p>9. Gampong Paya Bili; dan</p> <p>10. Gampong Uteunkot.</p> <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Naleung Mameh;</p> <p>4. Gampong Blang Panyang;</p> <p>5. Gampong Blang Pulo;</p> <p>6. Gampong Cot Trieng;</p> <p>7. Gampong Meunasah Dayah;</p> <p>8. Gampong Meuria Paloh;</p> <p>9. Gampong Paloh Punt; dan</p> <p>10. Gampong Ujong Pacu.</p> <p>d. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Baloi;</p> <p>4. Gampong Blang Buloh;</p> <p>5. Gampong Blang Cut;</p> <p>6. Gampong Blang Teue;</p> <p>7. Gampong Jambo Mesjid;</p> <p>8. Gampong Jambo Timu;</p> <p>9. Gampong Kuala;</p> <p>10. Gampong Kumbang Punteuet;</p> <p>11. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>12. Gampong Mane Kareung;</p>

No	Program	Lokasi
		13. Gampong Rayeuk Kareung; 14. Gampong Ulee Blang Mane; dan 15. Gampong Tunong
	2) Penggantian Jembatan	Kota Lhokseumawe
	3) Pembangunan fly over Cunda	Kota Lhokseumawe
	m. Jaringan Jalur Kereta Api	
	1) Pengembangan jaringan dan layanan jaringan jalur kereta api antarkota Banda Aceh - Sigli - Bireun	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Blang Weu Baroh; 4. Gampong Mesjid Punteuet; dan 5. Gampong Rayeuk Kareung. <p>b. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meunasah Dayah; 8. Gampong Meuria Paloh; 9. Gampong Padang Sakti; dan 10. Gampong Paloh Punt. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Alue. 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Paloh Batee;

No	Program	Lokasi
		8. Gampong Paya Bili; dan 9. Gampong Paya Punteuet.
	2) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api khusus yang menghubungkan wilayah sumber daya ke pelabuhan	Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; dan 3. Gampong Blang Naleung Mameh.
	n. Stasiun Kereta Api	
	1) Pembangunan dan pengembangan stasiun penumpang	1. Gampong Rayeuk Kareung di Kecamatan Blang Mangat; 2. Gampong Blang Crum dan Gampong Cot Girek Kandang di Kecamatan Muara Dua; dan 3. Gampong Blang Panyang dan Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu.
	o. Terminal Khusus	
	1) Pengembangan Terminal khusus Migas V	Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu
	2) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II	Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti
	p. Pelabuhan Perikanan	
	1) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pusong	Gampong Pusong Lhokseumawe di Kecamatan Banda Sakti
	2) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang	Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti

5.3.1.3. Sistem Jaringan Energi

A. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

1. Jaringan Minyak Bumi dan Gas Bumi

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan

No	Program	Lokasi
		Kareueng; 3. Gampong Blang Buloh 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareueng; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Seuneubok. b. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Meuria Paloh; 3. Gampong Padang Sakti; 4. Gampong Paloh Puntti.
1.2	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; 6. Gampong Kota Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang Garam; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Weu Baroh; 3. Gampong Blang Weu Panjoe; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Keude Punteuet; 6. Gampong Mesjid Punteuet;

No	Program	Lokasi
		7. Gampong Seuneubok; 8. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Mee; 9. Gampong Meunasah Mesjid; 10. Gampong Mns. Panggoi; 11. Gampong Paya Peunteut; 12. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; dan 9. Gampong Ujong Pacu

2. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	a. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Panyang; dan 2. Gampong Meuria Paloh.

No	Program	Lokasi
		b. Kecamatan Banda Sakti 1. Gampong Hagu Teungoh

B. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh Sigli-Lhokseumawe-Langsa Medan-Tebing Tinggi	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Baloi; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Kuala; 4. Gampong Teungoh; dan 5. Gampong Tunong. b. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cut Mamplam; 3. Gampong Meunasah Alue; 4. Gampong Meunasah Blang; 5. Gampong Meunasah Mesjid; 6. Gampong Meunasah Mee; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Bili; 9. Gampong Uteunkot; dan 10. Gampong Paya Peunteut. c. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Meunasah Dayah; dan 5. Gampong Meuria Paloh.
1.2	Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Baloi;

No	Program	Lokasi
		<p>2. Gampong Kuala; 3. Gampong Mesjid Peunteut; 4. Gampong Teungoh; 5. Gampong Tunong; dan 6. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Meunasah Alue; 7. Gampong Meunasah Blang; 8. Gampong Meunasah Manyang; 9. Gampong Meunasah Mee; 10. Gampong Mns. Panggoi; 11. Gampong Paya Bili; 12. Gampong Uteunkot; dan 13. Gampong Paya Peunteut.</p> <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Meunasah Dayah; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; 8. Gampong Paloh Punt; dan 9. Gampong Ujong Pacu.</p>
1.3	Pengembangan Saluran Transmisi lainnya	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim;</p>

No	Program	Lokasi
		2. Gampong Jeulikat; 3. Gampong Keude Punteuet; 4. Gampong Mesjid Punteuet; dan 5. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdapat di: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Mee; 5. Gampong Meunasah Mesjid; 6. Gampong Mns. Panggoi; dan 7. Gampong Uteunkot. c. Kecamatan Muara Satu, terdapat di: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Padang Sakti.

2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang

No	Program	Lokasi
		<p>Garam;</p> <p>8. Gampong Mon Geudong;</p> <p>9. Gampong Pusong Baru;</p> <p>10. Gampong Pusong Lhokseumawe;</p> <p>11. Gampong Simpang Empat;</p> <p>12. Gampong Ujong Blang; dan</p> <p>13. Gampong Ulee Jalan.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Baloi;</p> <p>4. Gampong Blang Buloh;</p> <p>5. Gampong Blang Cut;</p> <p>6. Gampong Blang Punteuet;</p> <p>7. Gampong Blang Weu Baroh;</p> <p>8. Gampong Blang Weu Panjoe;</p> <p>9. Gampong Jambo Mesjid;</p> <p>10. Gampong Jambo Timu;</p> <p>11. Gampong Jeulikat;</p> <p>12. Gampong Keude Punteuet;</p> <p>13. Gampong Kuala;</p> <p>14. Gampong Kumbang Punteuet;</p> <p>15. Gampong Mane Kareung;</p> <p>16. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>17. Gampong Rayeuk Kareung;</p> <p>18. Gampong Seuneubok;</p> <p>19. Gampong Teungoh;</p> <p>20. Gampong Tunong; dan</p> <p>21. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p>

No	Program	Lokasi
		3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; 8. Gampong Paloh Punt; dan 9. Gampong Ujong Pacu. d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Alue. 9. Gampong Meunasah Blang; 10. Gampong Meunasah Manyang; 11. Gampong Meunasah Mee; 12. Gampong Meunasah Mesjid; 13. Gampong Mns. Panggoi; 14. Gampong Paya Bili; 15. Gampong Paya Punteuet; dan 16. Gampong Uteunkot
1.2	Kajian rencana pengadaan tenaga listrik	Kota Lhokseumawe
1.3	Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe

3. Gardu Listrik

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Gardu Listrik	Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.

4. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

No	Program	Lokasi
1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu
1.2	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu

5.3.1.4. Sumber Jaringan Telekomunikasi

A. Jaringan Tetap

No	Program	Lokasi
1	Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Pusong Baru; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu

No	Program	Lokasi
		<p>Baroh;</p> <p>8. Gampong Blang Weu Panjoe;</p> <p>9. Gampong Jambo Mesjid;</p> <p>10. Gampong Jambo Timu;</p> <p>11. Gampong Jeulikat;</p> <p>12. Gampong Keude Punteuet;</p> <p>13. Gampong Kuala;</p> <p>14. Gampong Kumbang Punteuet;</p> <p>15. Gampong Mane Kareung;</p> <p>16. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>17. Gampong Rayeuk Kareung;</p> <p>18. Gampong Seuneubok;</p> <p>19. Gampong Teungoh;</p> <p>20. Gampong Tunong; dan</p> <p>21. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Blang Poroh;</p> <p>4. Gampong Cot Girek Kandang;</p> <p>5. Gampong Cut Mamplam;</p> <p>6. Gampong Keude Cunda;</p> <p>7. Gampong Lhok Mon Puteh;</p> <p>8. Gampong Meunasah Alue.</p> <p>9. Gampong Meunasah Blang;</p> <p>10. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>11. Gampong Meunasah Mee;</p> <p>12. Gampong Meunasah Mesjid;</p> <p>13. Gampong Mns. Panggoi;</p> <p>14. Gampong Paya Bili;</p> <p>15. Gampong Paya Punteuet; dan</p>

No	Program	Lokasi
		16. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; 9. Gampong Paloh Punt; dan 10. Gampong Ujong Pacu
2	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap	Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua
3	Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan menara	Kota Lhokseumawe
4	Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel	Kota Lhokseumawe
5	Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe

B. Jaringan Bergerak

No	Program	Lokasi
1	Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Mon Geudong; 5. Gampong Pusong Lhokseumawe; 6. Gampong Tumpok Teungoh; 7. Gampong Ujong Blang; dan 8. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Muara Dua ,

No	Program	Lokasi
		terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Poroh; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Alue; dan 5. Gampong Meunasah Mee. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Naleung Mameh; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Padang
2	Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital	Kota Lhokseumawe
3	3 Kajian Pembangunan Menara BTS	Kota Lhokseumawe
4	Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum	Kota Lhokseumawe
5	Pembangunan menara bersama	Kota Lhokseumawe

5.3.1.5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

A. Sistem Jaringan Irigasi

No	Program	Lokasi
1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Weu Baroh;

No	Program	Lokasi
		8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Kuala; 13. Gampong Kumbang Peunteuet; 14. Gampong Mane Kareung; 15. Gampong Rayeuk Kareung; 16. Gampong Seuneubok; 17. Gampong Teungoh; dan 18. Gampong Tunong. b. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Blang Crum; Dan 4. Gampong Cut Mamplam.
2	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Mane Kareung; 11. Gampong Rayeuk Kareung; 12. Gampong Seuneubok; 13. Gampong Tunong; dan 14. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe;

No	Program	Lokasi
		2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Manyang; dan 5. Gampong Meunasah Mee. c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meuria Paloh; 4. Gampong Padang Sakti; 5. Gampong Paloh Puntti; dan 6. Gampong Ujung Pacu
3	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Teueu; 8. Gampong Blang Weu Baroh; 9. Gampong Blang Weu Panjoe; 10. Gampong Jeulikat; 11. Gampong Kumbang Punteuet; 12. Gampong Mane Kareung; 13. Gampong Mesjid Punteuet; 14. Gampong Rayeuk Kareung; 15. Gampong Seuneubok; 16. Gampong Teungoh; 17. Gampong Tunong; dan 18. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cut Mamplam; dan

No	Program	Lokasi
		3. Gampong Meunasah Manyang. c. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; 6. Gampong Paloh Punt; dan 7. Gampong Ujung Pacu

B. Sistem Pengendalian Banjir

No	Program	Lokasi
1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Pusong Baru; 7. Gampong Pusong Lhokseumawe; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Asan Kareung; 2. Gampong Baloi; 3. Gampong Blang Punteuet; 4. Gampong Jambo Mesjid; 5. Gampong Jambo Timu; 6. Gampong Keude Punteuet; 7. Gampong Kuala;

No	Program	Lokasi
		8. Gampong Mane Kareung; 9. Gampong Rayeuk Kareung; 10. Gampong Tunong; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Cut Mamplam; dan 2. Gampong Meunasah Mee. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Blang Naleung Mameh; 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Ujong Pacu
2	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Asan Kareung; 2. Gampong Blang Peunteuet; dan 3. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; dan 3. Gampong Ujong Pacu

C. Bangunan Sumber Daya Air

No	Program	Lokasi
1	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa pintu air	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan

No	Program	Lokasi
		<p>3. Gampong Hagu Barat Laut.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Mane Kareung; 6. Gampong Rayeuk Kareung; 7. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Timur; dan 2. Gampong Ujong Pacu. <p>d. Kecamatan Muara Dua, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Cot Girek Kandang
2	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 3. Gampong Hagu Barat Laut. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Jeulikat; 5. Gampong Mane Kareung; 6. Gampong Rayeuk Kareung; 7. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Timur; dan 2. Gampong Ujong Pacu.

No	Program	Lokasi
		d. Kecamatan Muara Dua , terdapat di: 1. Gampong Cot Girek Kandang.
3	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Lhokseumawe
4	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Lhokseumawe
5	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kota Lhokseumawe
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kota Lhokseumawe

5.3.1.6. Infrastruktur Perkotaan

A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	Program	Lokasi
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Lhokseumawe
2	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Lhokseumawe
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Lhokseumawe
4	Penataan jaringan dalam tanah	Kota Lhokseumawe
	a. Jaringan Perpipaan	
	1) Pengembangan unit air baku	a. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Jeulikat, dan b. Kecamatan Muara Satu , terdapat di: 1. Gampong Cot Trieng.
	2) Pengembangan jaringan air baku	a. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Jeulikat; 3. Gampong Keude Punteuet; 4. Gampong Mesjid Punteuet; dan 5. Gampong Ulee Blang Mane. b. Kecamatan Muara Dua , terdapat di:

No	Program	Lokasi
		1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Meunasah Manyang; 6. Gampong Meunasah Mee; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; dan 9. Gampong Uteunkot. c. Kecamatan Muara Satu , terdapat di: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Ujong Pacu
	3) Pengembangan unit produksi	a. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Jeulikat di b. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Padang Sakti; dan Gampong Ujong Pacu.
	4) Pengembangan unit distribusi	a. Kecamatan Banda Sakti ; (Seluruh gampong) b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh;

No	Program	Lokasi
		<p>5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mane Kareung; 16. Gampong Mesjid Punteuet; 17. Gampong Rayeuk Kareung; 18. Gampong Seuneubok; 19. Gampong Teungoh; 20. Gampong Tunong; dan 21. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Alue; 9. Gampong Meunasah Blang; 10. Gampong Meunasah Manyang; 11. Gampong Meunasah Mee; 12. Gampong Meunasah Mesjid;</p>

No	Program	Lokasi
		13. Gampong Mns. Panggoi; 14. Gampong Paya Bili; 15. Gampong Uteunkot; dan 16. Gampong Paya Peunteut d. Kecamatan Muara Satu, (Seluruh Gampong)
	b. Bukan Jaringan Perpipaan	
	1) Pembangunan dan pengembangan Terminal Air	a. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; (bukan jaringan perpipaan) 2. Gampong Blang Crum; dan 3. Gampong Paya Peunteut. b. Kecamatan Muara Satu, terdapat di: 1. Gampong Blang Panyang

B. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

No	Program	Lokasi
1	Penyusunan Masterplan Air Limbah	Kota Lhokseumawe
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	
4	Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT	
5	Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah	
6	Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah	
7	Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah	

No	Program	Lokasi
	a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	1) Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim <p>b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 2. Gampong Ujong Blang. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Blang Poroh; 3. Gampong Meunasah Manyang; dan 4. Gampong Mns. Panggoi. <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Meuria Paloh; dan 3. Gampong Paloh Punt
	b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	1) Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Jawa Baroe; 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat;

No	Program	Lokasi
		<p>12. Gampong Tumpok Teungoh;</p> <p>13. Gampong Ujong Blang;</p> <p>14. Gampong Ulee Jalan; dan</p> <p>15. Gampong Uteun Bayi.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Jeulikat;</p> <p>4. Gampong Keude Punteuet;</p> <p>5. Gampong Mane Kareung;</p> <p>6. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>7. Gampong Rayeuk Kareung; dan</p> <p>8. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Blang Poroh;</p> <p>4. Gampong Cot Girek Kandang;</p> <p>5. Gampong Cut Mamplam;</p> <p>6. Gampong Keude Cunda;</p> <p>7. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>8. Gampong Meunasah Mee;</p> <p>9. Gampong Meunasah Mesjid;</p> <p>10. Gampong Mns. Panggoi; dan</p> <p>11. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p>

No	Program	Lokasi
		3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Paloh Puntti

C. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat
2	Penyediaan buffer hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
3	Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kota Lhokseumawe

D. Sistem Jaringan Persampahan

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat
2	Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	
3	Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Kota Lhokseumawe
4	Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Ujong Blang; dan 3. Gampong Ulee Jalan b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari:

No	Program	Lokasi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Cut; 3. Gampong Blang Weu Panjoe; 4. Gampong Mesjid Peunteut; 5. Gampong Rayeuk Kareung; dan 6. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Meunasah Alue; 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Bili; 9. Gampong Paya Peunteut; dan 10. Gampong Uteunkot <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Naleung Mameh; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; dan 4. Gampong Meunasah Dayah.
5	Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, dump truck, amroll truck, bulldozer)	Kota Lhokseumawe
6	Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat	
7	Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan	

E. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

No	Program	Lokasi
1	Penyediaan jalur evakuasi Bencana	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Jawa Baroe; 6. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 7. Gampong Keude Aceh; 8. Gampong Kota Lhokseumawe; 9. Gampong Kuta Blang; 10. Gampong Lancang Garam; 11. Gampong Mon Geudong; 12. Gampong Pusong Lhokseumawe; 13. Gampong Simpang Empat; 14. Gampong Ujong Blang; 15. Gampong Ulee Jalan; dan 16. Gampong Uteun Bayi. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teue; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude

No	Program	Lokasi
		<p>Punteuet;</p> <p>13. Gampong Kuala;</p> <p>14. Gampong Kumbang Punteuet;</p> <p>15. Gampong Mane Kareung;</p> <p>16. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>17. Gampong Rayeuk Kareung;</p> <p>18. Gampong Seuneubok;</p> <p>19. Gampong Teungoh;</p> <p>20. Gampong Tunong; dan</p> <p>21. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Naleung Mameh;</p> <p>4. Gampong Blang Panyang;</p> <p>5. Gampong Blang Pulo;</p> <p>6. Gampong Cot Trieng;</p> <p>7. Gampong Meuria Paloh;</p> <p>8. Gampong Padang Sakti; dan</p> <p>9. Gampong Ujong Pacu.</p> <p>d. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Blang Poroh;</p> <p>4. Gampong Cot Girek Kandang;</p> <p>5. Gampong Cut Mamplam</p> <p>6. Gampong Keude Cunda;</p> <p>7. Gampong Lhok Mon Puteh;</p> <p>8. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>9. Gampong Meunasah Mee;</p> <p>10. Gampong Meunasah</p>

No	Program	Lokasi
		Mesjid; 11. Gampong Mns. Panggoi; 12. Gampong Paya Punteuet; dan 13. Gampong Uteunkot
2	Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana	a. Kecamatan Banda Sakti , terdapat di: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Keude Aceh; 4. Gampong Kota Lhokseumawe; 5. Gampong Lancang Garam; 6. Gampong Mon Geudong; 7. Gampong Pusong Baru; 8. Gampong Ujong Blang; dan 9. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Baroh; 5. Gampong Jambo Timo; 6. Gampong Jeulikat; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Mesjid Punteuet; 9. Gampong Tunong; dan 10. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua , terdapat di: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Blang; dan 5. Gampong Mns.

No	Program	Lokasi
		Panggoi. d. Kecamatan Muara atu , terdapat di: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; dan 5. Gampong Meuria Paloh.
3	Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan	Kota Lhokseumawe

F. Sistem Drainase

No	Program	Lokasi
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Lhokseumawe
	a. Jaringan Drainase Primer	
	1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer	a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Simpang Empat; 10. Gampong Tumpok Teungoh; dan 11. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim;

No	Program	Lokasi
		<p>2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Kuala; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Seuneubok; dan 9. Gampong Rayeuk Kareung. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; dan 8. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Padang Sakti; dan 8. Gampong Paloh Punti.</p>
	2) Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/	Kota Lhokseumawe

No	Program	Lokasi
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
	3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
	5) Normalisasi Jaringan drainase primer	
	6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan	
	7) Kajian pembangunan kanalkanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer	
	b. Jaringan Drainase Sekunder	
	1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdapat di: (Seluruh gampong)</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Punteuet; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude Punteuet; 13. Gampong Kuala; 14. Gampong Kumbang Punteuet; 15. Gampong Mesjid Punteuet; 16. Gampong Rayeuk Kareung; 17. Gampong Seuneubok; 18. Gampong Teungoh;

No	Program	Lokasi
		19. Gampong Tunong; dan 20. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Keude Cunda; 6. Gampong Meunasah Blang; 7. Gampong Meunasah Manyang; 8. Gampong Meunasah Mee; 9. Gampong Meunasah Mesjid; 10. Gampong Mns. Panggoi; 11. Gampong Paya Bili; 12. Gampong Paya Peunteut; dan 13. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Blang Panyang; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; dan 6. Gampong Paloh Punt
	2) Peningkatan jaringan drainase sekunder	Kota Lhokseumawe
	c. Jaringan Drainase Tersier	
	1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier	a. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Mesjid Punteuet. b. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu

No	Program	Lokasi
		Selatan; 2. Gampong Jawa Baroe; 3. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 4. Gampong Keude Aceh; 5. Gampong Kota Lhokseumawe; 6. Gampong Kuta Blang; 7. Gampong Lancang Garam; 8. Gampong Mon Geudong; 9. Gampong Pusong Baru; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Tumpok Teungoh; dan 13. Gampong Uteun Bayi. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; dan 4. Gampong Uteunkot
	2) Peningkatan jaringan drainase Tersier	Kota Lhokseumawe

G. Jalur sepeda

No	Program	Lokasi
1	Penyediaan jalur sepeda	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; 6. Gampong Kota Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang

No	Program	Lokasi
		Garam; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Lhokseumawe; 11. Gampong Simpang Empat; 12. Gampong Ujong Blang; dan 13. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Keude Cunda; 2. Gampong Meunasah Mee; 3. Gampong Meunasah Mesjid; 4. Gampong Mns. Panggoi; dan 5. Gampong Uteunkot.

H. Jaringan pejalan kaki

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Hagu Barat Laut; 2. Gampong Hagu Selatan; 3. Gampong Hagu Teungoh; 4. Gampong Jawa Baroe; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Lancang Garam; 10. Gampong Mon Geudong; 11. Gampong Pusong Baru; 12. Gampong Pusong Lhokseumawe; 13. Gampong Simpang Empat;

No	Program	Lokasi
		<p>14. Gampong Tumpok Teungoh;</p> <p>15. Gampong Ujong Blang; dan</p> <p>16. Gampong Ulee Jalan.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Jeulikat;</p> <p>2. Gampong Keude Punteuet;</p> <p>3. Gampong Mesjid Punteuet; dan</p> <p>4. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Cut Mamplam;</p> <p>4. Gampong Keude Cunda;</p> <p>5. Gampong Meunasah Mee;</p> <p>6. Gampong Meunasah Mesjid;</p> <p>7. Gampong Mns. Panggoi; dan</p> <p>8. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Naleung Mameh;</p> <p>4. Gampong Blang Panyang;</p> <p>5. Gampong Blang Pulo;</p> <p>6. Gampong Meuria Paloh; dan</p> <p>7. Gampong Padang Sakti.</p>

5.3.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang

5.3.2.1. Kawasan Lindung

A. Badan Air

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan dan pemeliharaan fungsi badan air	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gampong Banda Masen;2. Gampong Hagu Barat Laut;3. Gampong Keude Aceh;4. Gampong Kuta Blang;5. Gampong Mon Geudong;6. Gampong Pusong Lhokseumawe;7. Gampong Tumpok Teungoh;8. Gampong Ujong Blang; dan9. Gampong Uteun Bayi. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gampong Blang Buloh;2. Gampong Blang Cut;3. Gampong Blang Punteuet;4. Gampong Blang Teue;5. Gampong Jambo Mesjid;6. Gampong Jambo Timu;7. Gampong Jeulikat;8. Gampong Kuala;9. Gampong Kumbang Punteuet;10. Gampong Mesjid Punteuet;11. Gampong Rayeuk Kareung;12. Gampong Seuneubok;13. Gampong Teungoh; dan14. Gampong Tunong. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gampong Alue Awe;2. Gampong Blang Crum;3. Gampong Cut Mamplam;4. Gampong Keude

No	Program	Lokasi
		Cunda; 5. Gampong Meunasah Manyang; 6. Gampong Meunasah Mee; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; dan 9. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; dan 8. Gampong Ujong Pacu
2	Normalisasi sungai/ danau/ waduk	Kota Lhokseumawe

B. Kawasan Perlindungan Setempat

No	Program	Lokasi
1	Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong;
2	Peningkatan system penanaman vegetasi jenis tanaman keras	
3	Peningkatan sistem pengayaan tanaman	

No	Program	Lokasi
		<p>10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Tumpok Teungoh; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan 15. Gampong Uteun Bayi.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: 1. Gampong Blang Buloh; 2. Gampong Jeulikat; dan 3. Gampong Seuneubok.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Manyang; 6. Gampong Meunasah Mee; 7. Gampong Meunasah Mesjid; 8. Gampong Mns. Panggoi; dan 9. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Cot Trieng; 7. Gampong Meuria Paloh; dan 8. Gampong Ujong Pacu.</p>

C. Ruang Terbuka Hijau

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Rimba kota	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Blang Weu Baroh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Mesjid Punteuet; dan 8. Gampong Seuneubok. <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Crum; 2. Gampong Cot Girek Kandang; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Alue; 5. Gampong Meunasah Blang; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paloh Batee; dan 9. Gampong Paya Peunteut. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Cot Trieng; 5. Gampong Meunasah Dayah; 6. Gampong Meuria Paloh; 7. Gampong Paloh Punti; dan 8. Gampong Ujong Pacu.

No	Program	Lokasi
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kota	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Keude Aceh; 2. Gampong Kuta Blang; 3. Gampong Mon Geudong; 4. Gampong Simpang Empat; dan 5. Gampong Ujong Blang. <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Mns. Panggoi; dan 2. Gampong Paya Bili. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; dan 4. Gampong Meunasah Dayah.
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kecamatan	<p>a. Kecamatan Muara Satu, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Timur <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; dan 3. Gampong Rayeuk Kareung
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman kelurahan	<p>a. Kecamatan Muara Dua, terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Cot Girek Kandang <p>b. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Kuta Blang; 4. Gampong Mon Geudong; 5. Gampong Pusong Lhokseumawe;

No	Program	Lokasi
		<p>6. Gampong Simpang Empat; dan</p> <p>7. Gampong Ujong Blang.</p> <p>c. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Baloi;</p> <p>4. Gampong Blang Buloh;</p> <p>5. Gampong Blang Cut;</p> <p>6. Gampong Blang Punteuet;</p> <p>7. Gampong Blang Weu Baroh;</p> <p>8. Gampong Blang Weu Panjoe;</p> <p>9. Gampong Jeulikat;</p> <p>10. Gampong Mane Kareung;</p> <p>11. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>12. Gampong Rayeuk Kareung;</p> <p>13. Gampong Seuneubok;</p> <p>14. Gampong Tunong; dan</p> <p>15. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Timur; dan</p> <p>2. Gampong Ujong Pacu</p>
5	Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Banda Masen;</p> <p>2. Gampong Hagu Teungoh;</p> <p>3. Gampong Kuta Blang;</p> <p>4. Gampong Mon Geudong; dan</p> <p>5. Gampong Ulee Jalan.</p> <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Lim;</p> <p>2. Gampong Asan Kareung;</p> <p>3. Gampong Blang Buloh;</p>

No	Program	Lokasi
		4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Jambo Mesjid; 7. Gampong Kuala; dan 8. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Meunasah Alue; dan 2. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Meunasah Dayah; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Paloh Punti.
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalur hijau	a. Kecamatan Banda Sakti , terdapat di: 1. Gampong Mon Geudong b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Blang Buloh; 3. Gampong Rayeuk Kareung; dan 4. Gampong Seuneubok. c. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Padang Sakti; dan 5. Gampong Paloh Punti
	a. Penyediaan Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kota Lhokseumawe
	b. Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH)	Kota Lhokseumawe

No	Program	Lokasi
	privat Kota Lhokseumawe dengan standar minimal 10 % yang memanfaatkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien dasar hijau (KDH) minimal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan peruntukan industry sebesar 20% 2) Kawasan pariwisata sebesar 20% 3) Kawasan permukiman sebesar 10% 4) Kawasan campuran sebesar 10% 5) Kawasan perdagangan dan jasa sebesar 10% 6) Kawasan perkantoran sebesar 20% 7) Kawasan transportasi sebesar 10% 8) Kawasan kecamatan dan pertanahan sebesar 20% 	

D. Kawasan Ekosistem Mangrove

No	Program	Lokasi
1	Pemeliharaan kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kuta Blang; 4. Gampong Mon Geudong; 5. Gampong Ujong Blang; dan 6. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Jambo Mesjid; 3. Gampong Jambo Timu; dan

No	Program	Lokasi
		4. Gampong Kuala. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Keude Cunda; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid;

5.3.2.2 Kawasan Budi Daya

A. Badan Jalan

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan dan pemeliharaan badan jalan	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Kota Lhokseumawe; 3. Gampong Kuta Blang; 4. Gampong Lancang Garam; 5. Gampong Simpang Empat; 6. Gampong Ujong Blang; dan 7. Gampong Ulee Jalan. b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Keude Punteuet; 7. Gampong Mane Kareung; 8. Gampong Mesjid Punteuet; 9. Gampong Rayeuk Kareung;

No	Program	Lokasi
		10. Gampong Seuneubok; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane. c. Kecamatan Muara Dua , terdiri dari: 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Keude Cunda; 6. Gampong Meunasah Manyang; 7. Gampong Meunasah Mee; 8. Gampong Meunasah Mesjid; 9. Gampong Mns. Panggoi; dan 10. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.

B. Kawasan Perkebunan Rakyat

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan kawasan perkebunan rakyat	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Weu

No	Program	Lokasi
		<p>Baroh;</p> <p>6. Gampong Blang Weu Panjoe;</p> <p>7. Gampong Jeulikat;</p> <p>8. Gampong Mane Kareung;</p> <p>9. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>10. Gampong Rayeuk Kareung; dan</p> <p>11. Gampong Seuneubok.</p> <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Blang Poroh;</p> <p>4. Gampong Cot Girek Kandang;</p> <p>5. Gampong Cut amplam;</p> <p>6. Gampong Lhok Mon Puteh;</p> <p>7. Gampong Meunasah Alue;</p> <p>8. Gampong Meunasah Blang;</p> <p>9. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>10. Gampong Paloh Batee; dan</p> <p>11. Gampong Paya Peunteut.</p> <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Pulo;</p> <p>4. Gampong Cot Trieng;</p> <p>5. Gampong Meunasah Dayah;</p> <p>6. Gampong Padang Sakti;</p> <p>7. Gampong Paloh Punti; Dan</p> <p>8. Gampong Ujong Pacu</p>
2	rencana pengembangan baru perkebunan rakyat	Kota Lhokseumawe

C. Kawasan Pertanian

No	Program	Lokasi
1	Kajian pengembangan Kawasan tanaman pangan pada lokasi non sawah/area terbangun	Kota Lhokseumawe
2	Pengembangan kawasan tanaman pangan	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Pateuet; 7. Gampong Blang Teueu; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Kuala; 11. Gampong Kumbang Punteuet; 12. Gampong Mane Kareung; 13. Gampong Rayeuk Kareung; 14. Gampong Seuneubok; 15. Gampong Teungoh; 16. Gampong Tunong; dan 17. Gampong Ulee Blang Mane. <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; 4. Gampong Cut Mamplam; 5. Gampong Meunasah Manyang; dan 6. Gampong Mns. Panggoi. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah;

No	Program	Lokasi
		4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; 6. Gampong Paloh Punt; dan 7. Gampong Ujong Pacu
3	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>a. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Baloi; 4. Gampong Blang Buloh; 5. Gampong Blang Cut; 6. Gampong Blang Teueu; 7. Gampong Blang Peunteut; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jeulikat; 10. Gampong Kumbang Punteuet; 11. Gampong Mane Kareung; 12. Gampong Rayeuk Kareung; 13. Gampong Seuneubok; 14. Gampong Teungoh; 15. Gampong Tunong; dan 16. Gampong Ulee Blang Mane. <p>b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; dan 4. Gampong Meunasah Manyang. <p>c. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> 1. Gampong Blang Pulo; 2. Gampong Cot Trieng; 3. Gampong Meunasah Dayah; 4. Gampong Meuria Paloh; 5. Gampong Padang Sakti; 6. Gampong Paloh Punt; dan 7. Gampong Ujong Pacu.

No	Program	Lokasi
4	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi atau irigasi teknis serta infrastruktur pendukung lainnya	Kota Lhokseumawe
5	Peningkatan sistem pemanfaatan lahan pasang surut	Kota Lhokseumawe
6	Pengembangan teknologi pertanian	
7	Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas	
8	Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan kegiatan peternakan	
9	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan peternakan	
10	Pengembangan peternakan/ Urban Farming	

D. Kawasan Perikanan

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 3. Gampong Ujong Blang. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Blang Cut; 2. Gampong Blang Teue; 3. Gampong Jambo Mesjid; 4. Gampong Jambo Timu; 5. Gampong Kuala; 6. Gampong Mesjid Punteuet; 7. Gampong Teungoh; 8. Gampong Tunong; dan 9. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p>

No	Program	Lokasi
		1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cut Mamplam; 4. Gampong Meunasah Mee; 5. Gampong Meunasah Mesjid; dan 6. Gampong Meunasah Panggoi. d. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; dan 2. Gampong Ujong Pacu
2	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Kota Lhokseumawe
3	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Ujong Blang; dan 2. Gampong Ujong Blang. b. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Kuala
4	Pembangunan Jaringan Irigasi Budidaya Perikanan Tangkap	a. Kecamatan Banda Sakti , terdapat di: 1. Gampong Ujong Blang b. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Kuala
5	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kota Lhokseumawe

E. Kawasan Pertambangan dan Energi

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi	a. Kecamatan Banda Sakti , terdapat di: 1. Gampong Hagu Teungoh
2	Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik	a. Kecamatan Muara Satu , terdapat di: 1. Gampong Meuria Paloh
3	Gampong Meuria Paloh di Kecamatan Muara Satu dan	b. Kecamatan Muara Dua , terdapat di:

No	Program	Lokasi
	Gampong Uteunkot di Kecamatan Muara Dua 1.3 Penyediaan jalur hijau di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik	1. Gampong Uteunkot

F. Kawasan Peruntukan Industri

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan sistem penetapan kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat. b. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.
2	Peningkatan sistem promosi kawasan peruntukan industri	Kota Lhokseumawe
3	Pengembangan sistem penyediaan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat. b. Kecamatan Muara Satu , terdiri dari: 1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur; 3. Gampong Blang Naleung Mameh; 4. Gampong Blang Panyang; 5. Gampong Blang Pulo; 6. Gampong Meuria Paloh; dan 7. Gampong Padang Sakti.
4	Pengembangan industri kecil	Kota Lhokseumawe
5	Pengembangan Sentra Industri	

No	Program	Lokasi
6	Kajian pengembangan sistem relokasi secara bertahap industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	

G. Kawasan Periwisata

No	Program	Lokasi
1	Kajian peningkatan sistem penetapan dan delineasi Kawasan pariwisata	Kota Lhokseumawe
2	Kajian pembangunan sistem revitalisasi kawasan bersejarah	
3	Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Kawasan pariwisata	a. Kecamatan Banda Sakti , terdapat di: 1. Gampong Ujong Blang b. Kecamatan Blang Mangat , terdiri dari: 1. Gampong Alue Lim; dan 2. Gampong Jeulikat. c. Kecamatan Muara Satu , terdapat di: 1. Gampong Meunasah Dayah
4	Pembangunan prasarana transportasi wisata	
5	Peningkatan sistem penyediaan moda transportasi wisata	
6	Pembangunan wisata <i>Water Boom</i>	a. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: 1. Gampong Alue Lim

H. Kawasan Permukiman

No	Program	Lokasi
1	Kawasan perumahan	
	a. Pengembangan perumahan baru dan permukiman	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Hagu Teungoh; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang;

No	Program	Lokasi
		9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Tumpok Teungoh; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; dan 15. Gampong Uteun Bayi. b. Kecamatan Blang Mangat , terdapat di: (Seluruh Gampong) c. Kecamatan Muara Dua , terdapat di: (Seluruh gampong)
	b. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami	Kota Lhokseumawe
	c. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Kawasan Campuran	Kota Lhokseumawe
	d. Pengembangan sistem peremajaan kawasan	Kota Lhokseumawe
	e. Pembangunan sistem penataan kawasan kumuh (penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas rumah, bantuan ekonomi)	Kota Lhokseumawe
	f. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe
	g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Lhokseumawe
	h. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Lhokseumawe
	i. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kota Lhokseumawe
	j. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan	Kota Lhokseumawe

No	Program	Lokasi
	Permukiman (RP3KP)	
2	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	
	<p>a. Peningkatan kualitas sarana dan prasaran penunjang Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial</p>	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 5. Gampong Keude Aceh; 1. Gampong Kota Lhokseumawe; 7. Gampong Kuta Blang; 8. Gampong Lancang Garam; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Simpang Empat; 13. Gampong Ujong Blang; 14. Gampong Ulee Jalan; Dan 15. Gampong Uteun Bayi. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Cut; 5. Gampong Blang Punteuet; 6. Gampong Blang Teue; 7. Gampong Blang Weu Baroh; 8. Gampong Blang Weu Panjoe; 9. Gampong Jambo Mesjid; 10. Gampong Jambo Timu; 11. Gampong Jeulikat; 12. Gampong Keude

No	Program	Lokasi
		<p>Punteuet;</p> <p>13. Gampong Kuala;</p> <p>14. Gampong Kumbang Punteuet;</p> <p>15. Gampong Mane Kareung;</p> <p>16. Gampong Mesjid Punteuet;</p> <p>17. Gampong Rayeuk Kareung;</p> <p>18. Gampong Seunebok;</p> <p>19. Gampong Teungoh;</p> <p>20. Gampong Tunong; dan</p> <p>21. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe;</p> <p>2. Gampong Blang Crum;</p> <p>3. Gampong Blang Poroh;</p> <p>4. Gampong Cot Girek Kandang;</p> <p>5. Gampong Cut Mamplam;</p> <p>6. Gampong Keude Cunda;</p> <p>7. Gampong Lhok Mon Puteh;</p> <p>8. Gampong Meunasah Blang;</p> <p>9. Gampong Meunasah Manyang;</p> <p>10. Gampong Meunasah Mee;</p> <p>11. Gampong Meunasah Mesjid;</p> <p>12. Gampong Mns. Panggoi;</p> <p>13. Gampong Paya Peunteut; dan</p> <p>14. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat;</p> <p>2. Gampong Batuphat Timur;</p> <p>3. Gampong Blang Panyang;</p> <p>4. Gampong Blang Pulo;</p>

No	Program	Lokasi
		5. Gampong Cot Trieng; 6. Gampong Meunasah Dayah; 7. Gampong Meuria Paloh; 8. Gampong Padang Sakti; 9. Gampong Paloh Punt; dan 10. Gampong Ujong Pacu
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah (mesjid, gereja, dll) sesuai skala pelayanan	Kota Lhokseumawe
	c. Peningkatan sistem pemeliharaan fasilitas peribadatan	Kota Lhokseumawe
	d. Pembangunan sekolah baru (SD, SLTP, SLTA)	Kota Lhokseumawe
	e. Peningkatan sistem rehabilitasi sekolah yang rusak	Kota Lhokseumawe
	f. Pembangunan laboratorium, perpustakaan, tempat praktek kerja	Kota Lhokseumawe
	g. Pengembangan Rumah Sakit	Kota Lhokseumawe
	h. Pengembangan Puskesmas	Kota Lhokseumawe
	i. Peningkatan fasilitas Kesehatan	Kota Lhokseumawe
3	Kawasan RTNH	
	a. Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	a. Kecamatan Banda Sakti , terdiri dari: 1. Gampong Mon Geudong; 2. Gampong Pusong Lhokseumawe
	b. Peningkatan sistem pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	
	c. Pembangunan dan penataan kawasan kuliner	

I. Kawasan Campuran

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan sistem penetapan lokasi ruang sektor informal	
2	Penyusunan Peraturan Walikota mengenai pengelolaan pedagang kaki lima	

No	Program	Lokasi
3	Pengembangan dan penataan Kawasan campuran	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kota Lhokseumawe; 4. Gampong Lancang Garam; 5. Gampong Pusong Lhokseumawe; dan 6. Gampong Simpang Empat. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Buloh; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Mane Kareung; 7. Gampong Rayeuk Kareung; dan 8. Gampong Seuneubok. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Cot Girek Kandang; dan 4. Gampong Meunasah Manyang. <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Timur; 2. Gampong Blang Panyang; 3. Gampong Blang Pulo; 4. Gampong Meunasah Dayah; 5. Gampong Meuria Paloh; 6. Gampong Padang Sakti; dan 7. Gampong Paloh Punt

J. Kawasan Perdagangan dan Jasa

No	Program	Lokasi
1	Pengembangan sistem renovasi Pasar tradisional	Kota Lhokseumawe
2	Pembangunan pasar tradisional baru	
3	Peningkatan fasilitas pasar	
4	Pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisionalmodern	
5	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan perdagangan dan jasa	
6	Penataan pedestrian kawasan perdagangan jasa dan pertokoan	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Banda Masen; 2. Gampong Hagu Barat Laut; 3. Gampong Hagu Selatan; 4. Gampong Jawa Baroe; 5. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 6. Gampong Keude Aceh; 7. Gampong Kota Lhokseumawe; 8. Gampong Kuta Blang; 9. Gampong Mon Geudong; 10. Gampong Pusong Baru; 11. Gampong Pusong Lhokseumawe; 12. Gampong Simpang Empat; 13. Gampong Tumpok Teungoh; 14. Gampong Ujong Blang; 15. Gampong Ulee Jalan; dan 16. Gampong Uteun Bayi. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Asan Kareung; 3. Gampong Blang Punteuet; 4. Gampong Blang Weu Baroh;

No	Program	Lokasi
		<p>5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Keude Punteuet; 7. Gampong Kumbang Punteuet; 8. Gampong Mane Kareung; 9. Gampong Mesjid Punteuet; 10. Gampong Rayeuk Kareung; dan 11. Gampong Ulee Blang Mane.</p> <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Blang Poroh; 4. Gampong Cot Girek Kandang; 5. Gampong Cut Mamplam; 6. Gampong Keude Cunda; 7. Gampong Lhok Mon Puteh; 8. Gampong Meunasah Manyang; 9. Gampong Meunasah Mee; 10. Gampong Meunasah Mesjid; 11. Gampong Mns. Panggoi; 12. Gampong Paya Peunteut; dan 13. Gampong Uteunkot.</p> <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <p>1. Gampong Batuphat Barat; 2. Gampong Batuphat Timur 3. Gampong Blang Panyang; 4. Gampong Blang Pulo; 5. Gampong Meuria Paloh; dan 6. Gampong Padang Sakti.</p>

K. Kawasan Perkantoran

No	Program	Lokasi
1	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Kawasan Perkantoran untuk Kepentingan Strategis Kota	<p>a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keude Aceh; 3. Gampong Kota Lhokseumawe; 4. Gampong Kuta Blang; 5. Gampong Mon Geudong; 6. Gampong Simpang Empat; dan 7. Gampong Ujong Blang. <p>b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Lim; 2. Gampong Punteuet; 3. Gampong Blang Teue; 4. Gampong Blang Weu Panjoe; 5. Gampong Jeulikat; 6. Gampong Seuneubok; 7. Gampong Teungoh; dan 8. Gampong Ulee Blang Mane. <p>c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Alue Awe; 2. Gampong Blang Crum; 3. Gampong Lhok Mon Puteh; 4. Gampong Meunasah Blang; 5. Gampong Meunasah Mee; 6. Gampong Meunasah Mesjid; 7. Gampong Mns. Panggoi; 8. Gampong Paya Punteuet; dan 9. Gampong Uteunkot. <p>d. Kecamatan Muara Satu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; dan 2. Gampong Batuphat Timur.

No	Program	Lokasi
2	Pengembangan sistem perencanaan kawasan kantor pemerintahan terpadu untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
3	Pengembangan sistem penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintah	Kota Lhokseumawe

L. Kawasan Transportasi

No	Program	Lokasi
1	Perbaiki kualitas sarana dan prasarana Kawasan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua; dan b. Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti.

M. Kawasan Pertanahan dan Keamanan

No	Program	Lokasi
1	<p>Penataan Kawasan Pertanahan dan Keamanan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benglap Iskandar Muda/1-1 Lhokseumawe; b. Detasemen Peralatan Iskandar Muda/1 Lhokseumawe; c. Detasemen Polisi Militer Iskandar Muda/1; d. Detasemen Zeni Bangunan 2 Iskandar Muda; e. Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe; f. Kantor Kepolisian Sektor Banda Sakti; g. Kantor Marinir Lanal Lhokseumawe; h. Komando Distrik Militer 0103/Aceh Utara; i. Komando Resor Militer 011/Lilawangsa; j. Pangkalan TNI AL Lhokseumawe Detasemen Polisi Militer; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe; 2. Gampong Keuda Aceh; dan 3. Gampong Pusong Baru. b. Kecamatan Blang Mangat, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gampong Jeulikat; 2. Gampong Kumbang Punteuet; 3. Gampong Mesjid Punteuet; dan 4. Gampong Rayeuk Kareung. c. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gampong Meunasah Mee; dan 2. Gampong Uteunkot. d. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gampong Batuphat Barat; dan

No	Program	Lokasi
	k. Pos Lintas Cunda;	2. Gampong Blang Panyang.
2	Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Kota Lhokseumawe
3	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan pertahanan dan keamanan	

5.3.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kota

A. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ekonomi

No	Program	Lokasi
1	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Kecamatan Muara Satu
2	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Blang Mangat



**RANCANGAN
TEKNOKRATIK**

BAB - VI

PENUTUP

RPJMK
LHOKSEUMAWE
2025 - 2029



BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan teknokratik. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini disusun dalam kerangka teknokratik, yaitu dengan menggunakan data-data empiris serta analisis berbasis kerangka pikir ilmiah. Harapannya, dokumen ini akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang akan mengkolaborasikan berbagai pendekatan, baik politis, partisipatif, atas bawah ataupun bawah atas. Sehingga akan dapat diperoleh perencanaan yang lebih menyeluruh, sistematis, terstruktur, memiliki kejelasan dalam pentahapan tahunan maupun kejelasan atas tujuan pada akhir periode perencanaan jangka menengah ini



PEMERINTAH KOTA LHOakseumawe
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024